

JURNA

AKUNTANSI & MANAJEMEN

JAM

TERAKREDITASI SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

UTANG DAN KUALITAS LABA

Bambang Sutopo

**REFORMASI PAJAK DALAM KERANGKA REFORMASI EKONOMI-POLITIK
DI INDONESIA**

Bambang Sudibyo

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Bambang Suripto

**STRATEGY TO ENHANCE INDONESIAN TRADE PERFORMANCE TOWARDS
THE REST OF ASEAN-5 MARKETS**

Jaka Sriyana

Abdul Hakim

**ESTIMASI HARGA PREMI PENJAMINAN SIMPANAN WAJAR BAGI IDIC
DENGAN MODEL RISIKO KREDIT**

Firman Pribadi

Suad Husnan

Mamduh M.Hanafi

Eduardus Tandelilin

**THE VALUE RELEVANCE OF ACCOUNTING INFORMATION
IN TRANSITION TO IAS/IFRS: THE CASE OF INDONESIA**

Eko Widodo Lo

Rp7.500,-

JAM	VOL. 23	NO. 2	Hal 79-151	AGUSTUS 2012	ISSN: 0853-1259
-----	---------	-------	------------	--------------	-----------------



Vol. 23, No. 2, Agustus 2012

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN (JAM)

TERAKREDITASI
SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

EDITOR IN CHIEF

Djoko Susanto
STIE YKPN Yogyakarta

EDITORIAL BOARD MEMBERS

Dody Hapsoro
STIE YKPN Yogyakarta

I Putu Sugiarta Sanjaya
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dorothea Wahyu Ariani
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jaka Sriyana
Universitas Islam Indonesia

MANAGING EDITORS

Baldric Siregar
STIE YKPN Yogyakarta

EDITORIAL SECRETARY

Rudy Badrudin
STIE YKPN Yogyakarta

PUBLISHER

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1100 Fax. (0274) 486155

EDITORIAL ADDRESS

Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 Fax. (0274) 486155
<http://www.stieykn.ac.id> • e-mail: rudy.badrudin@stieykn.ac.id
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening 137 – 0095042814

Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM) terbit sejak tahun 1990. JAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JAM dimaksudkan sebagai media penguangan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang akuntansi dan manajemen. Setiap naskah yang dikirimkan ke JAM akan ditelaah oleh MITRA BESTARI yang bidangnya sesuai. Daftar nama MITRA BESTARI akan dicantumkan pada nomor paling akhir dari setiap volume. Penulis akan menerima lima eksemplar cetak lepas (*off print*) setelah terbit.

JAM diterbitkan setahun tiga kali, yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Harga langganan JAM Rp7.500,- ditambah biaya kirim Rp17.500,- per eksemplar. Berlangganan minimal 1 tahun (volume) atau untuk 3 kali terbitan. Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengarsip karya ilmiah dalam bentuk *electronic file* artikel-artikel yang dimuat pada JAM dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di *website* STIE YKPN Yogyakarta (<http://www.stieykn.ac.id>).

DAFTAR ISI

TERAKREDITASI
SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

UTANG DAN KUALITAS LABA

Bambang Sutopo
79-86

REFORMASI PAJAK DALAM KERANGKA REFORMASI EKONOMI-POLITIK DI INDONESIA

Bambang Sudibyo
87-103

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Bambang Satripto
105-117

STRATEGY TO ENHANCE INDONESIAN TRADE PERFORMANCE TOWARDS THE REST OF ASEAN-5 MARKETS

Jaka Sriyana
Abdul Hakim
119-127

ESTIMASI HARGA PREMI PENJAMINAN SIMPANAN WAJIB BAGI IDIC DENGAN MODEL RISIKO KREDIT

Firman Pribadi
Suad Husnan
Mamduh M. Hanafi
Eduardus Tandelilin
129-137

THE VALUE RELEVANCE OF ACCOUNTING INFORMATION IN TRANSITION TO IAS/IFRS: THE CASE OF INDONESIA

Eko Widodo Lo
139-151

UTANG DAN KUALITAS LABA

Bambang Sutopo

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami 36A, Surakarta 57126
Telepon +62 271 647481, Fax +62 271 638143
E-mail: bbsutopo@yahoo.com

ABSTRACT

This study examines the association between debt financing and earnings quality of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2008-2010. Results of this study show that debt is positively associated with quality of earnings at low level of debt, and debt is negatively associated with earnings quality at high level of debt. After controlling for dividend status, returns on assets (ROA), age, size, and market-to-book ratio, the results on the positive association between debt and earnings quality is consistent at low level of debt. However, this study does not find the negative association between debt and earnings quality at high level of debt. Results of this study show that at high level of debt, size is positively related to earnings quality.

Keywords: earnings quality, debt, abnormal accruals, size

JEL Classification: M41

PENDAHULUAN

Penelitian ini menguji hubungan antara utang dan kualitas laba (kualitas informasi laba) di Indonesia untuk tingkat utang tinggi dan tingkat utang rendah. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang kualitas laba

menunjukkan manfaat kualitas laba, antara lain, bahwa kualitas laba: berhubungan dengan arus kas pada periode berikutnya (Al-Attar dkk., 2008), mempunyai relevansi nilai (Cahan dkk., 2009), mempunyai pengaruh pada biaya modal (Kim dan Qi, 2010; Bhattacharya dkk., 2012), dan berpengaruh pada *underpricing* (Boulton dkk., 2011).

Meskipun kualitas laba bermanfaat, kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan di suatu negara dan/atau di berbagai negara bervariasi. Hasil studi Boulton dkk. (2011) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang mempunyai kualitas laba perusahaan yang rendah (di samping China dan Taiwan), sedangkan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia termasuk negara yang mempunyai kualitas laba perusahaan yang tinggi. Penelitian tersebut menggunakan skor manajemen laba agregat rata-rata (*average aggregate EM scores*) untuk mengukur kualitas laba. Dengan demikian, di antara perusahaan-perusahaan di suatu negara masih terdapat variasi kualitas laba.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laba adalah penggunaan utang. Hasil studi Ghosh dan Moon (2010) dengan menggunakan data di Amerika Serikat -termasuk negara dengan kualitas laba perusahaan tinggi, menunjukkan bahwa utang dapat berhubungan positif atau negatif dengan kualitas laba. Utang berhubungan positif dengan kualitas laba jika tingkat utang rendah, dan utang berhubungan negatif dengan kualitas laba jika tingkat utang tinggi. Dalam hal ini, tingkat utang rendah yaitu rasio utang terhadap

total aset (*debt-to-assets ratio* atau DAR) kurang atau sama dengan 40%, dan tingkat utang tinggi yaitu DAR lebih besar dari 40%. Valipour dan Moradbeygi (2011), yang juga meneliti hubungan utang dengan kualitas laba di Iran tetapi menggunakan klasifikasi tingkat utang tinggi dan rendah yang berbeda yaitu tingkat utang rendah jika DAR kurang atau sama dengan 50% dan tingkat utang tinggi jika DAR lebih besar dari 50%, mendapatkan hasil yang konsisten dengan temuan Ghosh dan Moon (2010).

Penelitian ini menguji hubungan utang dengan kualitas laba di Indonesia yang berdasarkan temuan Boulton dkk. (2011) termasuk negara dengan kualitas laba rendah. Pengujian dilakukan untuk seluruh sampel (utang tinggi dan rendah), sampel utang tinggi, dan sampel utang rendah. Penentuan batas tingkat utang mengikuti Ghosh dan Moon (2010) yaitu 40%. Di samping itu, pengujian tambahan dengan menggunakan batas tingkat utang sesuai Valipour dan Moradbeygi (2011) yaitu 50%. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, yaitu dengan memberi bukti empiris di Indonesia dan memberi kontribusi terhadap literatur penelitian akuntansi khususnya tentang hubungan utang dengan kualitas laba.

MATERI DAN BAHAN PENELITIAN

Penggunaan utang dapat mempunyai hubungan dengan kualitas laba, dan hubungan tersebut dapat bersifat positif atau negatif. Hubungan positif antara utang dan kualitas laba, antara lain dinyatakan oleh Barton dan Waymire (2004) dan (Feltham dkk., 2007), yaitu bahwa perusahaan cenderung meningkatkan kualitas pelaporan seiring dengan peningkatan *leverage*. Perusahaan terdorong untuk menyediakan informasi yang berkualitas untuk menurunkan biaya modal pinjaman. Peningkatan kualitas informasi ini meningkatkan efisiensi biaya.

Utang dapat berhubungan negatif dengan kualitas laba, karena manajemen laba (sebagai ukuran terbalik dari kualitas laba) lebih potensial dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. Jika utang meningkat, penggunaan *debt covenant* menjadi semakin diperlukan untuk mengurangi konflik keagenan (Ghosh dan Moon, 2010). *Covenants* (yang banyak menggunakan EBITDA) adalah penting dalam

pendanaan perusahaan khususnya pada perusahaan besar (Moir dan Sudarsanam, 2007). Hasil studi Billett dkk. (2007) menunjukkan bahwa proteksi dengan menggunakan *covenant* meningkat searah dengan *leverage*. Kegagalan dalam memenuhi perjanjian utang diharapkan tidak terjadi karena dapat mengakibatkan perusahaan menanggung biaya yang tinggi (Beneish dan Press, 1993; serta Chen dan Wei, 1993). Untuk menghindari biaya yang tinggi ini, perusahaan dapat terdorong untuk melakukan manajemen laba (Dichev dan Skinner, 2002; serta Beatty dan Weber, 2003). Menurut Feltham dkk. (2007), nilai akuntansi cenderung bias jika nilai perusahaan mendekati level perjanjian utang. Hasil beberapa studi menunjukkan hubungan positif antara utang dan manajemen laba atau hubungan negatif antara utang dan kualitas laba (DeFond dan Jiambalvo, 1994; Prawitt dkk., 2009; Givoly dkk., 2010; Tong dan Miao, 2011).

Penelitian tentang hubungan positif dan negatif dilakukan oleh Ghosh dan Moon (2010) di Amerika Serikat. Hasil studinya menunjukkan bahwa utang dapat berhubungan positif atau negatif dengan kualitas laba. Utang berhubungan positif dengan kualitas laba untuk tingkat utang rendah dan utang berhubungan negatif dengan kualitas laba untuk tingkat utang tinggi. Valipour dan Moradbeygi (2011) yang meneliti hubungan antara utang dan kualitas laba di Iran menemukan hasil yang konsisten dengan temuan Ghosh dan Moon (2010). Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis penelitian tentang hubungan utang dengan kualitas laba sebagai berikut.

H1a: Pada tingkat utang rendah, utang berhubungan positif dengan kualitas laba.

H1b: Pada tingkat utang tinggi, utang berhubungan negatif dengan kualitas laba.

Penelitian ini memasukkan beberapa variabel kontrol yang dapat mempunyai pengaruh pada kualitas laba, yaitu dividen, profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan *market-to-book ratio*. Dividen dapat merupakan signal positif tentang kinerja perusahaan yang akan datang. Hasil studi Tong dan Miao (2011) menunjukkan bahwa perusahaan yang membayar dividen mempunyai kualitas laba yang relatif tinggi baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membayar dividen. Profitabilitas dapat mempengaruhi kualitas laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi diharapkan mempunyai

kualitas informasi laba yang tinggi pula. Determinan penting perilaku pengungkapan dan pelaporan adalah kinerja perusahaan. Lee dkk. (2006) menyatakan bahwa kualitas laba berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Prawitt dkk. (2009) menemukan hubungan negatif antara ROA dan *absolute value* dari *accruals*. Hasil studi Zang (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *accrual-based earnings management*. Hasil ini mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada kualitas laba. Umur perusahaan dapat mencerminkan keamanan perusahaan. Perusahaan yang lebih mapan diharapkan mempunyai kualitas laba yang relatif lebih baik. Hasil studi Dechow dkk. (2003) menunjukkan bahwa karakteristik *discretionary accruals* yang relatif besar pada perusahaan dengan laba kecil (dibandingkan perusahaan yang lain) disertai dengan karakteristik umur perusahaan yang lebih kecil. Prawitt dkk. (2009) menemukan bahwa umur perusahaan berhubungan negatif dengan *absolute value of accruals*. Hasil dua studi ini mengindikasikan bahwa umur perusahaan mempunyai hubungan positif dengan kualitas laba. Ukuran Perusahaan dapat mempunyai pengaruh pada kualitas laba. Perusahaan besar mendapat perhatian lebih besar dari para pemangku kepentingan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar diharapkan mempunyai kualitas laba yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil. Beberapa studi (Lim dkk., 2008; Sanjaya, 2011; Zhang, 2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan manajemen laba atau berhubungan positif dengan kualitas laba. *Market-to-Book Ratio* (MTB) yang mencerminkan pertumbuhan perusahaan dapat berhubungan dengan kualitas laba. Hasil penelitian Beneish dan Vargus (2002) menunjukkan bahwa MTB berpengaruh positif terhadap laba pada perioda berikutnya. Sebaliknya, Tong dan Miao (2011) menemukan bahwa MTB berhubungan negatif dengan kualitas laba.

Kualitas laba, diukur dengan menggunakan tiga proksi *abnormal accruals*. Proksi *abnormal accruals* menurut Peasnell dkk. (2000, 2005) dan Al-Attar (2008) adalah *residuals* yang dihasilkan dari persamaan regresi berikut:

$$WC_{i,s,t} = \beta_{0,s,t} + \beta_{1,s,t}(\Delta REV_{i,s,t} + \Delta REC_{i,s,t}) + \epsilon_{i,s,t} \quad (1)$$

Proksi *abnormal accruals* adalah *residuals* yang dihasilkan dari persamaan regresi berikut sebagaimana digunakan oleh Al-Attar (2008) yaitu:

$$WC_{i,s,t} = \beta_{0,s,t} + \beta_{1,s,t}(\Delta REV_{i,s,t} + \Delta REC_{i,s,t}) + \beta_{2,s,t}OCF_{i,s,t} + \epsilon_{i,s,t} \quad (2)$$

Penjelasan notasi dalam dua persamaan di atas adalah sebagai berikut:

$WC_{j,s,t}$ = *working capital accruals* untuk perusahaan j (dalam sektor s dan tahun t) = perubahan aset lancar non-kas dikurangi perubahan kewajiban jangka pendek; $REV_{j,s,t}$ = perubahan pendapatan dari tahun $t-1$ ke t ; $REC_{j,s,t}$ = perubahan piutang dari tahun $t-1$ ke t . $OCF_{i,s,t}$ = arus kas dari aktivitas operasi. $\hat{\alpha}_{0,s,t}$, $\hat{\alpha}_{1,s,t}$, $\hat{\alpha}_{2,s,t}$ merupakan parameter model yang diestimasi untuk sektor s dan tahun t . $\hat{\alpha}_{j,s,t}$ = *residual errors* = estimasi *abnormal accruals* dari model (1) dan (2). Nilai absolut dari masing-masing *residuals errors* tersebut digunakan sebagai proksi kualitas laba, yaitu berturut-turut: AA1 dan AA2. Nilai absolut *residual errors* yang rendah (tinggi) menunjukkan kualitas laba yang tinggi (rendah).

Metoda analisis menggunakan model empiris sebagai berikut.

$$AA_{i,t} = \alpha + \beta_1 DAR + \beta_{2,t} DIV + \beta_{3,t} ROA + \beta_{4,t} AGE + \beta_{5,t} SIZE + \beta_{6,t} MTB + e_{it}$$

AA adalah kualitas laba diukur dengan AA1 dan AA2 sebagaimana dijelaskan dalam pengukuran variabel di atas. DAR (*debt-to-assets ratio*) adalah total utang dibagi dengan total aset. DIV (status dividen) merupakan variabel *dummy*, yaitu diberi angka 1 jika perusahaan membayar dividen kas dan diberi angka 0 jika perusahaan tidak membayar dividen kas. ROA adalah laba dibagi dengan aset total. AGE (umur perusahaan) adalah jumlah tahun dari tahun pendirian perusahaan sampai dengan tahun observasi. MTB adalah nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku.

Sumber utama data penelitian adalah informasi keuangan yang dipublikasi melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dilengkapi ikhtisar informasi keuangan dari *Indonesian Capital Market Directory*. Data laporan keuangan yang digunakan untuk pengukuran variabel adalah data perioda 2007-2010 dan

untuk analisis adalah data perioda 2008-2010. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan kriteria sebagai berikut: data untuk pengukuran variabel dapat diperoleh secara lengkap, pada tahun yang bersangkutan ekuitas perusahaan adalah positif, dan rasio utang terhadap aset atau *debt to assets ratio* (DAR) kurang dari 1. Di samping itu, data yang ekstrim untuk *working capital accruals* dan *absolute value* dari *abnormal accruals* dikeluarkan dari sampel. Identifikasi data ekstrim menggunakan fasilitas program statistik SPSS.

HASIL PENELITIAN

Pemilihan sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI dari periode pelaporan keuangan 2007-

2010 (untuk pengukuran variabel) dan perioda 2008-2010 (untuk pengujian hipotesis) menghasilkan 566 observasi. Daftar sampel penelitian berdasarkan sektor industri disajikan pada Tabel 1. Jumlah sampel tersebut berdasarkan kategori tingkat utang meliputi 195 observasi dalam utang rendah (rasio utang terhadap aset atau *debt to assets ratio* [DAR] lebih kecil atau sama dengan 40%) dan 371 observasi dalam utang tinggi (DAR lebih besar dari 40%).

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu statistik deskriptif untuk 1) seluruh sampel (sampel dalam kategori utang tinggi dan rendah); 2) sampel dalam kategori utang tinggi; dan 3) sampel dalam kategori utang rendah. Hasil statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa *mean* DAR untuk semua sampel adalah 0,4792, *mean*

Tabel 1. Sampel Penelitian

Nomor Sektor	Nama Sektor	Jumlah Observasi
1	Pertanian)	26
2	Pertambangan	30
3	Industri Dasar dan Kimia	96
4	Aneka Industri	57
5	Industri Barang Konsumsi	72
6	Properti, Real Estat, dan Konstruksi Bangunan	87
7	Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi	33
8	Keuangan	0
9	Perdagangan, Jasa, dan Investasi	165
		566

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Utang Tinggi dan Rendah		Utang Tinggi		Utang Rendah	
	Mean	Std. Deviation	Mean	Std. Deviation	Mean	Std. Deviation
AA1	0,171	0,136	0,169	0,139	0,173	0,131
AA2	0,166	0,130	0,165	0,135	0,168	0,121
DAR	0,479	0,210	0,604	0,130	0,241	0,097
DIV	0,380	0,486	0,361	0,481	0,415	0,494
ROA	9,086	11,413	7,183	8,184	12,707	15,217
AGE	45,180	33,583	46,090	34,479	43,440	31,823
SIZE	13,967	1,632	14,074	1,625	13,763	1,629
MTB	2,051	4,087	2,198	4,866	1,772	1,836
N	566		371		195	

DAR pada kategori utang tinggi adalah 0,604, dan *mean* DAR pada kategori utang rendah adalah 0,241. *Mean* AA1 adalah 0,171 (untuk seluruh sampel), 0,169 (untuk sampel utang tinggi), dan 0,173 untuk sampel utang rendah), dan *mean* AA2 adalah 0,166 (untuk seluruh sampel), 0,165 (untuk sampel utang tinggi), dan 0,168 (untuk sampel utang rendah). *Mean* AA1 atau AA2 untuk utang tinggi tidak berbeda signifikan dengan *mean* AA1 atau AA2 untuk utang rendah (hasil uji beda *mean* tidak disajikan).

AA = *Absolute Abnormal Accruals* (Proksi kualitas laba), DAR = Rasio utang terhadap aset (*Debt to assets ratio*), DIV = Status dividen (1 jika perusahaan membayar dividen, dan 0 jika tidak), ROA = *Return on assets*, AGE = Umur perusahaan, SIZE = Ukuran perusahaan, MTB = *Market to book ratio*.

Tabel 3 menyajikan hasil analisis hubungan antara utang dan kualitas laba. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3 tersebut, koefisien DAR untuk seluruh sampel dan untuk kategori tingkat utang tinggi tidak signifikan, sedangkan koefisien DAR untuk tingkat utang rendah adalah negatif signifikan untuk kedua proksi kualitas laba.

AA = *Absolute Abnormal Accruals* (Proksi kualitas laba), DAR = Rasio utang terhadap aset (*Debt to assets ratio*), DIV = Status dividen (1 jika perusahaan

membayar dividen, dan 0 jika tidak), ROA = *Return on assets*, AGE = Umur perusahaan, SIZE = Ukuran perusahaan, MTB = *Market to book ratio*.

PEMBAHASAN

Hasil regresi pada Tabel 3 untuk seluruh sampel, koefisien DAR adalah negatif tetapi tidak signifikan. Hasil analisis untuk seluruh sampel ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan utang dengan kualitas laba. Untuk sampel utang tinggi, hasil regresi menunjukkan koefisien DAR adalah positif tetapi tidak signifikan. Hasil analisis ini tidak berhasil mendukung bahwa utang berhubungan negatif dengan kualitas laba (atau berhubungan positif dengan manajemen laba). Hasil regresi untuk sampel utang rendah pada Tabel 3 menunjukkan koefisien DAR adalah -0,427 (signifikan pada level 1%) untuk proksi kualitas laba AA1 dan -0,387 (signifikan pada level 1%) untuk proksi kualitas laba AA2. Karena AA1 dan AA2 yang rendah (tinggi) menunjukkan kualitas laba yang tinggi (rendah), hasil ini mendukung hipotesis bahwa jika utang rendah, maka utang mempunyai hubungan positif dengan kualitas laba.

Analisis tambahan dilakukan dengan menggunakan pengelompokan utang ke dalam 2

Tabel 3 Hasil Regresi Kualitas Laba terhadap Utang

Variabel	Utang Tinggi dan Rendah		Utang Tinggi		Utang Rendah	
	AA1	AA2	AA1	AA2	AA1	AA2
Konstanta	0,386 *** (7,288)	0,343 *** (6,748)	0,389 ***** (4,977)	0,307 *** (4,014)	0,296 *** (3,579)	0,321 *** (4,237)
DAR	-0,015 (-0,543)	-0,015 (-0,562)	0,053 (0,893)	0,057 (0,984)	-0,427 *** (-4,464)	-0,387 *** (-4,416)
DIV	-0,023 * (-1,699)	-0,017 (-1,320)	-0,025 (-1,470)	-0,025 (-1,474)	-0,030 (-1,431)	-0,013 (-0,660)
ROA	0,000 (0,388)	0,000 (-0,016)	0,001 (0,935)	0,001 (0,999)	0,001 (0,792)	0,000 (0,455)
AGE	0,000 (0,005)	0,000 (-0,229)	0,000 (-0,830)	0,000 (-1,266)	0,000 (1,543)	0,001 * (1,918)
SIZE	-0,014 *** (-3,877)	-0,011 *** (-3,215)	-0,017 *** (-3,655)	-0,011 *** (-2,494)	-0,002 (-0,322)	-0,005 (-0,825)
MTB	0,000 (0,038)	-0,001 (-0,368)	-0,001 (-0,344)	-0,001 (-0,600)	-0,003 (-0,661)	-0,009 * (-1,902)
N	566	566	371	371	195	195
Adj. R2	0,034	0,021	0,043	0,022	0,096	0,116
F-stat	4,308 ***	3,065 ***	3,780 ***	2,406 **	4,445 ***	5,229 ***

kategori tingkat utang sesuai pengelompokan yang dilakukan oleh Valipour dan Moradbeygi (2011), yaitu kategori utang tinggi jika DAR lebih besar dari 50% dan kategori utang rendah jika DAR lebih kecil atau sama dengan 50%. Hasil pengujian hubungan antara utang dan kualitas laba dengan pengelompokan ini konsisten dengan hasil pengujian hubungan antara utang dan kualitas laba dengan pengelompokan ke dalam kategori utang tinggi jika DAR lebih besar dari 40% dan kategori utang rendah jika DAR lebih kecil atau sama dengan 40%, yaitu koefisien DAR adalah negatif (signifikan pada level 1%) baik untuk proksi kualitas laba AA1 maupun AA2. Hasil ini memberi bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif antara utang dan kualitas laba jika tingkat utang rendah.

Hasil analisis untuk seluruh sampel tidak memberi bukti empiris bahwa terdapat hubungan antara utang dan kualitas laba. Seluruh sampel yang meliputi sampel utang tinggi dan utang rendah yang mempunyai karakteristik berbeda dapat mengeliminasi hubungan utang dengan kualitas laba. Oleh sebab itu, analisis terhadap seluruh sampel dapat memberi hasil yang tidak konsisten. Ketidakkonsistenan ini dapat disebabkan oleh komposisi sampel (berdasarkan utang tinggi dan utang rendah) yang digunakan dalam analisis.

Hasil analisis untuk sampel utang tinggi menunjukkan koefisien DAR adalah positif signifikan jika analisis dilakukan tanpa variabel kontrol. Setelah memasukkan variabel-variabel kontrol, tidak ditemukan hubungan antara utang dan kualitas laba. Sebagaimana disajikan pada Tabel 3, variabel yang berhubungan positif dengan kualitas laba adalah ukuran perusahaan (SIZE). Semakin besar perusahaan, semakin tinggi kualitas laba. Kemungkinan penjelasan atas hasil ini adalah bahwa perusahaan besar mendapat perhatian relatif lebih besar dari para pemangku kepentingan dibandingkan perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung melaporkan kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa jika utang rendah, maka utang mempunyai hubungan positif dengan kualitas laba. Hasil empiris ini mendukung argumen bahwa perusahaan dengan tingkat utang rendah terdorong untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang tinggi sejalan dengan peningkatan utang, dan peningkatan kualitas pelaporan

ini diharapkan dapat menurunkan biaya modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini memberi hasil empiris bahwa jika tingkat utang rendah, maka utang berhubungan positif dengan kualitas laba. Hubungan positif antara utang dan kualitas laba ini mengindikasikan bahwa manajer cenderung menggunakan kebijakan akuntansi untuk menyampaikan informasi privat tentang prospek perusahaan di masa depan untuk menurunkan biaya pendanaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tanpa menggunakan variabel kontrol, utang berhubungan negatif dengan kualitas laba untuk tingkat utang tinggi. Dengan menggunakan variabel kontrol, penelitian ini tidak menemukan bahwa jika tingkat utang tinggi, utang berhubungan negatif dengan kualitas laba. Hasil studi ini menunjukkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dan kualitas laba untuk tingkat utang tinggi.

Saran

Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk menguji validitas eksternal dan/atau pengembangan hasil studi ini. Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai variasi pengukuran kualitas laba, pengukuran penggunaan utang, dan pengukuran variabel-variabel kontrol sesuai tujuan spesifik yang ingin dicapai. Ketersediaan sampel perlu mendapat perhatian dalam penelitian lanjutan tersebut.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sebelas Maret yang telah memberi bantuan dana untuk penelitian ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attar, Ali, Simon Hussain dan Ling Y. Zuo. 2008. "Earnings Quality, Bankruptcy Risk and Future Cash Flows." *Accounting and Business Research* 38(1): 5-9,16-17,19-20.
- Barton, Jan dan Gregory Waymire. 2004. "Investor Protection under Unregulated Financial Reporting." *Journal of Accounting and Economics* 38(1-3): 65-116.
- Beatty, Anne dan Joseph Weber. 2003. "The Effects of Debt Contracting on Voluntary Accounting Method Changes." *The Accounting Review* 78(1):119-142.
- Beneish, Messod D. dan Eric Press. 1993. "Costs of Technical Violation of Accounting-Based Debt Covenants." *The Accounting Review* 68(2): 233-257.
- Beneish, Messod D. dan Mark E. Vargus. 2002. "Insider Trading, Earnings Quality, and Accrual Mispricing." *The Accounting Review* 77(4): 755-791.
- Bhattacharya, Nilabhra, Frank Ecker, Per M. Olsson, dan Katherine Schipper. 2012. "Direct and Mediated Associations among Earnings Quality, Information Asymmetry, and the Cost of Equity." *The Accounting Review* 87(2): 449-482.
- Billett, Matthew T., Tao-Hsien Dolly King, dan David C. Mauer. 2007. "Growth Opportunities and the Choice of Leverage, Debt Maturity, and Covenants." *Journal of Finance* 62(2): 697-730.
- Boulton, Thomas J., Scott B. Smart, dan Chad J. Zutter. 2011. "Earnings Quality and International IPO Underpricing." *The Accounting Review* 86(2): 483-505.
- Cahan, Steven F., David Emanuel, dan Jerry Sun. 2009. "The Effect of Earnings Quality and Country-Level Institutions on the Value Relevance of Earnings." *Review of Quantitative Finance and Accounting* 33(4): 371-391.
- Chen, Kevin C. W. dan K. C. John Wei. 1993. "Creditors' Decisions to Waive Violations of Accounting-Based Debt Covenants." *The Accounting Review* 68(2): 218-232.
- Dechow, Patricia M., Scott A. Richardson, dan Irem Tuna. 2003. "Why are Earnings Kinky? an Examination of the Earnings Management Explanation." *Review of Accounting Studies* 8(2-3): 355-384.
- DeFond, Mark L. dan James Jiambalvo. 1994. "Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals." *Journal of Accounting and Economics* 17(1/2): 145-176.
- Dichev, Ilija D. dan Douglas J. Skinner. 2002. "Large Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis." *Journal of Accounting Research* 40(4): 1091-123.
- Feltham, Glenn, Sean Robb, dan Ping Zhang. 2007. "Precision in Accounting Information, Financial Leverage and the Value of Equity." *Journal of Business Finance & Accounting* 34(7&8): 1099-122.
- Ghosh, Alope (Al) dan Doocheol Moon. 2010. "Corporate Debt Financing and Earnings Quality". *Journal of Business Finance & Accounting* 37(5/6): 538-559.
- Givoly, Dan, Carla K. Hayn, dan Sharon P. Katz. 2010. "Does Public Ownership of Equity Improve Earnings Quality?" *The Accounting Review* 85(1): 195-225.
- Kim, Dongcheol and Yaxuan Qi. 2010. "Accruals Quality, Stock Returns, and Macroeconomic Conditions." *The Accounting Review* 85(3):937-978.
- Lee, Chi-Wen Jevons, Laura Yue Li, dan Heng Yue. 2006. "Performance, Growth, and Earnings Management." *Review of Accounting Studies* 11(2/3): 305-344.

- Lim, Chee Y., Tiong Y. Thong, dan David K. Ding. 2008. "Firm Diversification and Earnings Management: Evidence from Seasoned Equity Offerings." *Review of Quantitative Finance and Accounting* 30(1): 69-92.
- Moir, Lance and Sudi Sudarsanam. 2007. "Determinants of Financial Covenants and Pricing of Debt in Private Debt Contracts: The UK Evidence." *Accounting and Business Research* 37(2):151-166.
- Peasnell, K. V., P. F. Pope, dan S. Young. 2000. "Accrual Management to Meet Earnings Targets: UK Evidence Pre- and Post-Cadbury'." *British Accounting Review* 32(4): 415-445.
- Peasnell, K. V., P. F. Pope, dan S. Young. 2005. "Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?" *Journal of Business Finance & Accounting* 32(7/8): 1311-1346.
- Prawitt, Douglas F., Jason L. Smith, dan David A. Wood. 2009. "Internal Audit Quality and Earnings Management." *The Accounting Review* 84(4): 1255-1280.
- Sanjaya, I. Putu Sugiarta. 2011. "The Influence of Ultimate Ownership on Earnings Management: Evidence from Indonesia." *Global Journal of Business Research (GJBR)* 5(5): 61-69.
- Tong, Yen H. dan Bin Miao. 2011. "Are Dividends Associated with the Quality of Earnings?" *Accounting Horizons* 25(1): 183-205.
- Valipour, Hashem dan Mehdi Moradbeygi. 2011. "Corporate Debt Financing and Earnings Quality". *Journal of Applied Finance & Banking* 1(3): 139-157.
- Zang, Amy Y. 2012. "Evidence on the Trade-Off between Real Activities Manipulation and Accrual-Based Earnings Management." *The Accounting Review* 87(2): 675-703.

REFORMASI PAJAK DALAM KERANGKA REFORMASI EKONOMI-POLITIK DI INDONESIA

Bambang Sudibyo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Jalan Humaniora Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 548510 – 548515, Fax. +62 274 563212
E-mail: bsudibyo@gmail.com

ABSTRACT

The tax reform proposed by this writer in this article is an integral part of a political and legal reform badly needed by Indonesia in order for this country to be able to benefit the golden momentum of the shift in the geo economic center of gravity from the developed countries concentrated in the West to the emerging countries concentrated in the East. The tax reform should include at least 1) strong enforcement of the tax regime disciplines; 2) improvement of tax governance; 3) tax bureaucracy reform; 4) simplification of tax regulations; and 5) rearrangement of the tax regulation to improve its investment friendliness. The reform is expected to increase tax ratio from 12% of GDP to 17.5% of GDP within 8 years.

Keywords: tax reform, tax regime, politiceconomic patologi, tax ratio

JEL Classification: H21, H23

PENDAHULUAN

Pada tahun 2006 kantor akuntan Price Waterhouse Coopers (2006) membuat sebuah prediksi pergeseran dominasi ekonomi global yang mengejutkan. Dalam kurun 2005-2050, di antara 17 negara anggota terbesar dari G20, diprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi

yang tinggi hanya akan terjadi di perekonomian lagi muncul sebagaimana tampak pada Tabel 1. Pertumbuhan PDB dan PDB per kapita yang tinggi, di antara negaranegara G20, diprediksikan akan terjadi dan jika diurut menurut besarnya pertumbuhan adalah India, Indonesia, Cina, Turki, Brazilia, Mexico, Rusia, dan Korea Selatan. Pertumbuhan PDB di negaranegara maju yang terkonsentrasi di Barat diprediksikan semuanya akan rendah.

Penyebab utama rendahnya pertumbuhan PDB di negaranegara maju tersebut, menurut Price Waterhouse Coopers adalah struktur penduduknya yang semakin didominasi oleh penduduk yang umurnya tua dan tidak lagi produktif. Di samping itu, pada hemat penulis, faktor lain yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di negaranegara maju adalah faktor sudah jenuhnya perekonomian. Pada negaranegara maju ruang untuk penciptaan nilai tambah yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi positif memang sangat sempit, karena sudah sangat tingginya tingkat sofistikasi kehidupan, karena kehidupan tersebut sarat dengan teknologi dan teknokrasi.

Pada negaranegara lagi muncul situasinya justru sebaliknya. India dan Indonesia, pada kurun 2005-2050 justru merupakan era emas dari perspektif struktur penduduk yang didominasi oleh usia produktif. Di samping itu, di negaranegara ini ruang untuk tumbuh masih sangat lebar, karena masih rendahnya tingkat aplikasi tekologi dan teknokrasi untuk memperbaiki sofistikasi kehidupan. Berdasarkan proyeksi

Tabel 1
Proyeksi Rerata Pertumbuhan Kurun 2005-2050

Negara	Pertumbuhan PDB Dalam USD (%)	Pertumbuhan PDB Dalam USD PPP (%)	Pertumbuhan Penduduk (%)	Pertumbuhan PDB Per Kapita Dalam USD PPP (%)
India	7,6	5,2	0,8	4,3
Indonesia	7,3	4,8	0,6	4,2
Cina	6,3	3,9	0,1	3,8
Turki	5,6	4,2	0,7	3,4
Brazilia	5,4	3,9	0,7	3,2
Mexico	4,8	3,9	0,6	3,3
Rusia	4,6	2,7	-0,5	3,3
Korea Selatan	3,3	2,4	-0,1	2,6
Canada	2,6	2,6	0,6	1,9
Australia	2,6	2,7	0,7	2,0
AS	2,4	2,4	0,6	1,8
Spanyol	2,3	2,2	0,0	2,2
Inggris	1,9	2,2	0,3	2,0
Perancis	1,9	2,2	0,1	2,1
Italia	1,5	1,6	-0,3	1,9
Jerman	1,5	1,6	-0,1	1,9
Jepang	1,2	1,6	-0,3	1,9

Sumber: Price Waterhouse Coopers, “*The World in 2050*,” March 2006, diolah.

pertumbuhan PDB tersebut, Price Waterhouse Coopers kemudian membuat proyeksi pergeseran urutan besarnya PDB, dalam USD PPP, relatif terhadap PDB Amerika Serikat yang diberi nilai tetap 100. Proyeksinya tampak seperti pada Tabel 2.

Berdasarkan proyeksi tersebut, penulis membuat proyeksi mutasi peringkat PDB relatif seperti pada Tabel 3. Tampak pada Tabel 3, negaranegara yang peringkat PDB relatifnya meningkat semuanya adalah negara berekonomi sedang muncul, sementara negara yang peringkat PDB relatifnya merosot semuanya adalah negara berekonomi maju. Tabel 3 menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami loncatan peringkat PDB relatif yang paling tinggi, yaitu naik 9 peringkat. Prediksi pergeseran dominasi ekonomi global yang lebih ekstrim menjagoi perekonomian lagi muncul, bahkan juga perekonomian berkembang, dibikin oleh Citibank. Prediksi Citibank tidak membatasi pada negaranegara anggota G20 saja, melainkan mencakup

semua negara di dunia. Citibank memperkenalkan suatu konsep baru yang disebut “*global growth generators (3G)*,” yaitu negaranegara yang didasarkan pada berbagai pertimbangan seperti struktur dan pertumbuhan penduduk, pendidikan, infrastruktur, keamanan sistem politik, tingkat kemajuan ekonomi dan lain sebagainya diprediksikan akan menjadi generator pertumbuhan ekonomi global untuk kurun waktu 20102050.

Negara yang diramalkan menjadi generator pertumbuhan ekonomi global pada periode 20102050 itu ada 11 negara, yaitu, sesuai urutan besarnya indeks 3G, Vietnam, Cina, India, Indonesia, Mongolia, Philipina, Irak, Bangladesh, Mesir, Srilangka, dan Nigeria. Sebelas negara tersebut memiliki angka Indeks 3G tertinggi di dunia. Berdasarkan angka tersebut dan faktorfaktor lain, Citibank kemudian membikin proyeksi pertumbuhan ekonomi periode 20102050 untuk negaranegara tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Angka

Tabel 2
Pergeseran PDB Relatif 2005-2050 (AS=100)

PDB (USD PPP) Relatif 2005			PDB (USD PPP) Relatif 2050		
Negara	Peringkat	PDB Relatif	Negara	Peringkat	PDB Relatif
AS	1	100	Cina	1	143
Cina	2	76	AS	2	100
Jepang	3	32	India	2	100
India	4	30	Brazilia	4	25
Jerman	5	20	Jepang	5	23
Inggris	6	16	Indonesia	6	19
Perancis	7	15	Mexico	7	17
Italia	8	14	Jerman	8	15
Brazilia	9	13	Inggris	8	15
Rusia	10	12	Rusia	19	14
Spanyol	11	9	Perancis	11	13
Canada	11	9	Italia	12	10
Korea selatan	11	9	Turki	12	10
Mexico	11	9	Canada	14	9
Indonesia	15	7	Spanyol	15	8
Australia	16	5	Korea Selatan	15	8
Turki	16	5	Australia	17	6

Sumber: Price Waterhouse Coppers, "The World in 2050," March 2006, diolah.

Tabel 3
Proyeksi Mutasi Peringkat PDB Relatif

Negara Yang Peringkat PDB Relatifnya Naik/Tetap		Negara Yang Peringkat PDB Relatifnya Turun	
Negara	Kenaikan Peringkat	Negara	Kemerosotan Peringkat
Indonesia	9 tingkat	Korea Selatan	5 tingkat
Mexico	7 tingkat	Perancis, Italia, Spanyol	4 tingkat
Brazilia	5 tingkat		
Turki	4 tingkat		
India	2 tingkat	Jerman, Inggris, Canada	3 tingkat
Cina	1 tingkat		
Rusia	0 tingkat	Jepang, AS	2 tingkat
		Australia	1 tingkat

Sumber: Tabel 1 dan Tabel 2, diolah.

pertumbuhan PDB pada Tabel 4 tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan indeks 3Gnya, karena pertumbuhan ekonomi akan mudah untuk didongkrak tinggi pada negaranegara yang pendapatan per kapitanya masih rendah. Ketika pendapatan per kapita meningkat, percepatan pertumbuhan ekonomi akan cenderung menurun seiring dengan berjalannya waktu. Itulah sebabnya mengapa negaranegara yang pada saat ini PDB per kapitanya masih rendah, seperti Nige-

ria, India, Vietnam, dan Bangladesh diproyeksikan memiliki rerata pertumbuhan PDB jangka panjang yang relatif lebih tinggi.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan PDB seperti pada Tabel 4 yang diterapkan pada semua negara, Citibank kemudian membikin proyeksi pergeseran 10 besar PDB untuk periode 2010-2050 seperti tampak pada Tabel 5, yaitu yang akan menjadi primadona ekonomi kurun 2010-2050, adalah bukan hanya Brazilia, Rusia,

Tabel 4
Global Growth Generators (3G) 2010-2050

No	Negara	Indeks 3G	PDB Per Kapita 2010 (USD PPP)	Proyeksi Pertumbuhan PDB 2010-2050 (%)	Keterangan
1	Nigeria	0,25	2.335	6,9	
2	India	0,71	3.298	6,4	anggota G20
3	Vietnam	0,86	3.108	6,4	
4	Mongolia	0,63	3.764	6,3	
5	Bangladesh	0,39	1.735	6,3	
6	Irak	0,58	3.538	6,1	
7	Indonesia	0,70	4.363	5,6	anggota G20
8	Philipina	0,60	3.684	5,5	
9	Srilangka	0,33	4.988	5,5	
10	Cina	0,81	7.430	5,0	anggota G20
11	Mesir	0,37	5.878	5,0	

Sumber: *Global Growth Generators: Moving Beyond Emerging Markets And BRI*, 27 February 2011, diolah.

Tabel 5
Proyeksi Pergeseran 10 Besar PDB 2010-2050

Peringkat	2010	2015	2020	2030	2040	2050
1	AS	AS	Cina	Cina	Cina	India
2	Cina	Cina	AS	AS	India	Cina
3	Jepang	India	India	India	AS	AS
4	India	Jepang	Jepang	Jepang	Indonesia	Indonesia
5	Jerman	Jerman	Jerman	Brazilia	Brazilia	Brazilia
6	Rusia	Rusia	Brazilia	Rusia	Rusia	Nigeria
7	Brazilia	Brazilia	Rusia	Indonesia	Jepang	Rusia
8	Inggris	Inggris	Inggris	Jerman	Nigeria	Mexico
9	Perancis	Perancis	Perancis	Inggris	Jerman	Jepang
10	Italia	Italia	Korsel	Mexico	Mexico	Mesir

Sumber: *Global Growth Generators: Moving Beyond Emerging Markets And BRIC*, 27 Februari 2011, diolah.

India, dan Cina (BRIC), melainkan Brazilia, Rusia, India, Cina, Indonesia, Mexico, Mesir, dan Nigeria (BRICIMEN)¹.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Prediksi Price Waterhouse Coopers dan Citibank yang telah dipaparkan menunjukkan persepsi tentang sedang bergesernya pusat gravitasi geoekonomi dari negaranegara maju yang terkonsentrasi di Barat ke negaranegara sedang muncul yang terkonsentrasi di Timur. Indonesia diperkirakan menjadi bagian dari arus utama pergeseran tersebut, dan karenanya memiliki prospek ekonomi yang sangat bagus pada paruh pertama abad 21. Prospek yang amat bagus akan menjadi kenyataan tergantung pada bangsa Indonesia sendiri, karena meskipun prospek ekonominya bagus, pada saat ini Indonesia masih tersandera oleh lima patologi ekonomipolitik yang akut dan kronis. Prospek yang amat bagus itu akan menjadi kenyataan jika lima patologi tersebut dapat diatasi.

Sistem politik demokratis yang belum mapan, labil, dan sarat ketidakjujuran. Untuk negara berkategori lagi muncul dan penduduk mayoritasnya muslim, Indonesia bersama Turki adalah yang termaju dalam berdemokrasi. Namun demikian, sistem politik demokratis di Indonesia belum menjadi lingkungan yang kondusif bagi sehat dan majunya perekonomian (Boediono, 2006). Sistem tersebut masih belum mapan, labil, dan sarat ketidakjujuran sehingga resiko politik bagi investasi menjadi tinggi. Implikasi lebih lanjutnya adalah *spread* perbankan menjadi tinggi pula dan karenanya biaya dana untuk berinvestasi di sektor riil juga tinggi. Dengan resiko politik yang tinggi disertai biaya dana yang tinggi pula, sistem politik demokratis di Indonesia, dengan demikian, masih belum ramah investasi.

Demokrasi di Indonesia masih belum mapan, masih terus mencari bentuk, dan karenanya demokrasi yang seperti itu menjadi sumber dari labilnya kehidupan politik. Kelabilan itu diperparah oleh hilangnya pusat gravitasi sistem sejak Indonesia mulai melakukan reformasi pada tahun 1998. Pusat gravitasi sistem politik

yang semula berada pada Presiden, setelah reformasi menjadi tidak jelas lokusnya, dan sejak saat itu *gonjanganjing* politik tidak pernah berhenti. Secara normatif, pada tatanan politik demokratis yang menganut sistem presidensiil, meskipun kekuasaan negara dibagi secaraimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tercipta *check and balance*, seperti halnya yang diterapkan di Amerika Serikat, pusat gravitasi sistem sengaja diletakkan pada presiden agar sistem memiliki angkor yang jelas dan menjadi stabil. Reformasi di Indonesia telah membagi kekuasaan negara itu secaraimbang kepada ketiga cabang kekuasaan negara tersebut, tetapi telah dengan ceroboh mencabut pusat gravitasi sistem itu dari Presiden. Akibatnya, kehidupan politik menjadi kehilangan angkor, dan karena itu *gonjanganjing* politik terus terjadi, tidak memberi kesempatan kepada perekonomian untuk mengaktualisasikan potensi tumbuhnya yang menurut penilaian Price Waterhouse Coopers dan Citibank sebetulnya sangat bagus.

Kondisi seperti itu diperparah oleh belum dewasa dan matangnya para individu pemeran ketiga cabang kekuasaan negara tersebut pada berbagai tingkatan. Pada persepsi publik ketiganya terlibat pada perburuan rente berdasar berat, sebagaimana terbukti dari indeks persepsi korupsi yang hanya 2,8 (Transparency International, 2011). Karena perburuan rente tersebut, interaksi antara ketiga cabang kekuasaan negara menjadi defensif, kaku, tidak terbuka, dan sarat ketidakjujuran, tetapi sekaligus juga saling melindungi. Mekanisme *self correction* yang merupakan keunggulan dari sistem politik demokratis, oleh karenanya, menjadi macet.

Supremasi hukum lemah karena sejak merdeka pada tahun 1945 Indonesia memang belum pernah memiliki rezim hukum yang supremasinya kuat. Kondisi seperti itu sejak era Reformasi diperparah oleh patologi pertama yang telah diutarakan sebelumnya karena hukum adalah produk dari sistem politik. Rezim politik yang belum mapan, masih labil, dan sarat ketidakjujuran mustahil bisa menghasilkan produkproduk hukum, baik tata negara, pidana, maupun perdata yang bagus. Rezim hukum dewasa ini belum merupakan buah karya para

¹ Penggunaan singkatan BRICIMEN adalah dari penulis, untuk *Brazil, Russia, India, China, Indonesia, Mexico, Egypt, and Nigeria*.

politisi negarawan yang berintegritas dan bernasionalisme tinggi. Oleh karena itu, rezim hukum menjadi kurang berwibawa dan lemah. Lingkungan hukum menyimpan banyak sekali ketidakpastian dan karenanya menjadi tidak ramah investasi. Rezim hukum yang seperti itu menjadi lingkungan yang tidak kondusif bagi perekonomian untuk mengaktualisasikan potensi tumbuh yang sebenarnya.

Rendahnya disiplin hukum perpajakan karena rezim perpajakan adalah bagian dari rezim politik dan rezim hukum. Ketika rezim politik dan rezim hukum secara bersamaan lemah, maka rezim perpajakan otomatis ikut lemah, dan karenanya disiplin perpajakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat menjadi rendah. Akibatnya penerimaan negara dari pajak menjadi rendah sebagaimana tercermin dari rasio pajak terhadap PDB yang sejak 1999/2000 hingga sekarang tidak pernah beringsut dari angka sekitar 12% dari PDB. Kemampuan fiskal negara menjadi lemah, dan negara menjadi kurang mampu menyelesaikan banyak persoalan yang memerlukan dukungan APBN dan APBD.

Rezim perpajakan yang seharusnya menjadi pilar demokrasi telah gagal melaksanakan fungsi kepiilarannya itu. Pada sistem politik demokratis, wajib pajak seharusnya memiliki posisi tawar moral yang tinggi di hadapan negara karena ketergantungan finansial negara kepada mereka. Wajib pajak yang baik seharusnya memiliki wibawa moral yang tinggi dalam mengontrol berfungsinya lembaga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketika disiplin perpajakan rendah seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini, dan karenanya wibawa moral wajib pajak juga rendah, maka tidak aneh jika kontrol sosial yang dilakukan oleh mereka kurang digubris oleh pemangku ketiga kekuasaan negara tersebut.

Infrastruktur yang jumlahnya tidak memadai dan kondisinya buruk. Kondisi infrastruktur yang seperti itu telah menjadi leher botol dari ketersediaan energi dan kelancaran arus manusia, barang, jasa, dan informasi dalam perekonomian. Dalam negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina, pembangunan infrastruktur menjadi tantangan yang sangat penting untuk segera diatasi agar statusnya bisa naik dari negara lagi tumbuh menjadi negara maju. Sebelum masalah infrastruktur ini dapat diatasi, seperti halnya di inflasi di Filipina, inflasi di Indonesia akan

senantiasa persisten signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi negaranegara lain di kawasan regional ASEAN dan Asia Timur. Dengan persisten tingginya inflasi, biaya dana bagi Investasi di sektor riil menjadi amat sulit untuk bisa ditekan oleh Bank Indonesia. Infrastruktur di Indonesia, dengan demikian, menjadi tidak ramah investasi.

Belum berhasilnya Indonesia memiliki infrastruktur modern yang menjamin efisiensi perekonomian adalah akibat dari lemahnya rezim perpajakan yang merupakan patologi yang ketiga. Untuk Indonesia, baru sedikit sekali infrastruktur yang bisa dibangun dengan skema *publicprivate partnership (PPP)*. Sebagian besar infrastruktur adalah yang memerlukan dukungan penuh dari APBN dan APBD. Oleh karena itu, ke depan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur menjadi sangat tergantung pada pembenahan rezim perpajakan yang menentukan kemampuan fiskal negara.

Kerusakan lingkungan stadium lanjut, sehingga ketika musim hujan bencana banjir dan tanah longsor terjadi di manamana. Bencana tersebut di banyak tempat telah menyebabkan gagal panen. Kondisi gagal panen itu diperparah oleh perubahan iklim yang penyebabnya juga kerusakan lingkungan alam. Kegagalan panen ini menjadi sumber inflasi mengingat tingginya bobot harga pangan dalam pembentukan indeks inflasi. Berbagai bencana tersebut di banyak tempat juga menjadi sumber kerusakan infrastruktur. Di samping itu, tingginya tingkat polusi air, udara, dan tanah di Jawa dan kawasan perkotaan di luar Jawa yang padat penduduk menjadikan daya dukung kawasankawasan tersebut untuk kehidupan manusia semakin kritis.

Seperti halnya infrastruktur, pengatasan masalah lingkungan ini sangat tergantung pada kemampuan APBN dan APBD. Oleh karena itu keberhasilan pembenahan rezim perpajakan menjadi sangat penting bagi bisa teratasinya masalah infrastruktur dan lingkungan. Hubungan antara kelima patologi tersebut diilustrasikan pada Gambar 1. Rezim politik yang lemah telah menyebabkan lemahnya rezim hukum. Kelemahan dua rezim pertama ini secara bersamaan menyebabkan lemahnya rezim perpajakan. Kelemahan tiga rezim ini merupakan permasalahan hukum, karena permasalahan rezim politik merupakan domain dari hukum tata negara, permasalahan rezim hukum merupakan domain dari

hukum tata negara, pidana , dan perdata, dan permasalahan rezim perpajakan menjadi domain dari hukum tata negara. Pengawasan dari tiga patologi yang pertama ini, dengan demikian, menjadi sangat penting mengingat pengawasan dua patologi sisanya sangat tergantung pada keberhasilan dalam melakukan reformasi rezim perpajakan yang bertujuan untuk memperbaiki kemampuan fiskal negara.

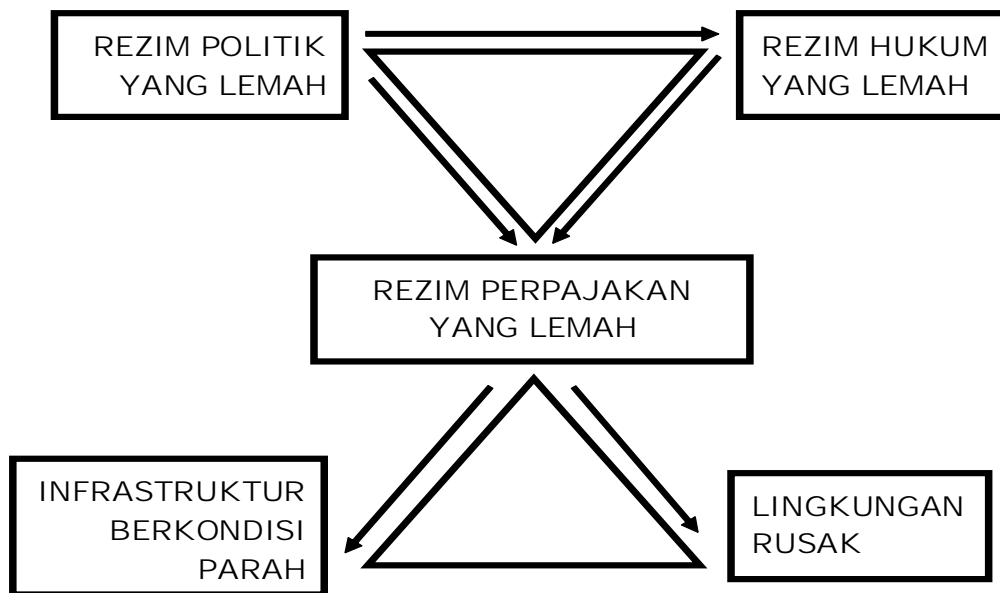
Dengan demikian jelas kiranya sekarang bahwa dari perspektif ekonomipolitik, reformasi pajak memang sangat relevan dan penting. Reformasi itu harus dilakukan sebagai bagian integral dari reformasi sistem hukum yang menyeluruh dan komprehensif, yang mencakup di dalamnya reformasi rezim perpajakan, rezim kepolisian, rezim kejaksaan, rezim kehakiman, dan rezim peradvokatan.

HASIL PENELITIAN

Rezim perpajakan dewasa ini juga didera oleh 5 patologi akut dan kronis yang membuatnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Kelemahan disiplin hukum perpajakan merupakan implikasi logis dari patologi ekonomi politik

yang pertama dan kedua yang telah dipaparkan. Sistem politik demokratis yang masih belum mapan, masih labil, dan sarat ketidakjujuran tidak memberikan basis politik yang baik, kokoh dan berkeadilan bagi sistem hukum yang supremasinya kuat. Padahal rezim perpajakan adalah bagian dari rezim hukum. Ketika hukum lemah supremasinya, maka otomatis disiplin perpajakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga menjadi lemah. Implikasi dari lemahnya disiplin perpajakan itu, antara lain tingginya penghindaran dan/ atau pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, tingginya perburuan rente oleh fiskus, banyaknya wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maraknya informalitas dalam berbisnis yang tidak taat pajak, tetapi konon dipelihara serta dilindungi oleh oknum birokrasi karena dijadikan obyek perburuan rente, rendahnya tingkat kesadaran pajak warganegara sehingga banyak pelanggaran pajak dilakukan oleh wajib pajak, bahkan kadang yang bersangkutan adalah tokoh masyarakat, tanpa disadarinya bahwa perbuatannya itu merupakan pelanggaran hukum pajak, dan tingginya restitusi PPN yang konon berbau penghindaran pajak.

Tata pamong yang ada memberikan



Gambar 1
Patologi Akut dan Kronis Ekonomi-Politik Indonesia

kewenangan rangkap kepada fiskus sehingga rentan menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada perburuan rente. Fiskus, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dewasa ini merangkap dua kewenangan sekaligus, yaitu kewenangan mempersiapkan regulasi pajak (kewenangan legislatif) dan kewenangan mengeksekusi pemungutan pajak (kewenangan eksekutif). Dalam keadaan seperti itu, regulasi pajak berpotensi memberi peluang bagi perburuan rente oleh fiskus.²

Birokrasi dan regulasi pajak terlalu kompleks, rumit, dan berteletele merupakan implikasi dari tata pamong yang sarat konflik kepentingan sebagaimana diutarakan di muka. Birokrasi dan regulasi yang kompleks, rumit, dan berteletele konon memang merupakan buah dari kesengajaan untuk menciptakan asimetri informasi antara fiskus dan wajib pajak. Asimetri informasi terjadi ketika wajib pajak kesulitan untuk memahami dan untuk secara teknis menerapkan

regulasi pajak, yang kemudian dalam keadaan seperti itu wajib pajak menjadi rentan untuk dijadikan obyek perburuan rente oleh fiskus.

Rezim perpajakan tidak ramah investasi. Ketidakramahan ini wujudnya bermacam-macam, di antaranya asimetri kedudukan hukum antara fiskus dan wajib pajak di hadapan pengadilan pajak, tingginya tingkat ketidakpastian hukum pajak, tarif pajak yang dirasakan terlalu tinggi, pemajakan yang berganda, pola hubungan subyekobyek antara fiskus dan wajib pajak menyebabkan wajib pajak rentan dijadikan obyek perburuan rente oleh fiskus, rasio Pajak terlalu rendah. Sebagai implikasi dari patologi nomor 1, 2, 3, dan 4, rasio pajak terhadap PDB menjadi terlalu rendah. Perhatikan Tabel 6 yang menunjukkan rasio pajak di negaranegara maju, yang pada umumnya tinggi, dan negaranegara lagi muncul. Tampak pada Tabel 6, rasio pajak Indonesia untuk tahun 2011, sebesar 12% dari PDB, merupakan rasio pajak terendah ketiga dari 16

Tabel 6
Rasio Pajak Terhadap PDB 2011

Negeranegara maju		Negeranegara lagi muncul (<i>emerging</i>)	
Negara	Rasio pajak (%)	Negara	Rasio pajak (%)
Denmark	49,0	Brazilia	38,8
Swedia	47,9	Rusia	36,9
Belgia	46,8	Turki	32,5
Perancis	46,1	Afrika Selatan	26,9
Norwegia	43,6	Korea Selatan	26,8
Austria	43,4	India	17,7
Italia	42,6	Cina	17,0
Jerman	40,6	Thailand	17,0
Belanda	39,8	Mesir	15,8
Inggris	39,0	Malaysia	15,5
Spanyol	37,3	Filipina	14,4
Yunani	33,5	Singapura	14,2
Kanada	32,2	Taiwan	12,4
Australia	30,8	Indonesia	12,0
Jepang	27,4	Meksiko	9,7
Amerika Serikat	26,9	Arab Saudi	5,3

Sumber: ax rates around the world 10/20/2011, last price update. www.worldwidetax.com.

² Bahkan perangkapan kewenangan yudikatif secara tidak langsung juga bisa terjadi jika mantan pejabat pajak dan/atau bea dan cukai masih menjadi hakim di pengadilan pajak.

negara lagi muncul yang dijadikan sampel dalam Tabel 6. Rasio tersebut terlalu rendah mengingat banyak sekali permasalahan bangsa dan negara yang solusinya memerlukan dukungan finansial dari APBN dan APBD.

Dengan memperhatikan rasio pajak di negaranegara lagi muncul, acuan normatif untuk rasio pajak Indonesia pada tahun 2011 yang ideal adalah sekitar 17,5% dari PDB. PDB Indonesia tahun 2011 adalah sekitar Rp7.000 triliun,. Dengan demikian, potensi pajak yang tidak terkoleksi pada tahun 2011 mencapai sekitar Rp385 triliun, (5,5% dari Rp7.000 triliun,). Jika potensi pajak ini bisa terkoleksi dengan baik, tentu saja ruang fiskal yang dimiliki Pemerintah akan menjadi jauh lebih luas, dan karenanya lebih banyak masalah yang bisa diatasinya. Reformasi pajak yang resposif terhadap patologi akut dan kronis tersebut, dengan demikian, meliputi 1) penegakan disiplin hukum perpajakan, 2) penataan ulang tata pamong perpajakan, 3) reformasi birokrasi pajak, 4) penyederhanaan regulasi pajak, 5) penataan kembali rezim perpajakan agar menjadi lebih ramah investasi, dan 6) peningkatan rasio pajak hingga mencapai sekitar 17,5% dari PDB.

Penegakan disiplin hukum perpajakan hendaknya merupakan bagian integral dari penegakan disiplin hukum secara keseluruhan. Pembinaan bukan hanya rezim hukum perpajakan, melainkan juga empat rezim hukum lainnya, yaitu rezim kepolisian, rezim kejaksaan, rezim kehakiman, dan rezim peradokteran. Kasus manipulasi pajak oleh Gayus Tambunan membuktikan hal itu. Terbukti dalam kasus ini bahwa manipulasi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan kawankawannya tidak hanya melibatkan oknum birokrat pajak saja, tetapi juga oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, dan oknum advokat.

Penegakan disiplin hukum pada lima rezim hukum itu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan tuntas mencakup individunya, lembaganya, budaya hukumnya, dan sistem kerjanya. Pangkal dari reformasi yang menyangkut individu adalah kepemimpinan. Para pemimpin pada kelima rezim hukum tersebut harus memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan penegakan disiplin hukum, menjadi teladan yang baik, serta memiliki visi, misi, dan program penegakan disiplin hukum yang baik dan jelas. Kompetensi dan integritas hukum hendaknya dijadikan kriteria utama dalam rekrutmen aparat baru, pembinaan karier, promosi

jabatan, dan pemberian penghargaan serta hukuman. Budaya hukum yang baik secara evolusioner ditumbuhkan dengan ketekunan dan kesabaran.

Tujuan utama dari penataan ulang tata pamong atau *governance* adalah untuk meminimumkan, kalau bisa menghilangkan, konflik kepentingan. Untuk itu yang terpenting adalah adanya pemisahan kewenangan meregulasi pajak, mengeksekusi pemungutan pajak, dan melaksanakan peradilan pajak. Sebetulnya pembenahan parsial terhadap tata pamong ini sudah dilakukan selama zaman reformasi ini dengan dikeluarkannya kewenangan peradilan pajak dari kewenangan Menteri Keuangan dan kemudian kewenangan itu dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak yang berada di bawah binaan Mahkamah Agung. Namun demikian, sampai dengan saat ini kewenangan meregulasi pajak dan kewenangan mengeksekusi pemungutan pajak masih dirangkap oleh Menteri Keuangan.

Oleh karena itu, penulis mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikeluarkan dari Kementerian Keuangan, dengan membentuk suatu badan baru pengganti kedua direktorat jenderal itu yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Kewenangan badan baru ini dibatasi hanya untuk mengeksekusi pemungutan pajak, bea, dan cukai. Badan ini tidak memiliki kewenangan untuk menyiapkan regulasi pajak. Personalia dan bekas personalia dari badan ini juga tidak boleh terlibat dalam peradilan pajak.

Kewenangan untuk meregulasi pajak dijalankan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menjalankan kewenangan tersebut dibantu oleh Badan Analisis Kebijakan Fiskal. Dalam menyusun undang-undang di bidang pajak bersama DPR, Menteri Keuangan tidak dibantu dan/atau didampingi oleh Kepala Badan baru. Dengan dipisahkannya kewenangan meregulasi pajak dan kewenangan memungut pajak itu diharapkan regulasi pajak terbebas dari konflik kepentingan dan berbagai lubang dalam regulasi pajak yang memberi kesempatan perburuan rente oleh fiskus dapat segera dihilangkan.

Beberapa catatan perlu diperhatikan mengenai pengadilan pajak yang independen terhadap Pemerintah di bawah binaan Mahkamah Agung. Fiskus atau mantan fiskus tidak boleh menjadi hakim ataupun jaksa di pengadilan pajak. Pengadilan pajak mendudukan wajib pajak dan fiskus simetris di depan

hukum. Oleh karena itu, pengadilan tidak hanya mengadili keberatan yang diajukan oleh fiskus, tetapi juga keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Fiskus yang terbukti di pengadilan telah sengaja melakukan koreksi pajak atau penetapan pajak tidak sesuai peraturan perundangundangan bisa dikenai sanksi pidana yang cukup berat. Putusan pengadilan pajak menjadi yurisprudensi yang dihormati oleh pengadilan pengadilan pajak berikutnya. Dengan demikian pengadilan pajak menjadi pembelajaran hukum yang terus menerus bagi hakim, jaksa, pengacara, fiskus, dan wajib pajak. Yurisprudensi, dengan demikian, ikut menciptakan kepastian hukum pajak.

Reformasi birokrasi perpajakan hendaknya dilakukan secara komprehensif, tidak terbatas hanya memperbaiki gaji aparat. Pengalaman empirik 2005/2011 menunjukkan bahwa meskipun gaji di Kementerian Keuangan sudah dinaikkan sangat signifikan, ternyata korupsi oleh aparat pajak yang bersekala besar masih saja terjadi sebagaimana terungkap melalui skandal Gayus Tambunan dan lainlainnya. Kasus ini mengungkapkan kepada publik bahwa integritas aparat secara umum masih rendah. Oleh karena itu, yang paling penting dari reformasi birokrasi perpajakan ini adalah reformasi aparatnya. Otoritas pajak, bea, dan cukai perlu segera diisi oleh aparat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas. Reformasi aparat perlu dilakukan dengan cara drastis yang berdaya kejut agar mentalitas aparat betulbetul berubah. Kerangka waktu reformasi juga tidak boleh terlalu lama. Dalam waktu tiga tahun reformasi aparat harus sudah dapat diselesaikan.

Dengan dibatasinya kewenangan badan baru pemegang otoritas pajak, bea, dan cukai yang hanya terbatas pada pemungutan pajak saja, maka badan baru ini jelas akan kelebihan personalia. Oleh karena itu, *right sizing* atau *down sizing* perlu dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Jika badan baru itu dibentuk maka sekitar 65% dari aparat pajak yang sekarang berjumlah 33.000an orang, belum termasuk aparat bea dan cukai, maka perlu digolden shake hand dalam waktu tiga tahun. Jika rata-rata golden shake hand itu memakan biaya Rp1 milyar per orangnya, maka diperlukan dana Rp21,45 trilyun, selama 3 tahun itu. Artinya selama masa 3 tahun tersebut, rata-rata dana APBN yang harus disediakan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah Rp7,15 trilyun, per tahunnya.

Jumlah ini sebetulnya tidak banyak sepanjang reformasi bisa meningkatkan rasio pajak hingga 17,5% PDB dan pajak potensial yang selama ini tidak terkoleksi, sebesar Rp385 trilyun, tahun 2011 dapat masuk ke Kas Negara.

Rekrutmen karyawan baru hendaknya dilakukan dengan amat selektif. Kriteria seleksi yang digunakan sebaiknya tidak hanya mengedepankan kompetensi teknis perpajakan belaka. Tidak kalah pentingnya adalah kriteria integritas, profesionalitas, kompetensi hukum, dan nasionalisme. Kriteria tersebut hendaknya juga digunakan dalam pembinaan karier, promosi jabatan, dan pemberian penghargaan serta hukuman. Pengawasan terhadap pertumbuhan kekayaan aparat badan baru sangat penting. Untuk memastikan bahwa kekayaan aparat meningkat bukan karena perburuan rente, SPT pajak tahunan aparat bisa digunakan sebagai instrumen pengawasan. Setiap aparat pada badan tersebut diharuskan menyerahkan kopi SPT tahunannya ke BPKP. BPKP kemudian mengauditnya untuk memastikan bahwa kenaikan aktiva neto para aparat tersebut bukan karena perburuan rente yang menyalahgunakan kewenangannya.

Dalam reformasi birokrasi ini pengembangan sistem informasi pajak berbasis *super computer*. Hal ini diharapkan mampu memuat basis data wajib pajak yang NPWPnya berbasis pada nomor induk kependudukan (NIK) yang unik dan sekarang sedang dikembangkan melalui proyek eKTP. Terhubung secara *online* dengan wajib pajak badan dan mampu secara *online* pula memfasilitasi pelaporan pajak, mengawasi dan membina ketaatan pajak, mengawasi pemungutan pajak oleh wajib pajak badan selaku wajib pungut, dan mampu mengawasi praktek *transfer pricing*.

PEMBAHASAN

Regulasi pajak perlu disederhanakan agar mudah untuk ditaati oleh wajib pajak dan tidak memberikan ruang bagi perburuan rente oleh oknum aparat pajak. Usulan penyederhanaan regulasi tersebut meliputi lima hal, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diganti dengan Pajak Penjualan (PPn), PPNBM dintegrasikan dengan cukai, semua tarif cukai menggunakan tarif spesifik, pajak atas semua penghasilan tetap diperlakukan final atas dasar tunai, dan tarif PPh progressif yang kompleks penghitungannya diganti dengan tarif rata yang

sederhana

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diganti dengan Pajak Penjualan (PPn). Secara konsep sebetulnya sistem pajak pertambahan nilai (PPN) atau *value added tax system* memang lebih unggul daripada sistem pajak penjualan (PPn), karena sistem PPN menghilangkan pemajakan ganda yang sulit dihindari pada sistem PPn. Sistem PPN yang dipelopori oleh Perancis itu juga diadopsi oleh semakin banyak negara. Namun demikian, tidak semua negara maju mengadopsi sistem PPN. Amerika Serikat dan Singapura, misalnya, tetap mempertahankan sistem PPn hingga sekarang. Sistem yang unggul ini hanya cocok untuk diterapkan pada negara yang disiplin hukum dan disiplin perpajakannya sudah baik. Jika kedua disiplin tersebut belum baik, maka perhitungan restitusi PPN menjadi tidak kredibel, berbau penghindaran pajak, seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini di mana restitusi PPN mencapai jumlah yang besar sekali. Oleh karena itu, disarankan agar Indonesia kembali saja dulu ke sistem Pajak Penjualan (PPn) yang sederhana, tidak memerlukan restitusi, dan bersifat final. Apabila disiplin hukum dan disiplin perpajakan sudah baik dan betulbetul mapan, maka Indonesia bisa saja kembali ke sistem PPN.

PPNBM diintegrasikan dengan cukai. PPNBM sejatinya adalah memang cukai. Seperti halnya cukai, tujuan pengenaan PPNBM adalah untuk membatasi konsumsi barang mewah, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang berlebihan. Penggunaan istilah PPN untuk cukai yang dikenakan atas konsumsi barang mewah mendistorsi tujuan pengenaan cukai tersebut. Dengan pengintegrasian ini, maka restitusi PPNBM menjadi tidak ada.

Semua tarif cukai menggunakan tarif spesifik. Dengan sistem spesifik, Pemerintah tidak perlu menciptakan strata sekala usaha dan pengusaha bebas menentukan harga. Pemerintah tidak perlu melakukan pengawasan terhadap ketaatan wajib pajak dalam mengikuti stratifikasi usaha dan ketaatan dalam menetapkan harga. Dengan demikian, ruang bagi pengusaha untuk memanipulasi sekala usaha dan harga jual menjadi tidak ada lagi dan pengawasan atas pemungutan cukai juga menjadi sederhana.

Pajak atas semua penghasilan tetap diperlakukan final atas dasar tunai. Penghasilan tetap tersebut meliputi gaji, upah, honorarium, bunga, bagi hasil produk keuangan syariah, hasil reksadana,

pendapatan sewa, dan sebagainya. Undang-undang pajak penghasilan perlu menetapkan secara spesifik apa saja yang termasuk dalam penghasilan tetap tersebut. Dengan cara seperti itu, pelaporan penghasilan tetap dalam SPT menjadi sederhana, sementara pemungutan pajaknya menjadi mudah dan kolektabilitasnya diharapkan dapat lebih tinggi.

Tarif PPh progressif yang kompleks penghitungannya diganti dengan tarif rata yang sederhana dan sedang menjadi tren dunia. Tabel 7 menunjukkan semakin populernya tarif PPh rata. Tabel 7 juga menunjukkan bahwa sebelum krisis ekonomi 2008, pertumbuhan ekonomi pada negaranegara yang menerapkan sistem tarif PPh rata tersebut pada umumnya tinggi. Meskipun demikian, perlu adanya penelitian kausal empiris, sebelum seseorang menyimpulkan bawa pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut memang disebabkan oleh penerapan sistem tarif rata.

Agar rezim perpajakan menjadi lebih ramah investasi diperlukan sekurang-kurangnya empat kebijakan, yaitu pertama penegakan disiplin hukum perpajakan secara serius, konsisten, dan berkeadilan. Mengenai pentingnya hal ini di muka telah diberikan uraian yang cukup. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum perpajakan agar resiko investasi yang bersumber dari perpajakan menjadi rendah, dan kalkulasi *trade off* antara hasil investasi dengan resikonya menjadi lebih sederhana. Kedua, penyederhanaan birokrasi dan regulasi perpajakan, seperti telah diutarakan di muka. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan simetri informasi antara fiskus dan investor sebagai calon wajib pajak, dan untuk menghilangkan peluang perburuan rente oleh fiskus dan wajib pajak diperlakukan sebagai obyeknya. Ketiga, pemajakan ganda dihapuskan. Bentuk dari penghapusan pemajakan ganda tersebut meliputi 1) PPh atas deviden diadadakan, karena merupakan pemajakan berulang pada tingkat pemilik badan atas laba bersih yang sudah terkena PPh pada tingkat badan; 2) Perusahaan induk diperkenankan untuk mengkonsolidasikan SPT PPh anak-anak perusahaan yang lebih dari 50% ekuitasnya dikuasai oleh perusahaan induk; dan 3) Biaya Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian properti diadadakan.

Keempat, penggeseran andalan penerimaan

Tabel 7
Negeranegara Yang Telah Menerapkan Tarif PPh Rata

No	Negara	Tahun mulai	Tarif PPh rata 2007/2008(%)		Pertumbuhan PDB 2007 (%)
			Pribadi	Badan	
1	Hong Kong	1947	16	17,5	6,9
2	Jamaica	1986	25	33,3	2,6
3	Estonia	1994	21	0	11,4
4	Latvia	1995	25	15	11,9
5	Lituania	1996	24	15	7,5
6	Rusia	2001	13	24	6,7
7	Serbia	2003	14	10	5,9
8	Irak	2004	15	15	1,9
9	Slovakia	2004	19	19	8,3
10	Ukraina	2004	15	25	7,1
11	Georgia	2005	12	20	9,4
12	Rumania	2005	16	16	7,7
13	Turkmenistan	2005	25	25	6,0
14	Trinidad & Tobago	2006	25	25	11,7
15	Kysgistan	2006	10	10	2,7
16	Albania	2007	10	20	5,0
17	Iceland	2007	35,7	18	2,6
18	Macedonia	2007	10	10	3,10
19	Mongolia	2007	10	10,25	7,5
20	Montenegro	2007	9	9	NA
21	Kazakhstan	2007	10	15	10,6
22	Bulgaria	2008	10	10	NA
23	Czech Republic	2008	15	15	NA
24	Mauritius	2008	15	15	NA
25	Belarusia	2009	12	24	NA
26	Belize	2009	25	25	NA

Sumber: Alvin Rabushka, "Flat tax chronology," Flattaxes Blogspot.com/2010/03/flattaxchrology.html dan CIA World Factbook 2007, diolah.

pajak dari pajak langsung ke pajak tak langsung. Yang termasuk pajak langsung dalam APBN adalah PPh dan PBB, sementara pajak tak langsung adalah PPN, Cukai, dan Bea Materai. Alasan dari penggeseran ini adalah karena 1) masyarakat pada umumnya lebih merasa berat dan karenanya kurang ikhlas membayar pajak langsung daripada pajak tak langsung, 2) Pajak tak langsung lebih ramah investasi daripada pajak langsung.

Bentuk dari penggeseran tersebut adalah tarif PPh diturunkan hingga kompetitif. Dengan adanya dugaan krisis ekonomi di negaranegara maju bakal

berkepanjangan, pesaing Indonesia dalam menarik investasi adalah negaranegara lagi muncul. Tabel 8 menunjukkan tarif PPh di sejumlah negara lagi muncul yang cocok untuk dijadikan pembandingan bagi Indonesia. Negaranegara yang tarif PPhnya lebih kompetitif daripada Indonesia adalah Mesir, Hong Kong, Korea Selatan, Malaysia, Rusia, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan, dan Turki. Berdasarkan perbandingan dengan tarif PPh pada negaranegara tersebut, diusulkan agar tarif PPh diturunkan menjadi 60% dari tarif yang berlaku sekarang, sebagaimana tampak pada Tabel 9.

Tabel 8
Tarif PPh di Negaranegara Lagi Muncul

No	Negara	Tarif PPh 2011	
		Badan	Pribadi
1	Afrika Selatan	28	0 40
2	Brazilia	34	7,5 27,5
3	Brunei	23,5	0
4	Cina	25	5 45
5	Mesir	20	10 20
6	Hong Kong	16,5	0 15
7	India	33,2175	0 – 30 (+ 3% excess)
8	Indonesia	25	5 30
9	Iran	25	35
10	Korea Selatan	13/25	9%21,375%+36%excess
11	Malaysia	25	0 26
12	Mexiko	28	3 29
13	Filipina	30	5 32
14	Rusia	20	13
15	Saudi Arabia	20	20
16	Singapura	17	3,5 20
17	Sri Lanka	0 35	0 24
18	Taiwan	17	6 40
19	Thailand	30	5 – 37
20	Turki	20	15 – 35
21	Vietnam	25	5 – 35

Sumber: Tax rates around the world 10/20/2011 dan www.worldwidetax.com, last price update, 23 Agustus 2011.

Tabel 9
Tarif PPh yang Berlaku dan Tarif Usulan

Tarif PPh	Tarif yang berlaku	Tarif usulan
Badan	25%	15%
Pribadi	30%	18%

Tarif PPn, cukai, dan bea meterai dinaikkan. PPn setelah diganti dengan PPn tarifnya dinaikkan untuk mengkompensasi penerimaan PPh yang turun karena pemotongan tarifnya. Tarif yang sekarang berlaku untuk PPn adalah 10%. Tarif tersebut dapat dinaikkan hingga 17%. Tabel 10 menunjukkan bahwa tarif PPn 17% tersebut untuk negara lagi muncul masih wajar, komparabel dengan yang berlaku di Cina.

Demikian pula dengan tarif tarif cukai. Terlebih dahulu sistem cukai untuk berbagai obyek kena cukai sebagai campuran dari sistem *ad valorem* dan sistem spesifik diseragamkan dulu menjadi sistem spesifik untuk semua obyek kena cukai. Untuk obyek kena cukai yang sekarang masih memakai sistem *ad valorem*, seperti rokok, dicari dulu tarif spesifiknya yang menjamin penerimaan negara tidak turun. Setelah itu baru kemudian tarif cukai untuk semua obyek kena cukai dinaikkan. Pada umumnya, konsumsi masyarakat atas obyek kena cukai inelastis terhadap kenaikan tarif cukai, sehingga tarif cukai bisa dinaikkan signifikan. Lagi pula penaikan tarif cukai itu memang selaras dengan tujuan pengenaan cukai, yaitu untuk menjerakan konsumen dari mengkonsumsi obyek kena cukai. Oleh karena itu, tarif cukai dapat dinaikkan 30%. Sebagai pajak tak

Tabel 10
Tarif PPN di Negaranegara Sedang Muncul

No	Negara	Tarif PPN/PPn (%)
1	Afrika Selatan	14
2	Brazilia	1725
3	Brunei	NA
4	Cina	17
5	Mesir	10
6	Hong Kong	NA
7	India	12,5
8	Indonesia	10
9	Iran	1.5 10
10	Korea Selatan	10
11	Mexiko	16
12	Filipina	23
13	Rusia	18
14	Saudi Arabia	0
15	Singapura	7
16	Sri Lanka	12
17	Taiwan	5
18	Thailand	7
19	Turki	18
20	Vietnam	10

Sumber: Tax rates around the world 10/20/2011 dan www.worldwidetax.com, last price update, 23 Agustus, 2011.

langsung, tarif Bea Materai yang berlaku sekarang pada umumnya masih sangat rendah. Tarif tersebut dapat dibikin progresif dan sekaligus dinaikan sedemikian rupa sehingga penerimaan dari bea materai dapat meningkat dengan 300%. Tabel 11 berisi sebuah simulasi sederhana tentang penggeseran andalan penerimaan negara tersebut. Penggeseran itu ternyata bisa menaikkan penerimaan pajak sampai sebesar Rp 102,9 trilyun. Perluasan obyek kena PPN, cukai, dan bea meterai. Langkah ini perlu diambil mengingat masih banyaknya obyek yang bisa dikenai PPN, Cukai, dan Bea Materai yang belum dimanfaatkan. Dengan perluasan obyek kena pajak ini tentunya tambahan penerimaan pajak akan menjadi lebih besar dari Rp 102,9 trilyun.

Kelima langkah tersebut semuanya diorientasikan pada tujuan akhir meningkatkan rasio pajak dalam jangka menengah hingga mencapai sekitar 17,5% dari PDB. Tabel 12 menunjukkan hubungan antara langkahlangkah tersebut dengan peningkatan rasio pajak. Tampak pada tabel tersebut bahwa dari 20 dampak positif yang diperkirakan, baru dampak no. 19 yang sudah dikuantifikasikan kontribusinya melalui Tabel 11. Artinya, reformasi yang penulis usulkan bisa diharapkan untuk meningkatkan penerimaan pajak signifikan jauh di atas Rp 102,9 trilyun.

Tabel 11
Simulasi Sederhana Penurunan Tarif PPh Dikompensasi
Dengan Penarikan Tarif PPN, Cukai, dan Bea Materai

Jenis Pajak dalam RAPBN 2011		RAPBN 2011 dg tarif berlaku		RAPBN 2011 revisi dg tarif usulan		
		Tarif (%)	Jumlah ³ (Rp trilyun,)	Tarif (%)	Jumlah (Rp trilyun,)	Selisih (Rp trilyun,)
	PPh migas		54,2	Tetap	54,2	0,0
	PPh non migas					
Pajak	Badan	25	360,3	15	216,2	(144,1)
Langsung	Pribadi	30		18		
	PBB		27,7	Tetap	27,7	0,0
	Subtotal		442,2		298,1	(144,1)
	PPN	10	309,3	17	525,8	216,5
Pajak	Cukai		60,7	Dinaikkan 30%	78,9	18,2
Tak	Bea Materai		4,1	Dinaikkan 300%	16,4	12,3
Langsung	Subtotal		374,1		621,1	247,0
	Total		816,3		919,2	102,9

³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Data Pokok APBN 2006-2011"

Tabel 12
Dampak Reformasi Pajak Pada Meningkatnya Rasio Pajak

Langkah Reformasi	Dampaknya terhadap upaya meningkatkan rasio pajak	Kuantifikasi dampak
Penegakan disiplin hukum perpajakan	Meningkatnya ketaatan wajib pajak terkait dengan meningkatnya jumlah wajib pajak berNPWP Meningkatnya disiplin fiskus disertai menurunnya perburuan rente oleh fiskus Meningkatnya kolektabilitas pajak	Belum dilakukan
Penataan ulang tata pamong perpajakan	Menurunnya perburuan rente oleh fiskus terkait dengan menurunnya konflik kepentingan fiskus. Meningkatnya ketaatan wajib pajak terkait dengan menurunnya perburuan rente oleh fiskus Meningkatnya kolektabilitas pajak	Belum dilakukan
Reformasi birokrasi pajak	Meningkatnya disiplin fiskus Menurunnya perburuan rente oleh fiskus Meningkatnya ketaatan wajib pajak terkait dengan menurunnya perburuan rente oleh fiskus. Meningkatnya kolektabilitas pajak	Belum dilakukan
Penyederhanaan regulasi pajak	Menurunnya perburuan rente oleh fiskus Meningkatnya kolektabilitas pajak Meningkatnya ketaatan wajib pajak terkait dengan menurunnya perburuan rente oleh fiskus. Meningkatnya penerimaan pajak karena tidak adanya lagi restitusi PPN Meningkatnya jumlah wajib pajak badan karena meningkatnya jumlah investor Meningkatnya jumlah wajib pajak pribadi karena bertambahnya jumlah pekerja yang disebabkan oleh meningkatnya investasi	Belum dilakukan
Penataan kembali rezim perpajakan agar lebih ramah investasi	Meningkatnya ketaatan wajib pajak karena rezim perpajakan yang lebih ramah Meningkatnya ketaatan wajib pajak karena mereka lebih ikhlas membayar pajak tidak langsung Meningkatnya penerimaan pajak karena penurunan tarif PPh dikompensasi dengan kenaikan tarif PPn, Cukai, dan Bea Materai sedemikian rupa sehingga penerimaan pajak meningkat signifikan Meningkatnya penerimaan pajak karena perluasan obyek kena PPn, Cukai dan Bea Materai.	Belum dilakukan Sudah dilakukan di Tabel 9 Belum dilakukan

Tabel 13
Proyeksi Rasio Pajak Dan Penerimaan Pajak

Tahun	PDB ⁴ (Rp trilyun)	Rasio pajak (%)	Penerimaan pajak (Rp trilyun)	P r o y e k s i		
				Total	Karena kenaikan PDB	Karena reformasi pajak
2011	7.000	12.0	840,0	-		
2012	7.980	12.7	1.013,5	173,5	123,5	50,0
2013	9.097	13.4	1.219,0	205,5	149,7	55,8
2014	10.371	14.1	1.462,3	243,3	179,6	63,7
2015	11.823	14.8	1.749,8	287,5	214,9	72,6
2016	13.478	15.5	2.089,1	339,3	256,5	82,8
2017	15.364	16.2	2.489,0	399,9	305,5	94,4
2018	17.516	16.9	2.960,2	471,2	363,7	107,5
2019	19.968	17.5	3.494,4	534,2	429,1	105,1

Tabel 13 berisi sebuah simulasi peningkatan rasio pajak secara bertahap. Dengan peningkatan rasio pajak 0,7% per tahun diperlukan waktu 8 tahun untuk meningkatkan rasio pajak dari 12% menjadi 17,5%. Analisis terhadap proyeksi tambahan penerimaan pajak pada tiga kolom terakhir Tabel 13 itu menunjukkan bahwa proyeksi pada Tabel 13 cukup konservatif jika mengingat pada potensi tambahan penerimaan pajak yang baru saja dikemukakan. Tambahan penerimaan pajak pada setiap tahunnya ternyata lebih banyak disumbang oleh pertumbuhan PDB tahunan daripada oleh reformasi pajak. Sumbangan tahunan yang diharapkan dari reformasi pajak dengan jumlah di atas Rp 102,9 trilyun ternyata hanya pada dua tahun yang terakhir saja, yaitu pada tahun 2018 dan 2019. Artinya, proyeksi pada Tabel 11 itu cukup realistis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Usulan reformasi pajak ini menyisakan sebuah pertanyaan sensitif. Dengan dihilangkannya tarif PPh

progresif dan digantikan dengan tarif PPh rata, adilkah sistem perpajakan yang penulis usulkan ini? Pada sistem baru yang penulis usulkan progresivitas beban pajak tetap dipertahankan karena pajak tak langsung yang akan menjadi andalan utama penerimaan negara pasca reformasi pajak secara alami memang sudah bersifat progresif terhadap besarnya konsumsi dan belanja wajib pajak.

Saran

Semakin kaya seorang wajib pajak, semakin besar konsumsi dan belanjanya, baik yang dilakukannya langsung secara pribadi maupun yang dilakukannya secara tidak langsung melalui badan yang dikuasainya. Oleh karena itu, semakin besar pula beban pajak tak langsungnya yang terdiri dari PPn, Cukai, dan Bea Materai. Jadi di bawah sistem pajak yang penulis usulkan ini, beban pajak tetap progresif terhadap kemampuan bayar wajib pajak.

⁴ Dalam beberapa tahun terakhir PDB nominal secara empirik menjadi dobel setiap 5-6 tahun, yang berarti tumbuh minimal 14% per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Boediono, 24 Februari 2007. Dimensi Ekonomi Politik Pembangunan Indonesia. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Ekonomi UGM.*

Global Growth Generators: Moving Beyond Emerging Markets And BRIC. *blog.citigroup.com/./globalgrowthgeneratorsmoving-beyondemergingmarketandbric.ahcmCache.* Diakses Juli 2011.

Rabushka, Alvin, 2010. Flat tax chronology. *Flattaxes Blogspot.com/2010/03/flattaxchronology.html, wikipedi.* Diakses Juli 2011.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012. Data Pokok APBN 2006-2011. *www.sctib.com/./5084670543857012101004DataPokokAPBN2011Indonesiarev2Cache.* Diakses Juli 2011.

Price Waterhouse Coppers, March 2006. The World in 2050. *http://www.pwc.com/en_GX/gx/world2050/pdf/worldin2050jan2011.pdf.* Diakses Juli 2011.

Rabushka, Alvin, 2010. Flat tax chronology. *Flattaxes Blogspot.com/2010/03/flattaxchronology.html, wikipedia.* Diakses Juli 2011.

Transparency International, 2011. Worldwide Corruption Perception Ranking of Countries. *en.wikipedia.org/wiki/corruption_Perception_IndexCache.* Diakses Juli 2011.

Tax rates around the world 10/20/2011: last price update. *www.worldwidetax.com.* Diakses Juli 2011.

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Bambang Surtpto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: bambangsurtpto@yahoo.com

ABSTRACT

This research investigates the effect of board commissioner and audit committee characteristics to the financial reporting quality. Board commissioner and audit committee characteristic researched are comprehensive, including job tenure and number directorship that were rarely investigated internationally. Financial reporting quality proxy is accounting discretion used by management in financial reporting. Accounting discretion is measured by accrual discretionary, income smoothing and small negative earnings surprise avoidance. Accrual discretionary is estimated by times series version Jones models (1991) ten years before observation year. Income smoothing and small negative earnings surprise avoidance are measured by quarterly income during three years until observation year. Research sample consists of 385 nonfinancial firm years. Financial firms are excluded from research sample because have accruals that are not comparable with nonfinancial firms. Research results indicate commissioner tenure and number audit committee members who expert in accounting and finance have a negative association with accounting discretion and audit committee size have a positive association with accounting discretion.

Keywords: accounting discretion, accrual discretionary, corporate governance, income smoothing, negative earnings surprise avoidance

JEL Classification: M42

PENDAHULUAN

Integritas laporan keuangan mendapat perhatian besar dari regulator setelah terjadi skandal akuntansi yang melibatkan perusahaan yang terkenal seperti Enron, WorldCom, dan Xerox. Skandal akuntansi sebagian besar melibatkan perusahaan yang secara agresif menerapkan prinsip akuntansi berterima umum. Manajer mengeksploitasi kelemahan tata kelola perusahaan dengan cara menyalahgunakan diskresi akuntansi yang diberikan oleh standar akuntansi berterima umum guna mencapai atau melampaui target laba untuk secara temporer mendongkrak harga saham, menggunakan opsinya, dan mengamankan bonusnya (Matsunaga dan Park, 2001) atau jabatannya (Matsunaga dan Park, 2002). Kejadian semacam itu telah menyebabkan penurunan kepercayaan investor terhadap laporan keuangan.

Dalam rangka memperbaiki kepercayaan investor terhadap integritas laporan keuangan, lembaga pengatur di berbagai negara telah memberlakukan aturan tata kelola baru mengenai dewan komisaris dan komite audit bagi perusahaan publik. Keputusan regulator meregulasi tata kelola perusahaan setelah banyak terjadi kecurangan laporan keuangan menunjukkan tiga hal penting. Pertama, akurasi dan keandalan informasi keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan investasi penting bagi integritas pasar modal. Kedua, regulator memandang aturan baru tata kelola perusahaan sebagai mekanisme yang penting untuk menjaga kualitas laporan keuangan. Ketiga, dewan komisaris dan komite audit merupakan bagian

penting tata kelola perusahaan yang berperan besar dalam menjaga integritas laporan keuangan.

Penelitian mengenai keefektifan *corporate governance* di Indonesia sudah banyak dilakukan (Midiastuty dan Machfoedz, 2003; Boediono, 2005; Darmawati, dkk., 2004). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya paling tidak dalam dua hal. Pertama, karakteristik dewan komisaris dan komite audit yang diteliti komprehensif, melibatkan enam karakteristik dewan komisaris dan enam karakteristik komite audit, termasuk di dalamnya masa kerja dan jumlah jabatan anggota dewan komisaris dan komite audit yang secara internasional jarang diteliti (He dkk., 2008). Penelitian sebelumnya sebagian besar mengukur tingkat diskresi akuntansi hanya berdasar akrual diskresional (He dkk., 2008). Penelitian ini mencakup tiga kemungkinan penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen, yaitu: 1) penggunaan akrual diskresional, 2) perataan laba, dan 3) penghindaran penurunan laba dengan pelaporan laba kejutan positif kecil.

Sampel penelitian terdiri atas 385 tahun perusahaan dari sejak tahun 2004 sampai dengan 2009. Perusahaan yang masuk ke dalam sampel penelitian meliputi perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha nonkeuangan. Perusahaan dari industri jasa keuangan tidak dimasukkan ke dalam sampel karena akrualnya tidak sebanding dengan industri lainnya (Bowen dkk., 2007). Hasil penelitian menunjukkan masa kerja dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit yang ahli akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi, sedangkan ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap penggunaan diskresi akuntansi.

MATERIDAN METODE PENELITIAN

Dewan komisaris berperan mengawasi tindakan direksi untuk meminimalkan biaya keagenan yang timbul akibat pemisahan pemilikan dan pengendalian keputusan dalam perusahaan. Dewan komisaris bertanggung jawab membentuk sistem pengawasan yang tepat dan memastikan kepatuhan direksi terhadap sistem tersebut. Pengawasan oleh dewan komisaris yang efektif memerlukan proses tata kelola yang secara kolektif ditentukan oleh individu anggota dewan yang memiliki independensi, ketekunan, dan keahlian.

Ukuran dewan komisaris mempengaruhi kemampuan-

nya untuk mengawasi direksi. Namun literatur tidak padu mengenai arah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap keefektifannya. Ketika anggota dewan komisaris bertambah, lebih kecil kemungkinan berfungsi efektif dan lebih mudah bagi direksi untuk mengendalikannya. Oleh karena sulitnya mengorganisasi dan mengkoordinasi kelompok besar, ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan kemampuannya untuk memberi nasihat dan melakukan perencanaan strategik jangka panjang. Simpulan itu didukung oleh hasil studi produktifitas kelompok yang menunjukkan suatu kelompok menjadi kurang efektif ketika menambah anggotanya karena biaya koordinasi dan pemrosesan informasi melebihi manfaat yang timbul karena keragaman keahlian yang diperoleh.

Beberapa ahli lainnya berpendapat sebaliknya. Adams dan Mehran (2002) menyatakan perusahaan membutuhkan anggota dewan komisaris yang lebih banyak untuk mengawasi direksi secara efektif. Dewan komisaris yang lebih banyak lebih efektif karena dapat menciptakan hubungan lingkungan yang lebih baik dan menyediakan keahlian yang lebih banyak, dapat memberikan jasa yang lebih beragam, dapat memberikan waktu dan usaha lebih banyak, dan memiliki komisaris yang lebih banyak untuk disebarkan di berbagai komite guna mendistribusi beban pekerjaan (Klein, 2002b). Berdasar argumen yang diajukan, dirumuskan hipotesis yang tidak menentukan arah pengaruh sebagai berikut:

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Dewan komisaris yang lebih independen dapat mengawasi direksi lebih efektif. Fokus pada independensi didasarkan teori keagenan yang memandang fungsi pengawasan merupakan peran dewan komisaris yang paling penting. Dewan komisaris yang independen dapat mengawasi direksi secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Faktor yang mempengaruhi independensi dewan komisaris meliputi masuknya komisaris independen serta keberadaan komite nominasi dan remunerasi.

Anggota dewan komisaris terdiri atas komisaris yang tidak terafiliasi (komisaris independen) dan komisaris terafiliasi. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari

hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan profesional (KNKG, 2004). Meskipun menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak ada perbedaan tanggung jawab antaranggota dewan komisaris, terdapat kontribusi yang dapat berikan oleh komisaris independen dalam menjamin manajer bertindak demi kepentingan pemegang saham. Komisaris independen dapat mendorong terciptanya iklim yang lebih objektif dan menempatkan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan perusahaan dan kepentingan *stakeholder* sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Keefektifan pengawasan dewan komisaris juga dipengaruhi oleh pembentukan komite nominasi dan remunerasi. Komite nominasi akan meniadakan pengaruh direktur utama dalam menominasikan anggota komisaris yang baru. Komite remunerasi dibentuk untuk menyelaraskan kompensasi eksekutif dengan kinerjanya. Aturan NYSE dan NASDAQ mewajibkan pembentukan komite nominasi dan remunerasi yang terdiri sepenuhnya komisaris independen. Kewajiban pembentukan komite nominasi dan remunerasi di Indonesia belum diatur. Berdasar argumen yang diajukan, disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Jumlah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

H3: Keberadaan komite nominasi dan remunerasi berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Pengetahuan anggota komisaris mengenai usaha dan proses tata kelola perusahaan penting bagi keefektifannya. Komisaris dapat memperoleh pengetahuan tersebut melalui pelatihan internal dan eksternal dan pengalaman. Pengalaman anggota komisaris di perusahaan dapat meningkatkan kompetensi pengawasannya karena dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai perusahaan dan eksekutifnya. Senioritas dewan juga dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengawasi karena memiliki posisi yang lebih mapan dan lebih tahan terhadap tekanan kelompok untuk memenuhi keinginan direksi. Berdasar argumen di atas, dirumuskan hipotesis

sebagai berikut:

H4: Masa kerja anggota dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota dewan komisaris dapat mempengaruhi keefektifannya. Namun teori tidak padu mengenai arah pengaruh jumlah jabatan terhadap keefektifan pengawasan dewan komisaris. Pasar komisaris memberikan insentif untuk menjadi pengawas yang baik. Pasar memberi imbalan kepada komisaris yang efektif dan mengenakan pinalti kepada komisaris yang memiliki rekam jejak kinerja pengawasan yang buruk. Komisaris memiliki insentif untuk menjadi pengawas yang efektif karena menjadi komisaris perusahaan yang berjalan baik merupakan sinyal nilai ke pasar eksternal yang akan memberi imbalan berupa jabatan komisaris tambahan. Komisaris yang menjabat di beberapa perusahaan melakukan investasi yang signifikan dalam mengembangkan modal reputasi sebagai ahli pengawas keputusan. Jabatan komisaris tambahan juga memungkinkan komisaris untuk memperoleh kompetensi tata kelola dan pengetahuan praktik terbaik dewan komisaris. Komisaris yang memegang beberapa jabatan akan mengalami kerugian lebih besar akibat perilaku pelaporan keuangan oportunistik oleh manajemen.

Pengawasan manajemen puncak memerlukan waktu dan usaha. Dengan jumlah jabatan yang meningkat, tuntutan yang lebih tinggi atas waktu dan usaha dari seorang komisaris akan menurunkan jumlah perhatian yang dapat diberikan untuk mengawasi sebuah perusahaan. Oleh karenanya, lebih banyak jabatan komisaris berhubungan dengan kualitas pengawasan yang lebih rendah. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Jumlah jabatan yang dipegang oleh komisaris berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Kendala utama keefektifan dewan komisaris adalah kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Dewan yang menunjukkan ketekunan lebih tinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan meningkatkan pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan. Ketekunan dewan komisaris ditunjukkan dalam jumlah rapat dan perilaku anggota dalam rapat tersebut, misalnya persiapan sebelum rapat,

tingkat kehadiran, perhatian dan partisipasi selama rapat, dan tindak-lanjut setelah rapat. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Frekuensi rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Keefektifan pengawasan dewan komisaris dipengaruhi oleh bagaimana dewan dibentuk dan diorganisasi. Dewan dapat melaksanakan tugasnya melalui dewan secara keseluruhan atau mendelegasikan kewenangannya kepada komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepadanya. Dewan komisaris dapat mendelegasikan tanggung jawab pengawasan pelaporan keuangan kepada komite audit. Komite audit memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengawasan proses akuntansi dalam rangka menyediakan informasi yang relevan dan andal kepada pemegang saham. Komite audit adalah "*first among equals*" dalam proses akuntansi keuangan dan "*the ultimate monitor*" proses tersebut. Komite audit dapat meningkatkan kemampuan dewan komisaris untuk bertindak sebagai pengawas direksi dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih rinci mengenai laporan keuangan dan informasi keuangan lain yang diterbitkan oleh perusahaan. Keefektifan komite audit dipengaruhi oleh komposisi, kewenangan, sumber daya, dan ketekunan komite audit (DeZoort dkk., 2002).

Regulasi menentukan komite audit terdiri atas sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik (BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004). Regulasi tersebut menunjukkan lembaga pengatur memandang ukuran komite audit dan jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit merupakan faktor penting bagi keefektifan pengawasan pelaporan keuangan.

Namun demikian, literatur tidak padu mengenai arah pengaruh ukuran komite audit terhadap keefektifannya. Perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang sedikit akan memiliki waktu yang lebih sedikit untuk mengawasi penugasan auditor, melakukan dengar pendapat dengan manajemen, dan melakukan rapat dengan personil sistem pengendalian internal. Argumen yang sebaliknya seperti yang

diberikan terhadap ukuran dewan komisaris juga dapat berlaku untuk komite audit. Oleh karena sulitnya mengorganisasi dan mengkoordinasi kelompok besar, ukuran komite audit dapat berpengaruh negatif terhadap kemampuannya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7: Ukuran komite audit berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Komposisi komite audit merupakan faktor penting dalam pengawasan yang efektif. Komite audit yang independen lebih dapat mengawasi pelaporan keuangan perusahaan secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Komposisi komite audit menjadi fokus usaha reformasi tata kelola. Pada saat ini semua perusahaan publik yang terdaftar di bursa harus membentuk sebuah komite audit yang terdiri paling tidak tiga anggota yang sepenuhnya independen (BAPEPAM, 2006).

Komite audit yang memiliki status organisasional tinggi, independen, dan kekuasaan besar yang didelegasikan oleh dewan komisaris lebih mungkin dipandang sebagai badan otoritatif oleh manajemen dan auditor eksternal dan internal. Semakin banyak komisaris independen yang menjadi komite audit akan meningkatkan status organisasional dan kekuasaan komite audit sehingga lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8: Jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, anggota komite audit harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi atau keuangan. Bapepam-LK mengatur semua anggota komite audit memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan salah seorang anggota memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan (BAPEPAM, Kep-29/PM/2004). Aturan tersebut mengasumsi anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan lebih besar kemungkinan dapat mendeteksi

penyimpangan dalam laporan keuangan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H9: Jumlah anggota komite audit yang ahli dibidang akuntansi atau keuangan berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

NYSE mengatur jika seorang anggota komite audit menjabat di lebih dari tiga buah perusahaan, dewan komisaris harus menentukan apakah jabatan tersebut akan merusak kemampuannya untuk melaksanakan tugas sebagai anggota komite audit. Peraturan tersebut selaras dengan pengawasan manajemen puncak memerlukan waktu dan usaha. Oleh karena jabatan tambahan di perusahaan lain akan meningkatkan kebutuhan waktu seorang anggota komite, maka hal tersebut akan menurunkan jumlah waktu yang tersedia untuk secara efektif menjalankan tanggungjawab pengawasannya di sebuah perusahaan. Hasil riset konsisten dengan pernyataan tersebut (Persons, 2005).

Argumen sebaliknya seperti yang diajukan untuk dewan komisaris juga dapat berlaku bagi komite audit. Anggota komite audit memiliki insentif untuk menjadi pengawas yang efektif karena menjadi anggota komite audit perusahaan yang berjalan baik merupakan sinyal nilai ke pasar yang akan memberikan imbalan berupa jabatan tambahan. Jabatan tambahan juga memungkinkan anggota komite audit memperoleh kompetensi tata kelola dan pengetahuan praktik terbaik. Hal tersebut mengindikasikan pengaruh positif jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H10: Jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Anggota komite audit yang kurang senior dapat berpengaruh buruk pada kemampuannya untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Lebih senior anggota komite audit akan kurang rentan terhadap tekanan kelompok dan lebih besar kemungkinan mengkritisi praktik pelaporan yang meragukan oleh perusahaan. Penelitian tersebut mengindikasikan lebih lama masa kerja anggota komite audit berpotensi

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Berdasar argumen tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H11: Masa kerja anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Frekuensi rapat merupakan sinyal kepedulian komite audit terhadap kewajibannya dan ketekunan komite audit. Praktik terbaik merekomendasi tiga atau empat kali rapat dalam setahun. Penelitian memberi bukti komite audit yang rapat lebih sering lebih efektif dalam mengawasi manajemen dan berpotensi meningkatkan kualitas laporan keuangan (Xie dkk., 2002). Berdasar argumen di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H12: Frekuensi rapat yang diselenggarakan oleh komite audit berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan.

Hipotesis penelitian diuji dengan model regresi linear berganda. Variabel dependen penelitian adalah tingkat penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Variabel independen penelitian terdiri atas variabel tata kelola perusahaan dan variabel kontrol yang dalam penelitian sebelumnya sudah diidentifikasi sebagai determinan diskresi akuntansi. Variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam penelitian ini meliputi rasio ungkitan, ukuran perusahaan, ukuran risiko perusahaan, kinerja perusahaan, dan tahun amatan.

Manajemen dapat menggunakan keleluasaan pelaporannya untuk menyalsakan kinerja perusahaan. Sebagai contoh, manajer dapat melebihsajikan laba yang dilaporkan untuk mencapai target laba tertentu atau melaporkan kinerja yang luar biasa pada saat tertentu, misalnya ketika akan menerbitkan saham. Dalam penelitian ini penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan diukur dengan tiga cara, yaitu 1) penggunaan akrual diskresional, 2) perataan laba melalui akrual, dan 3) penghindaran penurunan laba melalui pelaporan laba kejutan positif kecil.

Nilai absolut akrual diskresional merupakan indikator besarnya penyesuaian yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapat jumlah laba yang dilaporkan. Nilai absolut akrual diskresional yang lebih besar menunjukkan penggunaan diskresi akuntansi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Akrual diskresional

diukur dengan cara akrual total dikurangi akrual nondiskresional. Penelitian ini menggunakan model Jones (1991) versi runtut waktu untuk mengestimasi akrual nondiskresional. Model perhitungan akrual nondiskresional dirumuskan sebagai berikut:

$$Akrual\ Total_{it} = \alpha_0 + \alpha_1(1/Akrual\ Total_{t-1}) + \alpha_2(\Delta\ Pendapatan_{it}) + \alpha_3(Aset\ Tetap_{it}) + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Akrual total setiap tahun dihitung dengan cara laba sebelum pos luar biasa dikurangi dengan arus kas dari operasi. Koefisien setiap perusahaan sampel diestimasi berdasar data runtut waktu selama 10 tahun sebelum tahun amatan. Koefisien hasil perhitungan kemudian digunakan untuk mengestimasi jumlah akrual nondiskresional pada tahun amatan. Setelah itu, akrual diskresional setiap tahun amatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Akrual\ Diskresional_{it} = Akrual\ Total_{it} - Akrual\ Nondiskresional_{it} \quad (2)$$

Supaya konsisten dengan rentang waktu yang digunakan untuk mengukur dua diskresi akuntansi lainnya, analisis dilakukan berdasarkan akrual diskresional rata-rata dalam tiga tahun yang berakhir pada tahun amatan.

Ukuran diskresi akuntansi yang kedua, yaitu perataan laba, dihitung dengan cara deviasi standar arus kas operasi dibagi dengan deviasi standar laba (Leuz dkk., 2003). Rasio yang lebih besar dari satu menunjukkan arus kas operasi yang lebih bervariasi dibanding laba, konsisten dengan penggunaan diskresi akuntansi untuk perataan laba. Perusahaan dengan rasio perataan yang lebih tinggi dibanding perusahaan lain dianggap menggunakan diskresi akuntansi yang lebih tinggi dan sebaliknya. Untuk menghitung rasio perataan laba digunakan laba dan arus kas operasi kuartalan selama rentang waktu tiga tahun (dua belas kuartal) yang berakhir pada tahun amatan.

Graham dkk. (2005) menemukan CFO yang memandang laba kuartal yang sama tahun sebelumnya sebagai target yang akan dicapai atau dilampaui. Oleh karena itu, penelitian ini mengukur frekuensi perusahaan melaporkan laba kuartalan kejutan positif kecil selama rentang waktu tiga tahun yang berakhir pada tahun amatan. Laba kejutan positif kecil terjadi

apabila laba kuartal musiman setelah pajak ($Laba_k - Laba_{k-4}$) diskala aset total pada kuartal k-5 berkisar antara 0,00 sampai 0,01 (Burgstahler dan Dichev, 1997). Rasio penghindaran laba kejutan negatif kecil dihitung dengan cara bagian dari 12 kuartal sebelumnya yang menyajikan laba kejutan positif kecil dibagi dengan 12. Perusahaan dengan rasio lebih tinggi menunjukkan manajemen menggunakan diskresi akuntansi yang lebih tinggi dan sebaliknya.

Tiga ukuran di atas merupakan proksi diskresi akuntansi sehingga boleh jadi diukur dengan kesalahan. Untuk mengatasi kesalahan pengukuran dan mempertimbangkan kemungkinan *trade-off* antarjenis diskresi, dalam penelitian ini digunakan indeks diskresi akuntansi yang menggabungkan ketiga ukuran (Leuz dkk., 2003). Setiap ukuran diskresi diurutkan dari paling rendah ke paling tinggi, kemudian nomor urut peringkat masing-masing amatan dibagi dengan jumlah amatan. Ukuran gabungan, yaitu indeks diskresi akuntansi, merupakan hasil rata-rata sederhana peringkat ketiga ukuran diskresi akuntansi. Hasil perhitungan akan berkisar dari 0 sampai dengan 1, 0 = penggunaan diskresi akuntansi paling rendah dan 1 = penggunaan diskresi akuntansi paling tinggi.

Penelitian ini menguji hubungan langsung setiap karakteristik dewan komisaris dan komite audit dengan penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen. Operasionalisasi setiap karakteristik dewan komisaris adalah sebagai 1) ukuran dewan komisaris ditentukan berdasarkan jumlah orang yang menjadi anggota dewan komisaris dibagi aset total; 2) independensi dewan komisaris diukur berdasarkan proporsi jumlah anggota komisaris independen dibagi jumlah seluruh anggota dewan komisaris; 3) keberadaan komite nominasi dan remunerasi diukur dengan dumi; 4) masa kerja dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah masa kerja seluruh anggota dewan komisaris dibagi jumlah anggota; 5) jumlah jabatan yang dipegang anggota dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah jabatan yang dipegang oleh semua anggota dewan dibagi jumlah anggota dewan; dan 6) ketekunan dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris selama setahun. Karakteristik komite audit yang diduga berhubungan dengan keefektifan pengawasan pelaporan keuangan perusahaan diukur berdasarkan 1) ukuran komite audit ditentukan berdasar jumlah orang yang menjadi anggota

dibagi aset total; 2) komisaris independen yang menjadi anggota komite audit diukur berdasar jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit dibanding jumlah seluruh anggota komite; 3) keahlian akuntansi/keuangan diukur berdasar jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi/keuangan dibagi jumlah anggota komite; 4) jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite diukur berdasarkan jumlah jabatan yang dipegang oleh semua anggota komite audit dibagi jumlah anggota komite; 5) masa kerja anggota komite audit diukur berdasarkan jumlah masa kerja seluruh anggota komite dibagi jumlah anggota komite; dan 6) ketekunan komite audit diukur berdasarkan jumlah rapat yang diselenggarakan oleh komite audit perusahaan selama setahun.

Kothari dkk. (2005) menyatakan penelitian diskresi akuntansi yang tidak mengontrol kinerja salah spesifikasi. Untuk mengontrol pengaruh kinerja pada diskresi akuntansi, peneliti memasukkan imbal hasil dari aset (ROA) ke dalam model. ROA dihitung dengan cara laba sebelum pos luar biasa dibagi aset total tahun sebelumnya. Perusahaan dengan volatilitas laba lebih besar memiliki biaya modal yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih berisiko boleh jadi menggunakan diskresi akuntansi yang lebih besar untuk menurunkan persepsi risiko guna menurunkan biaya modalnya. Peneliti memproksi risiko dengan

deviasi standar ROA selama lima tahun yang berakhir pada tahun amatan. Peneliti juga memasukkan dumi tahun untuk mengontrol semua variasi yang tidak terobservasi dalam lingkungan perusahaan.

Populasi penelitian meliputi semua perusahaan publik nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel penelitian dipilih berdasar ketersediaan data. Data karakteristik dewan komisaris dan komite audit diperoleh dari laporan tahunan, sedangkan data keuangan diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan kuartalan. Data penelitian diperoleh dari situs BEI (www.idx.co.id), situs perusahaan sampel, dan ICMD. Sampel adalah tahun perusahaan yang datanya dapat diperoleh secara lengkap dari sumber-sumber tersebut. Sampel penelitian terdiri atas 385 tahun perusahaan nonkeuangan dari periode amatan tahun 2004 sampai dengan 2009.

HASIL PENELITIAN

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif karakteristik dewan komisaris dan komite audit. Jumlah anggota dewan komisaris rata-rata 4,54; jumlah komisaris independen rata-rata 1,76; jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota dewan komisaris rata-rata 1,24; masa kerja anggota dewan komisaris rata-rata 5,72; jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Tata Kelola Perusahaan

Variabel	Min.	Mak.	Mean	Deviasi Std.
Anggota komisaris	2	13	4,54	2,000
Komisaris independen	0	8	1,76	1,186
Komite nominasi dan remunerasi	0	1	0,24	0,427
Jumlah jabatan anggota komisaris	0	10	1,24	1,147
Masa kerja komisaris	0	21	5,72	3,501
Rapat komisaris	0	37	3,37	5,201
Anggota komite audit	0	7	2,83	1,211
Komisaris independen yang menjadi komite	0	3	0,94	0,562
Jumlah jabatan anggota komite audit	0	3	0,44	0,681
Jumlah ahli akuntansi dan keuangan	0	5	0,96	1,129
Masa kerja komite audit	0	21	3,13	2,204
Rapat komite audit	0	72	4,16	7,789

Sumber: Data penelitian, diolah.

komisaris selama satu tahun rata-rata 3,37. Data keberadaan komite nominasi dan remunerasi merupakan dumi 1 jika ada dan 0 untuk lainnya. Jumlah rata-rata 0,24 menunjukkan sebagian besar perusahaan sampel tidak memiliki komite tersebut. Data deviasi standar dalam tabel menunjukkan sampel penelitian cukup bervariasi dalam enam karakteristik dewan komisaris yang diteliti.

Tabel 1 juga menunjukkan data jumlah anggota komite audit rata-rata 2,83; jumlah komisaris independen yang menjadi anggota komite audit rata-rata 0,94; jumlah jabatan anggota komite audit rata-rata 0,44; jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan rata-rata 0,96; masa kerja anggota komite audit rata-rata 3,13; dan jumlah rapat komite audit dalam satu tahun rata-rata 4,16. Data deviasi standar menunjukkan sampel penelitian cukup bervariasi dalam enam karakteristik komite audit tersebut.

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif tiga ukuran diskresi akuntansi serta indeks diskresi akuntansi yang menggabungkan ketiga ukuran. Rata-rata tiga tahun nilai absolut akrual diskresional perusahaan sampel sebesar 3,6% dari aset total. Rata-rata rasio perataan laba perusahaan sampel mendekati 3, menunjukkan arus kas bervariasi hampir tiga kali lipat dari laba. Perusahaan sampel rata-rata melaporkan laba kejutan positif kecil 2,74 kali dalam dua belas kuartal terakhir atau 22,8%. Sebagai konsekuensi dari cara pengukuran yang digunakan, indeks diskresi akuntansi memiliki rata-rata 0,5.

Tabel 3 menyajikan data korelasi antarukuran diskresi akuntansi. Statistik menunjukkan korelasi yang signifikan hanya terjadi antara frekuensi laba kejutan positif kecil dan perataan laba tetapi tidak besar (0,312). Meskipun ada kemungkinan terdapat elemen yang sama dalam ketiga ukuran (misalnya perusahaan dapat menggunakan akrual diskresional untuk mencapai target laba atau meratakan laba), data korelasi menunjukkan ketiga ukuran menangkap jenis diskresi akuntansi yang berbeda. Pemakaian indeks diskresi akuntansi memiliki keunggulan karena dapat menangkap atribut dari semua ukuran. Indeks diskresi akuntansi menunjukkan korelasi yang signifikan dengan ketiga ukuran (0,18 dengan akrual diskresional, 0,49 dengan perataan laba, dan 0,69 dengan frekuensi laba kecil). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, untuk menjamin validitas simpulan, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi asumsi normalitas, multikolinearitas, homogenitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian asumsi-asumsi tersebut menunjukkan tidak terjadi pelanggaran asumsi yang dapat menimbulkan masalah yang serius.

Oleh karena data korelasi yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan ketiga ukuran menangkap jenis diskresi akuntansi yang berbeda, maka masing-masing akan diinterpretasi secara tersendiri. Hasil uji regresi disajikan dalam Tabel 4. Pada Tabel 4 disajikan hasil regresi untuk setiap ukuran diskresi akuntansi sebagai variabel independen dalam kolom tersendiri.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Elemen Diskresi Akuntansi

Elemen	Minimum	Maksimum	Mean	Dev. Std.
Akrual diskresional	0,00005	0,72668	0,03637	0,06743
Perataan laba	0,08073	33,20199	2,99921	4,63550
Frekuensi pelaporan laba kejutan kecil	0,00000	12,00000	2,74000	2,48500
Persentase pelaporan laba kejutan kecil	0,00000	1,00000	0,22835	0,20711
Indeks diskresi akuntansi	0,06147	0,94285	0,50129	0,17886

Sumber: Data penelitian, diolah.

Tabel 3
Korelasi Antar Elemen Diskresi Akuntansi

Elemen	Akrual Diskresional	Perataan Laba	Frekuensi Laba Kecil	Indeks Diskresi Akuntansi
Akrual diskresional	1,000	-0,090	-0,053	**0,177
Perataan laba	-0,090	1,000	**0,312	**0,488
Frekuensi laba kejutan kecil	-0,053	**0,312	1,000	**0,691
Indeks diskresi akuntansi	**0,177	**0,488	**0,691	1,000

** Korelasi signifikan pada tingkat 0,01 (2-sisi).

* Korelasi signifikan pada tingkat 0,05 (2-sisi).

Tabel 4
Estimasi Determinan Diskresi Akuntansi

Variabel	Prediksi Arah	Indeks Diskresi Akuntansi (1)	Akrual Diskresional (2)	Perataan Laba (3)	Frekuensi Laba Kecil (4)
TH2005	+/-	***2,588	-0,312	***2,698	**2,382
TH2006	+/-	***2,614	-0,253	***3,421	*1,664
TH2007	+/-	**2,081	-1,199	***3,535	1,512
TH2008	+/-	**2,268	-1,590	***3,572	**2,202
TH2009	+/-	1,304	***-3,255	***3,770	*1,888
Aset Total	+	-1,206	** -2,451	0,473	-0,250
Return on Assets (ROA)	+/-	-0,048	-1,557	**2,227	-0,734
Variasi ROA	+	0,668	0,181	0,334	0,712
Leverage	+	** -2,089	0,962	** -2,514	** -2,292
Ukuran Komisaris	+/-	-1,589	* -1,816	-0,033	-1,077
Komisaris Independen	-	-1,098	1,774	*** -2,823	-0,982
Komite Nominasi dan Remunerasi	-	-0,720	1,419	-1,522	-1,218
Masa Kerja Komisaris	-	*** -3,889	-0,276	*** -4,270	*** -2,637
Jabatan Komisaris	+/-	-0,737	-0,027	0,249	-1,559
Rapat Komisaris	-	1,294	*1,693	-0,750	1,426
Ukuran Komite Audit	+/-	*1,721	0,610	0,582	**1,965
Independensi Komite	-	0,838	0,997	-0,419	0,955
Ahli Akuntansi dan Keuangan	-	** -2,346	* -1,672	-1,124	-1,532
Jabatan Komite Audit	+/-	1,321	-0,726	0,757	**2,379
Masa Kerja Komite	-	-1,482	** -2,004	0,247	-0,971
Rapat Komite Audit	-	0,662	0,275	0,523	0,425
Adj R ² total		8,7%	8,5%	9,3%	5,2%
F-stat (p-value) total		2,742 (0,000)	2,687 (0,000)	2,870 (0,000)	1,993 (0,006)
Adj R ² variabel GCG saja		6,8%	4,3%	3,6%	4,1%
Variable GCG saja		3,342 (0,000)	2,421 (0,005)	2,193 (0,012)	2,379 (0,006)

***Signifikan pada tingkat 0,01; **signifikan pada tingkat 0,05; *signifikan pada tingkat 0,10.

PEMBAHASAN

Hasil hitungan variabel kontrol memiliki tanda koefisien yang tidak sesuai prediksi dan/atau tidak signifikan pada level konvensional apabila digunakan variabel independen dengan ukuran indeks diskresi akuntansi. Satu-satunya koefisien dengan arah sesuai dengan prediksi dan signifikan pada level konvensional adalah ROA apabila digunakan variabel independen dengan ukuran perataan laba.

Meskipun tidak diajukan hipotesis secara formal, hasil hitungan dua tahun amatan memberikan hasil yang menarik. Dibandingkan tahun 2004 (tahun dasar), hasil hitungan menunjukkan koefisien tahun menunjukkan trend positif untuk indeks diskresi akuntansi yang signifikan pada level konvensional. Tren tersebut didukung dan lebih persisten apabila digunakan ukuran perataan laba. Tren yang sama juga terjadi, meskipun kurang persisten, apabila digunakan ukuran frekuensi pelaporan laba kejutan positif kecil. Kecenderungan sebaliknya terjadi apabila digunakan ukuran akrual diskresional tetapi tidak ada koefisien tahun yang signifikan pada level konvensional. Hasil tersebut memberikan indikasi penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan setelah tahun 2004 pada tingkat yang lebih tinggi.

Hasil regresi antara ukuran dewan komisaris dengan indeks akrual diskresional menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -1,816 dan p -value 0,070. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H1 bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi untuk manajemen laba. Hasil tersebut konsisten dengan hasil riset di U.S. (Xie dkk., 2003). Hasil penelitian tidak konsisten dengan argumen dewan dengan ukuran besar merupakan pengawas yang buruk terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil regresi antara komisaris independen dengan peringkat perataan laba menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -2,823 dan p -value 0,005. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H2 bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan untuk perataan laba. Hasil tersebut konsisten dengan hasil riset di U.S.

(Klein, 2002a). Hasil penelitian ini konsisten dengan argumen jumlah komisaris independen yang lebih banyak akan meningkatkan independensi dewan komisaris sehingga dapat menjadi pengawas yang lebih baik terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil regresi antara masa kerja dewan komisaris dengan indeks diskresi akuntansi menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -3,889 dan p -value 0,000; antara masa kerja komisaris dengan peringkat perataan laba menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -4,270 dan p -value 0,000; dan antara masa kerja dewan komisaris dengan pelaporan laba kejutan positif kecil menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -2,637 dan p -value 0,009. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H4 bahwa masa kerja dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan, terutama untuk meratakan laba dan melaporkan laba kejutan positif kecil. Hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Xie dkk. (2003). Hasil penelitian ini konsisten dengan argumen masa kerja meningkatkan kemampuan komisaris untuk mengawasi manajemen secara efektif.

Hasil regresi antara ukuran komite audit dengan indeks diskresi akuntansi menunjukkan tanda koefisien positif sesuai prediksi dengan nilai t hitung 1,721 dan p -value 0,086 dan antara ukuran komite audit dengan peringkat pelaporan laba kejutan positif kecil menunjukkan tanda koefisien positif sesuai prediksi dengan nilai t hitung 1,965 dan p -value 0,050. Oleh karena itu, penelitian ini berhasil memberikan bukti yang mendukung H7 bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen untuk pelaporan laba kejutan positif kecil. Hal tersebut konsisten dengan argumen semakin besar ukuran komite audit akan semakin sulit untuk diorganisasi dan dikoordinasi sehingga akan menurunkan kemampuannya dalam mengawasi pelaporan keuangan. Penelitian lainnya tidak berhasil memberi bukti mengenai hubungan antara ukuran komite audit dengan manajemen laba (Xie dkk., 2003).

Hasil regresi antara jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan dengan indeks diskresi akuntansi menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -2,346 dan

p-value 0,019 dan antara jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan dengan peringkat akrual diskresional menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -1,672 dan p-value 0,095. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H9 bahwa jumlah anggota komite audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan terutama untuk manajemen laba. Hasil tersebut konsisten dengan argumen keahlian akuntansi atau keuangan anggota komite audit meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Xie dkk. (2003).

Hasil regresi antara jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit dengan peringkat pelaporan laba kecil menunjukkan tanda koefisien positif sesuai prediksi dengan nilai t hitung 2,379 dan p-value 0,018. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung hipotesis H10 bahwa jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit berpengaruh positif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan terutama untuk menyajikan laba kejutan positif kecil. Hasil tersebut konsisten dengan argumen semakin banyak jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit akan mengurangi jumlah waktu yang dapat disediakan untuk sebuah perusahaan sehingga akan menurunkan kemampuannya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya (Persons, 2005).

Hasil hitungan regresi antara masa kerja anggota komite audit dengan peringkat akrual diskresional menunjukkan tanda koefisien negatif sesuai prediksi dengan nilai t hitung -2,004 dan p-value 0,046. Oleh karena itu, penelitian berhasil memberikan bukti yang mendukung H11 bahwa masa kerja anggota komite audit berpengaruh negatif dengan penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan terutama untuk manajemen laba. Hasil tersebut konsisten dengan argumen lebih senior anggota komite audit akan kurang rentan terhadap tekanan kelompok dan lebih besar kemungkinan mengkritisi praktik pelaporan keuangan yang

meragukan oleh manajemen. Penelitian tidak berhasil memberikan bukti keberadaan komite nominasi dan remunerasi berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Hasil tersebut konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang tidak berhasil memberikan bukti dominasi direktur atas dewan komisaris berpengaruh buruk terhadap kualitas pelaporan keuangan (Xie dkk., 2003). Hasil-hasil tersebut diduga terjadi karena fungsi nominasi dan remunerasi terlalu jauh dari fungsi pelaporan keuangan untuk dapat memberi pengaruh langsung terhadap kualitas pelaporan keuangan (He, dkk., 2008). Penelitian tidak berhasil memberikan bukti jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota dewan berpengaruh terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Penelitian tidak berhasil memberikan bukti jumlah rapat yang diselenggarakan oleh dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen dalam pelaporan keuangan. Hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya (Xie dkk., 2003). Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan proposisi ketekunan dewan komisaris meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian dilakukan terhadap 385 tahun perusahaan nonkeuangan publik yang terdaftar di BEI sejak tahun 2005 sampai 2009 untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan yang diukur dengan penggunaan diskresi akuntansi oleh manajemen. Berdasar hasil penelitian diperoleh simpulan faktor-faktor berikut ini berpengaruh positif terhadap kemampuan dewan komisaris menjalankan fungsi pengawasan laporan keuangan, yaitu 1) ukuran dewan komisaris, 2) jumlah komisaris independen, dan 3) masa kerja anggota dewan komisaris. Selain itu, berdasar hasil penelitian juga diperoleh simpulan bahwa faktor-faktor berikut ini berpengaruh positif terhadap kemampuan komite audit menjalankan fungsi pengawasan laporan keuangan, yaitu 1) ukuran komite audit, 2) jumlah anggota komite

audit yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan, 3) jumlah jabatan yang dipegang oleh anggota komite audit, dan 4) masa kerja anggota komite audit.

Saran

Simpulan di atas harus dipertimbangkan bersamaan dengan keterbatasan yang melekat dalam penelitian ini. Sampel penelitian tidak dipilih secara acak sehingga ada kemungkinan tidak mewakili populasi. Data karakteristik dewan komisaris dan komite audit sebatas yang dapat diperoleh dari informasi yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan tidak mencakup tata kelola internal perusahaan dan tidak mencakup tata kelola eksternal perusahaan. Oleh karena kualitas pelaporan keuangan tidak dapat diamati secara langsung, penelitian ini menggunakan diskresi akuntansi sebagai proksi kualitas pelaporan keuangan. Meskipun ukuran diskresi akuntansi yang digunakan *state-of-the-art*, masih ada kemungkinan kualitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini diukur dengan kesalahan. Terdapat kemungkinan penelitian lebih lanjut di masa datang dengan memasukkan variabel baru, misalnya variabel tata kelola eksternal. Penelitian yang akan datang juga dapat dilakukan dengan sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda untuk mengetahui kekuatan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R. dan H. Mehran. 2002. *Board Committee Structures, Ownership, and Firm Performance*. Working Paper: New York Federal Reserve.
- BAPEPAM-LK. 2006. *Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance*. Jakarta: Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance.
- Boediono, S.B. 2005. *Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governace dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*. Simposium Nasional Akuntansi VIII, IAI, 2005.
- Bowen, R.M., S. Rajgopal, dan M. Venkatachalam. 2007. *Accounting Discretion, Corporate Governance and Firm Performace*. Working Paper: University of Washington and Duke University.
- Darmawati, D., Khomsiyah, dan Rahayu, R.G. 2004. *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2004.
- DeZoort, F.T, D.R. Hermanson, D.S. Archanbeault, dan S.A. Reed. 2002. "Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature". *Journal of Accounting Literature* (21): 38-75.
- Graham, J., C. Harvey, dan S. Rajgopal. 2005. "The Economics Implication of Corporate Financial Reporting". *Jurnal of Accounting and Economics* (40): 3-73.
- He, L., R. Labelle, C. Piot, dan D.B. Thornton. 2009. "Board Monitoring, Audit Committee Effectiveness, and Financial Reporting Quality: Review and Synthesis of Empirical Literatur". *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, Vol. 1, No. 2. Available at SSRN: <http://ssrn.com>
- Jones, J. 1991. "Earnings Management During Import Relief Investigations". *Journal of Accounting Research* (29): 193-228.
- Klein, A. 2002a. "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management". *Journal of Accounting and Economics* (33): 375-400.
- Klein, A. 2002b. "Economic Determinants of Audit Committee Independence". *The Accounting Review* 77 (2): 435-452.
- KNKG. 2004. *Pedoman Tentang Komisaris Independen*. <http://www.governance-indonesia.or.id/main.htm>.

KNKG. 2004. *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance.

Kothari, S.P., A. Leone dan C. Wasley. 2005. "Performance Matched Discretionary Accrual Measures". *Journal Accounting and Economics* (39): 163-197.

Leuz, C., D. Nanda, dan P.D. Wysocki. 2003. "Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison". *Journal of Financial Economics* (69): 505-527.

Matsunaga, S. dan C. Park. 2001. "The Effect of Missing a Quarterly Earnings Benchmark on The CEO's Annual Bonus". *The Accounting Review* (76) 313-332.

Matsunaga, S. dan C. Park. 2002. *The Effect of Consecutively Missing Quarterly Forecasts on CEO Turnover*. Working Paper, University of Oregon and HKUST.

Midiastuty, P.P dan Mahfoedz, M. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi VI. IAI, 2003.

Persons, O.S. 2005. "The Relation Between the New Corporate Governance Rules and the Likelihood of Financial Statement Fraud". *Review of Accounting & Finance* 4 (2): 125-148.

Xie, B., W. N. Davidson III, dan P.J. DaDalt. 2003. "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee". *Journal of Corporate Finance* 9: 295-316.

STRATEGY TO ENHANCE INDONESIAN TRADE PERFORMANCE TOWARDS THE REST OF ASEAN-5 MARKETS

Jaka Sriyana

Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia, 55283
E-mail: jakasriyana@fe.uui.ac.id

Abdul Hakim

Faculty of Economics, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta, Indonesia, 55283
E-mail: abdul.hakim.uui@gmail.com

ABSTRACT

International trade among ASEAN countries shows an increasing trend in the last five years. However, the trend does not apply to all ASEAN countries. Some of the countries enjoy significant increase in their export such as Singapore and Thailand, while some other, such as Indonesia, Malaysia, and the Philippines, do not enjoy such situation. This paper constructs a model of Indonesian trade policy to increase export through the dynamic change in export market share in ASEAN countries, and through speed adjustment in export commodities. The paper applies the co-integration and the Vector Error Correction Model (VECM) to help constructing the model.

Keywords: international trade, policy, ASEAN, speed adjustment

JEL Classification: G11, G15

INTRODUCTION

International trade has an important role in gross domestic product, the ultimate measure of economic activities in a given country. The role has been more important in ASEAN countries in the last five years, suggested by the positive trend in the volume of their international trade. However, the trend does not apply to all ASEAN countries. Some of the countries enjoy significant increases in their export such as Singapore and Thailand, while some others such as Indonesia, Malaysia, and the Philippines do not enjoy such situation.

In year 2008, Indonesia's export contributes 42% of total spending. The global financial crisis started in the mid 2008 has significantly reduced export of some key commodities such as textile, shoes, and furniture. It is hypothesized that the decline is caused not only by the global financial crisis which led to the decline in world market demand, but also by the decline in product competitiveness.

The decline in product competitiveness has caused a fall in the market share of Indonesian commodities in international markets. This has an impact both on macroeconomic aspects including the trade balance, current account, and power parity, and microeconomic aspects including the decrease in level of production and employment, as well as government revenue from tax of trade.

Indonesian economy has experienced several stages of economic growth. In the last five years the deficit fiscal policy has been applied to stabilize the economy and to increase export growth. The fiscal and monetary policies applied by the government did not significantly contribute to the economic stabilization and export growth. During the last ten years, Indonesia has been recording an average economic growth of 5% per year with inflation level of less than 10%. At the same period, its current account has been declining as the result of the decline in export. This has led to a decrease in trade surplus which is followed by the rapid increase in foreign debt.

Bank Indonesia reported that the total outstanding debt reached Rp 1,667 trillion in year 2008. Because global economic and financial crisis has influenced Indonesian economy since the mid of 2008, economic growth tend to lower than the previous years. It also has a negative impact on export growth which is followed by the decrease in export tax revenue. These might lead to fiscal crisis, a situation in which a huge government budget deficit becomes a source of serious multi economic and social crisis.

From the aforementioned problem, it is crucial to construct a model of policy strategy to increase export through the dynamic change in export market share in each country in ASEAN, speed adjustment in each commodities, and to measure the impact of export on fiscal sustainability. This paper builds a model of international trade performance enhancement strategy, especially the export performance of Indonesia through export market volatility analysis in ASEAN-5, adjustment speed analysis to respond shock of Indonesia's export to ASEAN -5, and dynamic analysis of Indonesia's export-import to ASEAN-5. The model is expected to increase market shares of Indonesia's exports in ASEAN, and increase power parity of key export products, especially commodities at SITC 0-9.

LITERATURE REVIEW AND METHOD

To trace the literature in international trade, we need to go back at least to the absolute advantage theory of Smith (1776), the comparative advantage theory of Ricardo (1817) and factor endowment theory of Heckscher-Ohlin (Heckscher and Ohlin, 1983). These theories motivate the free market to gain maximum advantage from international trade. They suggest that developed countries will trade more with developing countries, compare to that with other developed countries. However, the fact suggested that developed countries trade mostly with the other developed countries. This has triggered the emergence of alternative theories of international trade. Alternative theories such as product life cycle theory (Vernon, 1966) capture the motivation to export from the point of view of product stages production, ranges from innovation advantage to the abundance of labour advantage.

These theories explain the motivation to trade internationally. In the last few years, the more important issue has been in building a model to increase the export performance. Juswanto and Mulyati (2006), using constant market share analysis, found that product composition seems to be a main problem of Indonesia's manufactured exports. Indonesia's manufactured exports concentrated in products which is relatively low in world demand. This is shown by the fact that products under SITC 6 and 8 which constitute more than 50% of Indonesia's manufactured exports have lower world export growth than that of other products. The study also found that Indonesia's manufactured exports tend to concentrate in some specific markets such as Japan, NIEs (Singapore, South Korea, Taiwan, and Hong Kong), US, ASEAN and China, which absorb more than 60% of total manufactured exports of Indonesia. Those markets make a strong impact on the performance of Indonesia's manufactured export

Misanam *et al.* (2009) suggest building economic integration based on the religion value in order to get masalah (advantage) through helping the inefficient countries. This also represents that the trade between Indonesia and some countries has not only been a trade per se, but also representing a tight cultural relationship among them. The finding is in the same spirit with the founding of some economic block building in Europe and Asia to strengthen regional trade

among them.

Apart from the aforementioned theories, some other papers talk about other aspects which might influence the process of international trade and strategy implication to maintain international trade performance. Hakim and McAleer (2008) investigate the volatility pullovers across financial markets and exchange rates. They suggest that fluctuation in one market influences the other markets in a more integrated international market. This implies that the performance of export in one commodity is influenced by that of other commodities, and that exchange rate remains an important variable in international trade, especially as more countries apply floating exchange rates system. This is an important issue in mapping the key products which are crucial to enhance export performance.

Hakim and McAleer (2009) provide evidence that conditional correlation across those markets are time varying, which implies that hedging is one of important strategies in international trade. As the fact has said, the financial crisis in Asia in year 1997-1998 was partly caused by the lack of hedging in international trade toward the fluctuation of exchange rates. With the collapse of US financial market and the emergence of the new common currency in Europe (Euro), one needs to consider a new venue of international trade along with the currency which is more stable in order to minimize the risk from exchange rate fluctuation.

This paper uses Cointegration and Vector Error Correction Model (VECM) of Johansen (1991) to analyse the dynamic behaviour of Indonesia's trade to the rest of ASEAN-5. Cointegration can be used to detect the presence of long-run equilibrium across dependent and independent variables appear in the model. VECM can help finding the causality relationship across dependent and independent variables in the model.

Generally, economic theories explain long-run phenomena. In the long-run there is equilibrium across variables, such as Indonesia's export and import to and from other countries, respectively. However, there might be disequilibrium in the short-run, which causes a shock. The presence of equilibrium in the long-run can be tested using cointegration approach. To detect the presence of shock and its impact on the dynamic of those variables, which may suggest the presence of

causality relationship across variables, VECM can be used.

The co-integration-vector error correction model approach, does not only encompass both in level and in difference of variables in the model which capture the short and long run properties of the model, but also provides an attractive statistical framework and represents the concept of long run relationship between variables. With respect to the theory of co-integration, we need to analyze the time series properties of economic variables. It means that we have to satisfy ourselves whether the underlying data processes are stationary or not. In the case that the variables in question are not stationary and co-integrated series, the regression equations related to time series data are spurious. It means that testing for unit root and co-integration can be considered as a pre-test before making a valid regression.

Testing for co-integration and causality between the two or more variables need two steps of analysis. The first step is to verify the unit root condition or the test for order of integration of the variables since the causality test are valid if the variables have the same order of integration. Macroeconomic time series generally contain unit roots and are dominated by stochastic trends. Unit root tests detect non-stationary that would invalidate standard empirical analysis. Standard test for the presence of unit root among variables based on the work of Dickey and Fuller (1981) is to investigate the degree of integration of the variables used in this empirical analysis. The Akaike information criterion (AIC) determines the optimal backward lag specification. Let, for example, variable of export (X_t) represents the export series for ASEAN-5 countries; the null hypothesis of unit root is tested using the DF t -test. The test statistic, t_s is the usual t -statistic for testing $H_0 : s_1 = 0$ in the following equation:

$$\Delta \log X_t = \sigma_0 + \sigma_1 B \log X_t + \sum_{i=1}^k \theta_i B^i \Delta \log X_t + e_t \tag{1}$$

Where, Δ refers to first difference, B is backward lag operator, and k indicates optimal backward lag based on AIC. The distribution of t_s does not follow a student- t distribution, but its empirical distribution is tabu-

lated by McKinnon (1991). A rejection of the null hypothesis implies that the log export-import data is integrated of order 0, and is therefore stationary.

To allow for the possible presence of deterministic time trend, equation (1) is augmented with time trend component in order test the presence of unit root. So, the equation will be:

$$\Delta \log X_t = \sigma_0 + \sigma_1 T + \sigma_2 B \log X_t + \sum_{i=1}^k \theta_i B^i \Delta \log X_t + e_t \tag{2}$$

The augmented Dicky-Fuller (ADF) t statistic for testing the hypothesis of unit root, $H_0 : s_2 = 0$, is also based on the work of McKinnon (1991). If the null hypothesis of unit root in equation (2) is not rejected, the order of integration of $\log X_t$ could be one or higher. Therefore, we must proceed to test the presence of unit root for $\log X_t$ in the first difference form. The test statistic, t_s , is the usual t -statistic for testing $H_0 : s_1 = 0$ in the following equation:

$$\Delta^2 \log X_t = \sigma_0 + \sigma_1 \Delta B \log X_t + \sum_{i=1}^k \theta_i B^i \Delta^2 \log X_t + e_t \tag{3}$$

A rejection of the null hypothesis implies that the log series is in the degree of integration 1. Furthermore, we can continue with testing co-integration among variables. Given the presence of unit root, the question becomes weather there is some long run equilibrium co-integrating relationship between variables.

The second step is to test the existence of co-integration between variables; meanwhile testing for causality will be used vector error correction model (VECM). According to Engle and Granger (1987), if two variables are integrated of degree I (1) and are co-integrated then either uni-directional or bi-directional Granger causality must exist in at least the I(0) variables. This temporal causality can be captured through the vector error correction model (VECM) derived from the long run co-integrating vectors (Granger, 1988). In this analysis we use the Johansen multivariate procedure (Johansen and Juselius, 1990) for testing the co-integration. The Johansen maximum likelihood allows testing multivariate frameworks and avoids some of the drawbacks of Engle-Granger (1987) co-integration

methodology. Based on the Johansen and Juselius (1990), a VAR model is fitted to the data to find the appropriate lag structure. A VAR model of order p of time series data can be written as follow:

$$\Delta X_t = \pi B^i X_t + \sum_{i=1}^{p-1} \theta_i B^i \Delta X_t + e_t \tag{4}$$

The long run relationship in the data set is captured in the matrix π . The rank of the coefficient matrix π gives the number of co-integrating vectors. This estimation is based on the estimating the π matrix in an unrestricted form, and then test if the restrictions implied by reduced rank of π can be rejected. The rank of π is r , equals the number of co-integrating vectors, which is tested by the maximum eigenvalues (λ_{\max}) and trace statistics. Testing of the null hypothesis of at least r co-integrating vectors against the alternative hypothesis of full rank, based on the likelihood ratio trace test given by (5) and eigenvalue max by (6):

$$Q_r = -N \sum_{i=r+1}^3 \log(1 - \lambda_i) \tag{5}$$

$$\lambda_{\max} = -N \log(1 - \lambda_i) \tag{6}$$

Where $r = 0, 2, 3$ and λ_i is the i -th largest eigenvalue. The critical values of these statistics are obtained from Osterwald-Lenun (1992). The AIC is also used to determine the optimum lag (p) of equation (4). If the rank of π equals to zero or p ($r = 0$ or $r = p$), co-integration does not exist. So, co-integration only occurs in the condition of $0 < r < p$.

This analysis involves utilization of the VECM modelling and testing for causality relationship between export and import for ASEAN-5. Engle and Granger (1987) exhibit that in the presence of the co-integration, there always exists a corresponding error correction representation which implies that the change in dependent variable are a function of the level of disequilibria in the co-integrating relationship, captured by error correction term (ECT), as well as changes in explanatory variables. Thus, through ECT and VECM modelling establishes an additional way to examine the causality. In the same way, we will develop the model, which has an explanatory variable and error correction

term (ECT) obtained from co-integration equation. The use of VECM is not only to get a valid regression, but also to explain the effect of government expenditure on output in short run phenomena for each country. After that, we also use impulse response analysis to capture dynamic interactions and speed of adjustments. In a simple model, the steps of causality analysis between export (EX) and import (IM) using VECM dynamic regression are developed as follow.

$$\Delta EX_t = \beta_{11} + \beta_{12}\Delta IM_{t-1} + \dots + \beta_{1i}\Delta IM_{t-i} + \gamma_{11}\Delta EX_{t-1} + \dots + \gamma_{1i}\Delta EX_{t-i} + \sigma_1 ECT_{1t} + v_t \tag{7}$$

$$\Delta IM_t = \beta_{21} + \beta_{22}\Delta IM_{t-1} + \dots + \beta_{2i}\Delta IM_{t-i} + \gamma_{21}\Delta EX_{t-1} + \dots + \gamma_{2i}\Delta EX_{t-i} + \sigma_2 ECT_{2t} + v_t \tag{8}$$

RESULTS AND DISCUSSION

This section applies the aforementioned methods on ASEAN-5 countries, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Singapore, to explore the nature of trade among them. The analysis is conducted using cointegration and vector-error correction model (VECM). The paper uses export-import monthly data for the period of 2007-2009 measured in USD. The data are obtained from various series of annual report of International Financial Statistics. All the data are transformed to logarithm. The movement of the data throughout the year are then depicted in Figures 1 and 2.

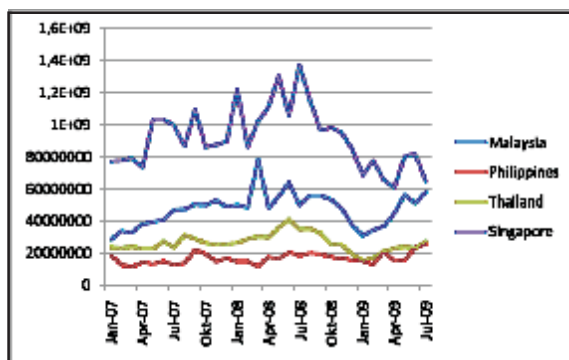


Figure 1
Indonesia's export to Selected Asian Countries (USD)

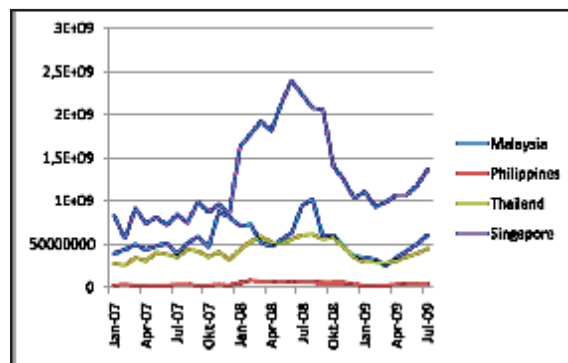


Figure 2
Indonesian Import from Selected Asian Countries (USD)

The results of unit root tests of the data series with and without time trend are presented in Table 1. The null hypothesis of unit root on the level cannot be rejected for all data series even at 10% level of significance. In contrast, the null hypothesis of unit root on the first difference can be rejected for all data series at least at 10% level of significance. It indicates that these series are all stationary and hence I (1).

Due to the Engle-Granger representation theorem (1987), cointegration test will be valid if a set of series data is stationary and has the same degree of integration. The cointegration test, therefore applied on these series and the results are reported in table 10. With Johansen procedure and optimum lag based on Akaike's criterion, the paper found 1 cointegrating vector for the variable export from Indonesia to Thailand, Singapore, Malaysia and Philippines. A cointegrating vector for the variable of Indonesia's Import from Thailand, Singapore, Malaysia and Philippines is also evidenced (Table 2).

From the empirical cointegration analysis, the result shows a long run relationship between export variables and import in these five countries. It also indicates that export will be effective in supporting import growth. These findings imply that vector error correction should be applied for Granger causality analysis. Granger (1988) points out that if a set of data series is cointegrated; it implies statistical causality in at least one direction. Furthermore, we need to analyze causality relationship using vector error correction approach.

Table 1
ADF Unit Root Test

Asean-4 Countries	Indonesia to/from	Level	First Difference
		ADF	ADF
Singapore	Export	-1.247 (1)	-3.409 (2) ***
	Import	-1.276 (1)	-3.362 (2) ***
Malaysia	Export	-1.821 (1)	-3.983 (1) ***
	Import	-0.951 (1)	-3.8449 (1) ***
Thailand	Export	-2.147 (1)	-3.594 (1) ***
	Import	-2.129 (1)	-3.611 (1) ***
Philippines	Export	-1.482 (1)	-3.788 (2) **
	Import	-1.667 (1)	-3.867 (1) **

Note:

- 1) *, **, *** indicate 1, 5 and 10 percent level of significances, respectively.
- 2) Entries in parentheses indicate optimum lag based on AIC.

Table 2
Cointegration Test of Export-Import

Indonesia-Malaysia (VAR lag = 3)				
Null Hypotheses	λ - max	λ - max (5%)	Trace	Trace (5%)
Ho : r = 0	19.713*	17.89	32.216*	24.31
Ho : r ≤ 1	8.512	11.44	10.523	12.53
Indonesia-Thailand (VAR lag = 2)				
Null Hypotheses	λ - max	λ - max (5%)	Trace	Trace (5%)
Ho : r = 0	6.523	17.89	34.523*	24.31
Ho : r ≤ 1	17.231	11.44	10.112	12.53
Indonesia-Philippines (VAR lag = 3)				
Null Hypotheses	λ - max	λ - max (5%)	Trace	Trace (5%)
Ho : r = 0	18.776*	17.89	30.986*	24.31
Ho : r ≤ 1	9.552	11.44	11.443	12.53
Indonesia-Singapore (VAR lag = 3)				
Null Hypotheses	λ - max	λ - max (5%)	Trace	Trace (5%)
Ho : r = 0	21.233*	17.89	30.886*	24.31
Ho : r ≤ 1	11.412	11.44	11.523	12.53

Note: * indicates 5 percent level of significance.

The result of empirical causality test is reported in Table 3. The result shows that the coefficients of ECT in the model of Indonesia's export to the other countries in the model are statistically significant, except the coefficient of ECT to Thailand. The significance of those coefficients suggests the presence of disequilibrium in the short-run of the export from Indonesia to Malaysia, Philippines, and Singapore, which may also, suggests the tendency of the presence of shock in the short-run.

The coefficient of ECT in the model of Indonesia's import from the other countries in the model is not statistically significant, except the coefficient of ECT from Philippines. This suggests the absence of shock in the short-run (month-to-month adjustment) of the Indonesia's import from from Malaysia, Thailand, and Singapore. Indonesia's import from Philippines exhibits high level of dynamics, which needs month-to-month adjustment.

To summarize, there is disequilibrium of Indonesia's export to the rest of ASEAN-5 countries, signalled by the monthly adjustment. In addition, there is a tendency of the increase in Indonesia's import from the rest of ASEAN-5, while Indonesia's export experienced shocks, along with the decrease in its magnitude from year 2007 to 2009. It might be inferred that there is deterioration in Indonesia's export performance compares to the rest of ASEAN-5.

Table 4
Summary of Empirical Vector Error Correction Model Causality Test

Null Hypotheses	Results
Indonesia and Malaysia:	
Export does not Cause Import	Rejected *
Import does not Cause Export	Accepted
Indonesia and Thailand:	
Export does not Cause Import	Rejected *
Import does not Cause Export	Accepted
Indonesia and Philippines:	
Export does not Cause Import	Accepted
Import does not Cause Export	Accepted
Indonesia and Singapore:	
Export does not Cause Import	Rejected *
Import does not Cause Export	Accepted

Notes:

- 1) DLX is difference level of X
- 2) * indicates 5% level of significances of *F* statistic

Table 4 summarizes the empirical results of causality test based on vector error correction (VECM) approach. The analysis of Indonesia trade with the rest of ASEAN-5 countries shows unidirectional causality, that is, export causes import while there is no reversal causal relationship.

Table 3
VECM Causality Test of Export-Import Indonesia to/from ASEAN-4

Indonesia to/from	Dependent Variable	Intercept	F Statistic of Restriction Test		ECT Coefficient
			Δ Export	Δ Import	
Malaysia	Δ Export	234.514(1.414)	-	0.024(3.344)	0.128(3.547)*
	Δ Import	453.810(0.233)	1.217(1.036)	-	0.056(1.427)
Thailand	Δ Export	134.614(1.284)	-	0.234(3.334)*	0.068(1.147)
	Δ Import	123.670(0.329)	1.217(1.016)	-	0.056(1.927)
Philippines	Δ Export	786.514(1.214)	-	0.024(3.344)*	0.268(3.147)*
	Δ Import	435.810(0.323)	1.417(1.216)	-	0.356(2.927)*
Singapore	Δ Export	532.534(1.234)	-	0.214(0.222)	0.348(3.147)*
	Δ Import	224.210(0.327)	0.432(0.234)	-	0.356(1.327)

Notes:

- 1) $\Delta X = (X_t) - (X_{t-1})$
- 2) Entries in parenthesis are the t statistics
- 3) * indicates 5 percent level of significance

From the data presented above, one can observe that an increase in export will eventually attract import from the same country with a higher amount. The results also show that Indonesia experienced the lost of competitiveness in the world market against those countries. This gives a picture of future position of Indonesia trade balance against those countries. This phenomenon suggests that prudential trade policy should be preferable.

As predicted, trade will flow from countries with higher efficiency to those with lower efficiency. From the empirical ground we need to see whether Indonesia has lower efficiency that it loss its competitiveness relative to the other countries. To see this, this paper uses business efficiency index as the proxy to efficiency. This proxy provides an early indicator of the production efficiency. To see the production efficiency one need to make a special research on it.

Looking at the index one might find that Indonesia is among the low rank in Asian selected countries. We may say that the trade is flowing from country with higher efficiency to the lower one, which supports the aforementioned model. Moreover, there is a need to compare the aforementioned model and the gravity model since their prediction is somewhat different. According to gravity model, the trade flow will be determined by the distance of both economies. The farther the position of two economies is the weaker the trade "gravity" between them which, accordingly, causes a lower magnitude of trade between them. This model poses a hidden assumption that the transportation cost matters. The real situation may depart from this prediction due to the high magnitude of efficiency.

CONCLUSION

International trade has played an important role in gross domestic product construction, and showed a positive trend in some ASEAN countries in the last five years such as in Singapore and Thailand. However, a country such as Indonesia did not enjoy such situation. This paper constructs a model of Indonesian trade policy strategy to increase export through the dynamic change in export market share in ASEAN countries, and through speed adjustment in export commodities. Based on vector error correction (VECM) approach, it can be inferred that Indonesian trade with these four

countries showed unidirectional causality, hence export caused import while there was no reversal causal relationship. The results also suggest that Indonesia was experiencing the lost of competitiveness in the world market against those countries. This phenomenon suggests that prudential trade policy should be preferable. It can be concluded that Indonesia was the countries which has low performance in terms of international trade. It was therefore crucial to construct a policy strategy to increase export through the dynamic change in export market share, and to improve the commodity competitiveness in ASEAN countries.

ACKNOWLEDGEMENT

The authors acknowledge the funds from Directorate General of Higher Education, Department of Education, Republic of Indonesia, based on the Act 672/SP2H/DP2M/V/2009, for International Publication Research Grand, 30 July 2009

REFERENCES

- Dicky, D.A, and W.A. Fuller. 1981. "The Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root". *Econometrica*. pp. 1057-1072.
- Engle, R.F. and C.W.J. Granger. 1987. "Cointegration and Error Correction Representation, Estimation and Testing". *Econometrica*. pp. 251-276.
- Granger, C.W.J. 1988. "Developments in Concept of Causality". *Journal of Econometrics*. pp.199-211.
- Hakim, A. and M. McAleer. 2008. Modelling the Interactions Across International Stock, Bond and Foreign Exchange Markets to appear in *Applied Economics*.
- Hakim, A. and M. McAleer. 2009. "Forecasting Conditional Correlations in Stock, Bond and Foreign Exchange Markets". *Mathematics and Computers in Simulations*. pp. 2830-2846.

Johansen, S. 1991. "Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models". *Econometrica*. pp. 424-438.

Johansen, S. and K. Juselius. 1990. "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration with Application to the Demand for Money". *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. pp. 169-220.

Juswanto, W. and P. Mulyati. 2006. "Indonesia's Manufactured Exports: A Constant Market shares Analysis". *Journal of Monetary and Finance*. (2): pp. 97-106.

McKinnon, J. 1991. *Critical Values for Cointegration Tests in Long Run Economic Relationships*. In *Reading in Cointegration* (eds Engle R. and Granger, C.W.J.) Oxford University Press.

Misanam, M., J. Sriyana, and R.P. Santoso. 2009. The Ummah Factor, Financial Crisis and OIC Economic Cooperation, *International Economic Roundtable Discourse*, Faculty of Economics and Business, University Kebangsaan Malaysia.

Osterwald-Lenum, M. 1992. "A note with Quartiles of the Asymptotic Distribution of The Maximum Likelihood of Cointegration Rank Statistic". *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*. pp. 461-471.

Ricardo, D. 1817. *On the Principle of Political Economy and Taxation*, London

Smith, A. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*, London

Vernon, R. 1966. "International Investment and International Trade in the Product Cycle". *Quarterly Journal of Economics*, 197-207.

ESTIMASI HARGA PREMI PENJAMINAN SIMPANAN WAJAR BAGI IDIC DENGAN MODEL RISIKO KREDIT ¹

Firman Pribadi

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Bantul 55183
Telepon +62 274 387656, Fax. +62 274 387646

Suad Husnan

Mamduh M. Hanafi

Eduardus Tandelilin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Jalan Humaniora Nomor 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 548510 – 548515, Fax. +62 274 563212
E-mail: tandelilin@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) was introduced in 2005 to replace implicit or blanket guarantee system. Currently IDIC uses flat rate insurance premium. Theoretically, the use of flat rate system may induce moral hazard behavior among Indonesian banks, subsidy from low risk banks to high risk banks, and increase insolvency risk for IDIC if bank rush occurs. This paper attempts to calculate fair insurance premium rate (floating rate) as an alternative to flat rate insurance premium. The floating rate can be expected to reduce moral hazard potential and to reflect more realistic economic condition faced by IDIC. We use Credit Risk Value at Risk model with Monte-Carlo simulation to calculate the fair insurance premium. Using 23 public banks in Indonesia, we find several empirical findings. First, default density function is skewed to the right, suggesting high systematic risk in Indonesia. Second, IDIC economic capital seems to be lower than 'theoretical' capital calculated using floating rate in-

surance premium. Third, in line with second finding, the amount of current insurance premium collected by IDIC seems to be lower than the 'theoretical' amount calculated using floating rate premium. Our model produces different insurance premium for banks, depending on banks' risks. Our model also takes account larger exposure to IDIC from larger banks.

Keywords: deposit insurance corporation, flat rate insurance premium, fair rate insurance premium, moral hazard, credit risk

JEL Classification: G21

PENDAHULUAN

Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) didirikan pada tanggal 25 April 2005 untuk mengganti kebijakan *blanket guarantee* (Penjaminan Simpanan

¹ Terima kasih kepada Prof. Andrea Sironi atas bantuannya baik teori maupun teknis.

implisit) sebelumnya. Saat ini, IDIC menetapkan premi sebesar 0,1% dari dana pihak ke tiga yang dibayarkan setiap semester (2 kali dalam setahun). Penerapan sistem premi tarip tetap oleh IDIC berpotensi memicu *moral hazard*, subsidi dari bank yang mempunyai risiko rendah kepada bank yang mempunyai risiko tinggi dan insolvensi lembaga ini jika terjadi tekanan penarikan dana secara masif atau *bank rush* oleh deposan pada bank yang tidak sehat.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan memunculkan kontroversi, yaitu *stability argument* (Swidler dan Wilcox, 2002) di satu sisi, dan *risk taking argument* di sisi lainnya. Sejarah seperti ini menunjukkan bahwa penjaminan simpanan secara efektif dapat mencegah timbulnya *bank rush* dan panik yang membuat stabilitas sistem moneter dan kredit terjaga. Namun potensi *moral hazard* dari penjaminan tersebut perlu diminimalkan. Salah satu mekanisme yang bisa digunakan adalah premi yang bersifat variabel tergantung dari profil risiko bank.

Penelitian ini bertujuan menghitung premi berbasis risiko dengan menggunakan model risiko kredit. Berdasarkan premi yang wajar tersebut, dengan menggunakan kerangka *Value at Risk* (VAR), penelitian ini juga akan menghitung modal minimal yang dibutuhkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), jika terjadi bank *rush* di Indonesia. Premi asuransi deposito berbasis risiko merupakan premi yang wajar yang diharapkan dapat mencegah *moral hazard* perbankan karena munculnya asuransi deposito.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Untuk menghitung kapital ekonomik dan premi wajar asuransi deposito, penelitian ini melakukan beberapa tahapan. Pertama, penelitian mengaplikasikan model risiko kredit² yang kemudian dijadikan dasar untuk pemodelan distribusi rugi *Expected Default Frequency* (EDF). Setelah EDF dirumuskan, penelitian ini selanjutnya menghitung rugi harapan dan rugi kejutan. Untuk menghitung kapital ekonomik LPS, diperlukan

perhitungan EDF dalam konteks portofolio. Dalam konteks portofolio, disamping risiko gagal individual, korelasi gagal antar bank penting diperhatikan. Setelah EDF untuk portofolio dapat dirumuskan, kapital ekonomik dapat dihitung dengan memasukkan eksposur setiap bank dan *loss given default*. Perhitungan kapital ekonomi dilakukan menggunakan simulasi *Monte-Carlo* sebanyak 50.000 kali. Bagian berikut ini *mereview* secara singkat beberapa teknik dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini.

Distribusi rugi dapat digunakan untuk membentuk interval kerugian dalam kerangka VaR dari IDIC. Guna distribusi rugi adalah untuk menentukan kapital ekonomik yang tepat. Secara konsep kapital ekonomik adalah cadangan ekuiti atau modal yang ditujukan untuk melindungi IDIC terhadap rugi kejutan yang tidak diharapkan yang akan terjadi di masa yang akan datang pada tingkat keyakinan yang telah dipilih. Secara khusus kapital ekonomik dapat didefinisikan sebagai rugi maksimal dikurangi rugi harapan. Rugi maksimal adalah hasil dari rugi kejutan dikali pengali modal, sehingga kapital ekonomik terkadang diacu pula sebagai bentuk dari hasil perkalian ini. Pengali modal merupakan jarak antara *expected outcome* dan interval keyakinan yang dipilih. Di sisi lain Kuritzkes *et al.* (2002) menyatakan bahwa kapital ekonomik menunjukkan jarak antara rugi harapan dan titik kritis. Jarak antara rugi harapan dan titik kritis ini menunjukkan berapa cadangan dana atau modal atau kapital ekonomik yang harus dimiliki untuk menjaga tingkat solvensi yang diinginkan yang biasanya dinyatakan dalam interval keyakinan atau probabilitas ekor.

Berdasarkan distribusi rugi, kita bisa menghitung rugi harapan (EL) dan rugi kejutan (UL).³ Rugi harapan portofolio (EL_p) dan rugi kejutan portofolio (UL_p) ini selanjutnya digunakan untuk menghitung level kapital ekonomik yang tepat dan dasar untuk menentukan harga premi Penjaminan Simpanan wajar. Penentuan kapital ekonomik dilakukan dengan mengali rugi kejutan portofolio dengan pengali modal (CM) dikurangi rugi harapan portofolio (EL_p). Oleh

² Model risiko kredit merupakan alternatif untuk menghitung premi berbasis risiko bank.

³ Rugi harapan (EL) sama dengan *mean* dari distribusi rugi, yaitu jumlah kerugian yang diharapkan akan dialami dalam portofolio IDIC dalam horison waktu yang telah ditetapkan. Rugi kejutan (UL) merupakan deviasi standar dari distribusi rugi.

karena jumlah kontribusi rugi kejutan individual (ULC_i) sama dengan rugi kejutan portofolio (UL_p) maka kapital ekonomik yang dibutuhkan dapat pula dikaitkan pada level transaksi individual. Kapital ekonomik portofolio = $UL_p \cdot CM - EL_p$ dan pada level individual kapital ekonomik individual = $ULC_i \cdot CM - EL_i$

Probabilitas gagal riil atau EDF riil tidak dapat diobservasi secara langsung, maka untuk mendapatkan EDF riil ini dilakukan dengan mengobservasi probabilitas gagal *risk neutral* terlebih dahulu dengan formula sebagai berikut:

$$N(d_2) = N \left[\frac{\ln\left(\frac{V}{D}\right) - \left(\mu_v - \frac{\sigma_v^2}{2}\right)T}{\sigma_v \sqrt{T}} \right] \quad (1)$$

Untuk menghitung EDF riil perlu ditentukan variabel-variabel berikut terlebih dahulu 1) nilai aset (V); 2) volatilitas nilai aset (σ_v); dan 3) *drift* nilai aset (i_v). Volatilitas ekuiti dapat diestimasi melalui Ito's Lemma berikut:

$$\sigma_E E_0 = \frac{\partial E}{\partial V} \sigma_v V_0 \quad (2)$$

$$\sigma_E E_0 = N(d_1) \sigma_v V_0 \quad (3)$$

Nilai E_0 dapat diamati jika bank mempedagangkan sahamnya kepada publik. Untuk memecahkan sistem dua persamaan non linear dari persamaan (2) dan (3) digunakan algoritma Newton Rhapsion dengan bentuk $f(x,y) = 0$ dan $G(x,y) = 0$ guna mendapatkan nilai dua variabel yang tidak diketahui yaitu nilai pasar aset (V) dan volatilitas aset (σ_v).

Selanjutnya, dalam penelitian ini perioda maturitas (T) diasumsikan sama dengan 1 tahun dengan tujuan agar EDF dapat diestimasi dalam bentuk tahunan dan notasi D menunjukkan titik gagal. Titik gagal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai jumlah utang jangka pendek dan separuh utang jangka panjang. Utang

jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo atau akan dibayarkan kembali dalam waktu satu tahun dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun dilakukannya penelitian. Utang jangka panjang adalah perbedaan antara total utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Untuk tingkat bebas risiko (r) akan digunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 30 hari. *Drift* nilai aset diestimasi dengan menggunakan model CAPM.

Eksposur dalam penelitian ini adalah total dana pihak ketiga bank yang dijamin oleh Penjaminan Simpanan. Rugi Berian Gagal LGD) diasumsikan 30%.⁴

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya ini terletak pada model probabilitas gagal. Penelitian ini menggunakan model probabilitas gagal Farnen et al. (2004) dan KMV yang dapat dilihat Crosby (2003) dan Arora et al. (2005) yang mendasarkan modelnya pada model matriks korelasi aset yang mirip dengan model *credit metrix*TM. Dalam pengembangan model empiris ini akan dilakukan dua tahap analisis. Tahap pertama adalah pengestimasian probabilitas gagal individual bank dan pengestimasian distribusi probabilitas rugi portofolio.

Untuk portofolio, penelitian ini memodelkan ketergantungan dan interaksi dari individual-individual mitra pada level portofolio dengan simulasi Monte Carlo untuk menghasilkan distribusi rugi dan mendapatkan skenario rugi yang berbeda dan level persentil yang diinginkan. Tahapan simulai Monte Carlo ini adalah 1) mencari matriks korelasi aset; 2) meng-*generate* angka random korelasi dengan memfaktorisasi matrik korelasi *return* aset dengan *Cholesky Decomposition*; 3) menentukan ambang batas gagal untuk setiap bank; 4) memberikan nilai 0 atau 1 dari variabel random Bernaulli (D_i) dengan kriteria: angka random korelasi > dari ambang batas gagal = 0 (bank tidak masuk kriteria gagal); angka random korelasi < ambang batas gagal = 1 (bank masuk kriteria gagal); 5) mengestimasi jumlah total rugi yang terjadi dalam siklus; dan 6) membuat histogram frekuensi dengan menjumlah keluaran simulasi. Penentuan premi Penjaminan Simpanan wajar dalam penelitian ini akan ditentukan berdasarkan pada bentuk persamaan berikut:

⁴ Nilai 30% ini berdasarkan pengalaman historis BPPN dan nilai ini juga digunakan oleh IDIC untuk menentukan tingkat pemulihan jika terjadi bank gagal.

$$FP_i = EL_i + R_{premium} * VaR \quad (4)$$

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampel 23 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2005.⁵ Nilai aset sampel mencakup 70% lebih dari total aset yang ada dalam sistem perbankan di Indonesia untuk tahun 2005 ini. Data perbankan tahun 2005 menunjukkan bahwa di Indonesia, total aset seluruh bank berjumlah Rp1.469,8 triliun, total dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.133,6 triliun, total rekening perbankan berjumlah 84.759.840 rekening. Berdasarkan data tersebut total nilai aset untuk sampel 23 bank sebesar Rp1.046,2 triliun akan mewakili 71,2% dari seluruh aset perbankan. Total dana pihak ketiga sebesar Rp828,1 triliun akan mewakili 73,1% dari seluruh dana pihak ketiga. Jumlah eksposur sebesar Rp214,8

triliun untuk nilai penjaminan maksimal Rp100 juta akan mewakili 19% dari seluruh dana pihak ketiga, dan akan mewakili 82% rekening dari seluruh rekening dana pihak ketiga.

Untuk perhitungan premi penjaminan simpanan wajar dalam penelitian ini akan digunakan eksposur sebesar Rp100 juta⁶. Tingkat pemulihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30% sebagai tingkat pemulihan yang digunakan oleh IDIC⁷. Tabel 1 kolom 2 dan 3 berikut melaporkan statistik deskriptif dari *return* dan volatiliti ekuiti bulanan dari bank-bank sampel untuk periode januari 2000 – desember 2005. Seluruh data diestimasi dengan basis bulanan yang dijadikan tahunan dengan mengalikan mean dengan 12 dan standar deviasi dengan $\sqrt{12}$. Standar deviasi ini akan menjadi input penting bagi model probabilitas default sebagai input bagi penentuan volatilitas aset (σ_v).

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian, Tahun 2005

Bank	Return	Standar Deviasi Return	Nilai Pasar Ekuitas	Volatilitas Ekuitas (σ_E)	Liabilitas Bank (Nilai total Kewajiban Bank)	Titik Gagal
1	2	3	4	5	6	7
Rata-rata	-0.0007	0.4582	8.4697	0.4764	41.1437	38.8132
Median	-0.0080	0.4530	3.1610	0.4530	17.9910	17.1350
Standar Deviasi	0.2365	0.2481	12.5840	0.1108	59.6305	56.2777
Minimum	-0.4370	-0.3570	0.0600	0.3250	0.8140	0.8090
Maksimum	0.5080	1.0440	41.4730	0.7770	240.1640	229.8640

⁵ Data masih memasukan beberapa bank yang saat ini mungkin sudah tidak ada yang disebabkan oleh beberapa hal seperti merger.

⁶ Per tanggal 13 Oktober 2008 dana pihak ketiga yang dijamin IDIC dinaikan menjadi sebesar maksimal Rp2 milyar rupiah per rekening.

⁷ Hasil wawancara dengan ketua eksekutif IDIC untuk *recovery rate* ini IDIC mengacu pada *recovery rate* BPPN. Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) atau BPPN mengharapkan *recovery rate* atas aset bermasalah sebesar 38%, namun yang berhasil masuk kurang dari yang ditargetkan.

Tabel 1 kolom 4 hingga 7 menunjukkan input-input bagi perhitungan EDF *risk neutral*. Tabel 2 kolom 2 hingga 6 menyajikan Nilai pasar aset (V_0) dan Nilai risiko aset ($\hat{\sigma}_v$) yang diestimasi dengan model Merton, nilai EDF *risk neutral* (EDF RN) mengacu persamaan (1). *Drift equity* yang dihitung berdasarkan model CAPM (). Proksi nilai *risk free* yang digunakan adalah nilai rata-rata SBI 30 hari, dengan nilai rata-rata 0,115 untuk tahun 2005. Untuk nilai *return* pasar digunakan nilai *return* IHSG bulanan dengan nilai 0,12 untuk tahun 2005.

Setelah evaluasi variabel-variabel risiko pada basis individual telah selesai maka risiko portofolio dan penentuan harga premi deposito asuransi yang wajar dapat diestimasi. Pada level portofolio, dependensi (korelasi) antara individual bank menjadi hal penting. Oleh karena itu, korelasi gagal menjadi penting untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya gagal gabungan dari bank yang menjadi mitra IDIC. Penelitian ini menggunakan koefisien korelasi aset dan gagal untuk mengestimasi rugi kejutan portofolio dana asuransi. Koefisien korelasi aset selanjutnya akan digunakan untuk meng-generate distribusi empirik rugi portofolio

Tabel 2
Nilai Pasar Aset (V_0), Nilai Risiko Aset ($\hat{\sigma}_v$), Nilai EDF Risk Neutral (EDF RN), Beta, Drift Equity, Delta, Gamma, Teta, Drift Asset, dan EFF Riil

Bank	V_0	$\hat{\sigma}_v$	EDFRN	Beta	driftequity	Delta	Gamma	Teta	drift asset	EDF Riil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ANKB	1,11	0,07	0,01%	0,164	0,116	0,9999	0,004	-0,098	0,105	0,02%
BABP	3,90	0,02	0,05%	0,367	0,117	0,9995	0,021	-0,420	0,115	0,05%
BBCA	161,21	0,10	0,14%	0,675	0,118	0,9990	0,000	-13,693	0,115	0,14%
BBIA	17,75	0,11	0,03%	0,093	0,115	0,9998	0,000	-1,389	0,113	0,03%
BBNI	137,84	0,07	0,0002%	1,236	0,121	1,0000	0,000	-11,433	0,098	0,001%
BBNP	2,50	0,02	0,63%	0,171	0,116	0,9989	0,363	-0,272	0,115	0,64%
BBRI	133,57	0,11	0,13%	1,488	0,122	0,9991	0,000	-10,959	0,115	0,13%
BCIC	12,90	0,05	1,16%	0,496	0,117	0,9898	0,042	-1,316	0,115	1,15%
BDMN	75,66	0,16	0,35%	1,088	0,120	0,9979	0,001	-5,600	0,110	0,38%
BEKS	1,27	0,02	0,50%	1,016	0,120	0,9953	0,542	-0,138	0,115	0,51%
BKSW	1,46	0,07	2,14%	0,215	0,116	0,9819	0,435	-0,145	0,115	2,12%
BMRI	246,77	0,05	0,01%	1,319	0,122	0,9999	0,000	-23,562	0,112	0,01%
BNGA	36,67	0,05	0,001%	0,628	0,118	1,0000	0,000	-3,379	0,102	0,002%
BNII	46,48	0,10	2,12%	0,837	0,119	0,9832	0,009	-4,375	0,113	2,23%
BNLI	33,70	0,11	4,25%	0,926	0,120	0,9662	0,021	-3,213	0,115	4,24%
BSWD	0,85	0,05	0,05%	0,208	0,116	0,9995	0,039	-0,083	0,115	0,05%
BVIC	1,84	0,03	2,87%	0,626	0,118	0,9732	1,123	-0,196	0,115	2,87%
INPC	10,36	0,12	7,90%	0,544	0,118	0,9372	0,099	-0,996	0,113	8,16%
LPBN	29,33	0,10	0,54%	0,990	0,120	0,9960	0,004	-2,604	0,112	0,58%
MAYA	2,67	0,03	0,01%	0,131	0,116	0,9999	0,003	-0,274	0,109	0,02%
MEGA	24,14	0,04	0,05%	0,284	0,116	0,9996	0,002	-2,430	0,115	0,05%
NISP	19,80	0,08	0,07%	0,927	0,120	0,9995	0,001	-1,757	0,112	0,08%
PNBN	35,22	0,11	1,81%	1,478	0,122	0,9863	0,009	-3,207	0,114	1,85%
Nilai Rata-rata									2,577	0,253

Sumber: Data IDIC, diolah.

yang dilakukan melalui simulasi Monte Carlo. Berdasarkan model yang mirip CreditMetrics™ maka korelasi aset dapat diestimasi. Hasil estimasi korelasi aset untuk tahun 2005 menunjukkan nilai kisar korelasi terendah sebesar 8% dan tertinggi sebesar 82%.

Hasil estimasi korelasi *return* aset selanjutnya digunakan untuk mengestimasi korelasi gagal tahun 2005. Kisaran nilai koefisien korelasi gagal antara 0% (terendah) sampai dengan 41,4% (tertinggi), dengan rata-rata sebesar 5%. Berdasarkan nilai rata-rata korelasi aset dan korelasi gagal ini maka rasio antara rata-rata koefisien korelasi *return* aset dan korelasi gagal adalah sebesar 8% untuk tahun 2005.

Tabel 3 menunjukkan distribusi rugi atau fungsi densitas probabilitas tahun 2005 yang dihasilkan melalui simulasi Monte Carlo yang mengikuti prosedur Sironi dan Zazzara (2004), dengan simulasi sebanyak lima puluh ribu kali. Sejalan dengan proposal *Basel Committee on Banking Supervision for the New Capital Requirements* maka penelitian ini menggunakan level persentil 99,90%. Pada level persentil ini rugi maksimal untuk nilai penjaminan maksimal Rp100 juta per rekening dari 23 bank untuk tahun 2005 adalah sebesar Rp51,71 triliun

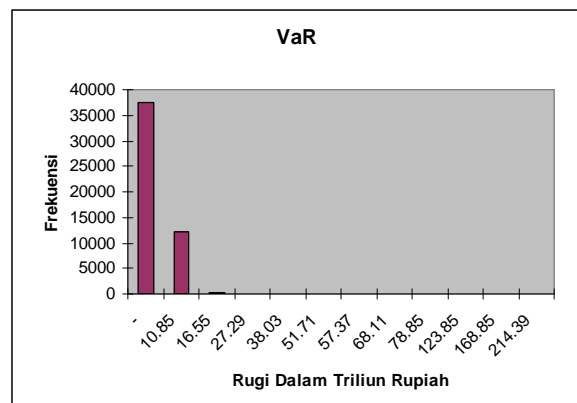
Tabel 3
Distribusi Rugi (Fungsi Densitas Probabilitas), Tahun 2005

Histogram, Distribusi Rugi			
Rugi	Frekuensi	Persentil	Kumulatif
-	37406	74,81%	74,81%
10,85	12095	24,19%	99,00%
16,55	280	0,56%	99,56%
27,29	93	0,19%	99,75%
38,03	2	0,00%	99,75%
51,71	76,	0,15%	99,90%
57,37	25	0,05%	99,95%
68,11	20	0,04%	99,99%
78,85	1	0,00%	100,00%
123,85	2	0,00%	100,00%
168,85	0	0,00%	100,00%
214,39	0	0,00%	100,00%
	50.000	100,00%	

Sumber: Data IDIC, diolah.

Gambar 1 menunjukkan gambar distribusi rugi atau fungsi densitas probabilitas dari IDIC untuk tahun 2005 berbentuk menceng ke kanan, yaitu ke arah rugi yang semakin membesar. Karenanya IDIC akan menghadapi situasi, dimana pada satu waktu tertentu IDIC akan mempunyai probabilitas yang tinggi untuk kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan bank-bank kecil. Sebaliknya, mempunyai probabilitas yang rendah untuk kerugian yang ditimbulkan dari kegagalan bank besar atau sejumlah kegagalan bank secara bersamaan. Selanjutnya bentuk menceng ke kanan ini juga menunjukkan bahwa jika probabilitas gagal satu bank meningkat maka kemungkinan bank-bank lain akan gagal juga ikut meningkat.

Gambar 1
Densitas Probabilitas atau distribusi rugi tahun 2005



Sumber: Data IDIC, diolah.

Tabel 4 menunjukkan nilai rugi maksimal dari hasil keluaran simulasi Monte Carlo dengan level keyakinan 99,90%. Tabel 4 menunjukkan bahwa pada interval keyakinan 99,90%, jumlah rugi maksimal portofolio untuk tahun 2005 sebesar Rp51,71 triliun dikurangi dengan rugi harapan portofolio (EL_p) sebesar Rp0,217 akan menghasilkan VaR portofolio sebesar Rp 51,49 triliun. Nilai Rp51,49 triliun ini mewakili 24% dari total eksposur IDIC yang berasal dari 23 bank (Rp214,8 triliun). Nilai Rp51,49 triliun merupakan kapital ekonomik atau cadangan dana klaim penjaminan yang seharusnya dimiliki oleh IDIC terkait dengan risiko kredit dari Penjaminan Simpanan IDIC masing-masing untuk

Tabel 4
Nilai Rugi Maksimal dan VaR dengan Simulasi Monte Carlo

Tahun	Interval keyakinan	Rugi Harapan	Rugi Kejutan	Rugi Maksimal	VaR	Pengali Modal
2005	99,90%	0,217	1,004	51,71	51,49	51,53

Sumber: Data IDIC, diolah.

tahun 2005. Nilai-nilai cadangan klaim ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cadangan klaim yang ditargetkan oleh IDIC sebesar 0,5% dari total jumlah dana pihak ketiga yang ada di sistem perbankan. Hal ini mengindikasikan bahwa IDIC secara signifikan mengalami modal kurang terhadap risiko kredit dari portofolio Penjaminan Simpanan IDIC.

Berdasarkan perhitungan risiko pada level portofolio maka rugi kejutan portofolio (UL_p) dapat diestimasi dengan persamaan sebagai berikut:

$$UL_p = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \rho_{i,j} \cdot UL_i \cdot UL_j} \quad (5)$$

Hasil estimasi rugi kejutan portofolio (UL_p) ini menunjukkan nilai sebesar Rp1,004 triliun untuk tahun 2005. Karena rugi portofolio dapat diekspresikan sebagai jumlah dari rugi kejutan marjinal (ULC_i) sebagai eksposur individual dalam portofolio, maka rugi kejutan marjinal inipun dapat diestimasi seperti yang tampak pada Tabel 5. Tabel tersebut juga menunjukkan hasil estimasi harga premi yang wajar tersebut untuk tahun 2005.

Berdasarkan Tabel 5 tampak bahwa kapital pelindung atau cadangan klaim yang ditentukan dengan rugi harapan (EL_p) terlalu kecil. Penentuan cadangan klaim yang ditentukan terhadap rugi kejutan (UL_p) walaupun tampak mempunyai nilai yang lebih

Tabel 5
Premi Penjaminan Simpanan wajar untuk tahun 2005 yang dihitung berdasarkan model risiko kredit penelitian. Harga premi Penjaminan Simpanan wajar ini dihasilkan melalui persamaan,

Bank	Ekposur (1)	EDF Riil (2)	EL (3)	UL (4)	ULCi (5)	Pricing (6) (3)+(5*10)	Pricing (7)(5* (%))	Rugi maksimal (8) = Pengali Modal)	VaR (9) = (8)-(3)	Premi Resiko (10)	Harga Premi (11)= (3)+(9* 10)	Harga Premi (12) (%)
ANKB	0,144	0,02%	0,00001	0,001	0,00001	0,00001	0,01%	0,0003	0,0003	0,002	0,00001	0,01%
BABP	0,508	0,05%	0,00008	0,003	0,0005	0,00008	0,02%	0,0260	0,0259	0,002	0,00013	0,03%
BBCA	41,093	0,14%	0,01730	0,461	0,2541	0,01811	0,04%	13,0930	13,0758	0,003	0,05930	0,14%
BBIA	2,359	0,03%	0,00021	0,012	0,0003	0,00021	0,01%	0,0168	0,0166	0,001	0,00022	0,01%
BBNI	30,709	0,001%	0,00005	0,022	0,0008	0,00008	0,0002%	0,0438	0,0437	0,028	0,00126	0,004%
BBNP	0,256	0,64%	0,00049	0,006	0,0006	0,00049	0,19%	0,0291	0,0286	0,001	0,00052	0,20%
BBRI	46,662	0,13%	0,01770	0,497	0,2841	0,01985	0,04%	14,6405	14,6229	0,008	0,12862	0,28%
BCIC	0,452	1,15%	0,00157	0,014	0,0038	0,00157	0,35%	0,1978	0,1963	0,002	0,00204	0,45%
BDMN	7,661	0,38%	0,00876	0,142	0,0325	0,00910	0,12%	1,6755	1,6667	0,011	0,02632	0,34%
BEKS	0,303	0,51%	0,00047	0,006	0,0015	0,00047	0,16%	0,0778	0,0774	0,005	0,00087	0,29%
BKSW	0,304	2,12%	0,00193	0,013	0,0039	0,00194	0,64%	0,2002	0,1983	0,001	0,00213	0,70%
BMRI	51,652	0,01%	0,00222	0,185	0,0455	0,00272	0,01%	2,3435	2,3413	0,011	0,02799	0,05%
BNGA	5,720	0,002%	0,00003	0,007	0,0003	0,00004	0,0006%	0,0178	0,0178	0,011	0,00024	0,004%
BNII	5,688	2,23%	0,03802	0,252	0,1179	0,03871	0,68%	6,0746	6,0366	0,006	0,07341	1,29%

BNLI	4,488	4,24%	0,05710	0,271	0,1014	0,05755	1,28%	5,2231	5,1660	0,005	0,08036	1,79%
BSWD	0,079	0,05%	0,00001	0,001	0,0001	0,00001	0,02%	0,0028	0,0028	0,001	0,00002	0,02%
BVIC	0,090	2,87%	0,00077	0,005	0,0007	0,00078	0,86%	0,0339	0,0332	0,003	0,00088	0,98%
INPC	0,857	8,16%	0,02099	0,070	0,0142	0,02104	2,45%	0,7303	0,7093	0,004	0,02372	2,77%
LPBN	6,887	0,58%	0,01202	0,157	0,0550	0,01245	0,18%	2,8334	2,8214	0,008	0,03409	0,49%
MAYA	0,195	0,02%	0,00001	0,001	0,0001	0,00001	0,00%	0,0036	0,0036	0,001	0,00001	0,01%
MEGA	1,800	0,05%	0,00027	0,012	0,0005	0,00027	0,01%	0,0239	0,0237	0,002	0,00030	0,02%
NISP	3,026	0,08%	0,00071	0,025	0,0042	0,00075	0,02%	0,2173	0,2166	0,008	0,00242	0,08%
PNBN	3,863	1,85%	0,03581	0,156	0,0816	0,03655	0,95%	4,2047	4,1689	0,009	0,07394	1,91%
Total	214,8		0,217	2,322	1,004	0,223		51,710	51,493		0,539	11,864%

Sumber: Data IDIC, diolah.

besar dan IDIC juga harus mempunyai cadangan klaim terhadap rugi kejutan ini. Namun untuk mendefinisikan rugi kejutan sebagai cadangan klaim untuk kasus *bank run* bukanlah pilihan terbaik. Karena ada kemungkinan yang signifikan bahwa kerugian akan lebih besar dari rugi harapan (EL_p) dengan lebih dari satu deviasi standar. Oleh karena itu, konsep kapital ekonomik akan lebih baik untuk digunakan dalam menentukan cadangan klaim yang lebih tepat.

Tabel 5 menunjukkan harga premi Penjaminan Simpanan wajar dari model risiko kredit penelitian untuk tahun 2005. Penentuan harga premi akan bergantung pada tiga komponen risiko, yaitu rugi harapan, risiko portofolio, dan premi risiko. Bank-bank berisiko bukan ditunjukkan hanya berdasarkan pada besarnya dana pihak ketiga, tetapi secara relatif akan mempunyai komponen rugi harapan tertinggi, rugi kejutan yang juga relatif terbesar, premi risiko, dan risiko portofolio yang juga tinggi. Jumlah estimasi premi yang berbasiskan risiko total untuk 23 bank ini adalah sebesar Rp 0,539 triliun. Nilai ini adalah nilai teoritik premi Penjamin Simpanan wajar yang seharusnya dikenakan kepada bank-bank anggota IDIC. Nilai ini akan mewakili 0,25% dari total jumlah eksposur sebesar Rp215 triliun.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat ditarik beberapa simpulan, yaitu 1) bentuk distribusi rugi (fungsi densitas probabilitas) menceng ke kanan menunjukkan risiko sistemik perbankan yang tinggi dan 2) berdasarkan premi wajar yang berbasis risiko penelitian ini menunjukkan bahwa kapital ekonomik

IDIC seharusnya sekitar 51,49 triliun (24% dari total eksposur IDIC yang berasal dari 23 bank (Rp214,8 triliun), nilai teoritik premi yang wajar seharusnya berjumlah Rp0,539 triliun (untuk 23 sampel bank) dan nilai tersebut akan mewakili 0,25% dari total jumlah eksposur sebesar Rp215 triliun.

Saran

Beberapa saran yang diajukan berdasarkan temuan penelitian tersebut adalah IDIC dapat menerapkan premi mengambang didasarkan pada risiko bank untuk menggantikan premi tetap yang digunakan saat ini. Premi mengambang tersebut dapat mencerminkan kondisi ekonomik IDIC yang lebih realistis. IDIC perlu menambah cadangan modalnya, karena cadangan saat ini kelihatan lebih rendah dibandingkan cadangan teoritis yang dihitung dalam penelitian ini. Penelitian ini baru menggunakan data 23 saham yang *go-public*. Oleh karena IDIC juga mencakup perbankan yang tidak *go-public*, maka penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel untuk memasukkan bank-bank yang belum *go-public*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arora, N., Bohn, R, J., Zhu, F. 2005. "Reduce Form VS Structural Models of Credit Risk: A Case Study of Three Models". *Journal of Investment Management*, Fourth Quarter.
- Crosby, P. dan Bohan, J. 2003. "Modeling Default Risk: Modeling Methodology", *Moody's K.M.V.*
- Farmen, T.E.S., Westgaard, S.F.S., dan Wijst, N.V. 2004. "Default Greeks under an Objective Probability Measure", Norway, *Working Paper*.
- Kuritzkes, A., Schuermann, T., dan Weiner, S. 2002. "Deposit Insurance and Risk Management of the US Banking System: How much? What price? Who pays". *Working Paper*.
- Sironi, A. dan Zazzara, C. 2004. "Applying Credit Risk Model to Deposit Insurance Pricing: Empirical Evidence from the Italian Banking System", *Journal of International Banking Regulation*. Vol. 6, No. 1:10 - 32.
- Swidler, S., dan Wilcox, J.A. 2002. "Information About Bank Risk in Option Prices". *Journal of Banking and Finance*. Vol. 26:1033 -1057.

THE VALUE RELEVANCE OF ACCOUNTING INFORMATION IN TRANSITION TO IAS/IFRS: THE CASE OF INDONESIA

Eko Widodo Lo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: eko.widodo@stieykpn.ac.id

ABSTRACT

The objective of this research is to present some preliminary evidence for the information content of earnings and book values during transition era to IAS/IFRS in Indonesia, from 1994 to 2009. Sample of this research consists of firms listed in Indonesian Stock exchange in which stock prices, earnings, and book values are available for the study period 1994 to 2009. Data are divided into two periods, namely 1995 to 2000 period and 2001 to 2009 period because there is no or little adoption of IFRS by IIA during the first period. Data are analyzed by using multiple regressions. This research finds that value relevance of earnings and equity book values is higher in the period of significant adoption of IAS/IFRS than the period of little IAS/IFRS adoption. This research also finds that equity book values and earnings have value relevance when both equity book values and earnings are positive. However, both equity book values and earnings do not have value relevance when both equity book values and earnings are negative.

Keywords: value relevance, earnings, equity book value, IFRS

JEL Classification: M41

INTRODUCTION

The objective of financial accounting is to provide relevant accounting information for users of financial statements to make effective and efficient decisions. According to International Accounting Standard Board conceptual framework, the objective of financial statements is to provide information about financial position, performance, and changes in financial position of an entity that is useful to wide area of users in making economic decisions. A good accounting information system will result in accounting information that is useful for users to make sound decision. Investors are the most important group of decision makers who use accounting information. Therefore, it is very important to investigate the extent to which the relevance of accounting information to value companies.

The Indonesian Institute of Accountants (IIA) was aware that implementation a set of high quality standards such as IAS/IFRS will improve comparability of financial statements among companies in the world. In 1994, Indonesian Accountants Association started to converge with IAS/IFRS by adopting IASC's framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements as the conceptual framework for Indonesian GAAP. Since that year, an increasing number of IAS/IFRS has been adopted with no or few modi-

fications. Therefore, most of Indonesian GAAP is now based on IAS/IFRS. The Indonesian Institute of Accountants plans that IAS/IFRS can be fully applied since 2012.

Before 1994, Indonesian GAAP was influenced by US GAAP. US GAAP tends to be conservative and apply historical cost principles. Conservative and historical costs principles are to ensure that the value of firm will not be higher than its intrinsic value. Therefore, under Indonesian GAAP before 1994, the firm value that is reflected in financial statements seems to be lower than the intrinsic firm value. However, IAS/IFRS that were adopted by Indonesia since 1994 tends to improve relevance quality of accounting information. Conservatism principle is not mentioned as a qualitative characteristic in IASB conceptual framework and also in conceptual framework of Indonesian GAAP, and most cases the historical cost principle is substituted by fair value principle. These changes can alter the valuations properties of accounting information in financial statements. The application of fair value principle can lead firm value to be closer to intrinsic value, so that financial statements provide more value-relevant accounting information to stockholders. Therefore, the gradual adoption of IAS/IFRS from 1994 until today will gradually improve the value-relevant of accounting information. Based on the description in background above, it is interesting to examine the influence of IAS/IFRS adoption on the value relevance of accounting information in Indonesia. And, contributions of this research are that research will give preliminary findings about the influence of adopting IAS/IFRS on the value relevance of accounting information to IIA, and attempt to give explanations why IAS/IFRS adoption increases or decreases the value relevance of accounting information.

LITERATURE REVIEW AND METHOD

Agency theory suggests that the firm can be viewed as a nexus of contracts between resource holders. An agency relationship arises whenever one or more individuals, called principals, hire one or more other individuals, called agents, to perform some service and then delegate decision-making authority to the agents. The primary agency relationships in business are between stockholders and managers and between credi-

tors and stockholders. Agency theory assumes that people are self-interest, therefore there agency conflict between participants. When agency problems occur, it results in to agency costs, which are expenses incurred in order to sustain an effective agency relationship.

Agency theory raises a fundamental problem in organizations, namely self-interested behavior. A corporation's managers have personal interests that compete with the owner's interests of maximization of stockholder wealth. Since the stockholders give decision making authority to managers for managing the firm's resources. Therefore, a potential conflict of interest exists between them. Agency theory suggests that, in imperfect labor and capital markets, managers will seek to maximize their own utility at the expense of company stockholders. Managers have the ability to act in their own self-interest rather than in the best interests of the stockholders because of asymmetric information and uncertainty. Information asymmetry here is that managers know more or better than stockholders about the company condition and prospect. Uncertainty means that myriad factors contribute to final outcomes, and it may not be evident whether the agent directly caused a given outcome, positive or negative.

Evidence of self-interested behavior by managers involves the utilization of some company resources in the form of perquisites. Outside investors recognize that the firm will make decisions contrary to their best interests. Therefore, outside investors will discount the prices they are willing to pay for the company's stock. Agency costs are defined as those costs borne by shareholders to encourage managers to maximize shareholder wealth rather than behave in their own self-interests. There are three major types of agency costs, namely monitoring costs, bonding costs, and residual loss.

IFRS are accounting standards that are issued by the International Accounting Standards Board (IASB), an independent organization based in London, UK. They purport to be a set of rules that ideally would apply equally to financial reporting by public companies worldwide. Between 1973 and 2000, international standards were issued by the IASB's predecessor organization, the International Accounting Standards Committee (IASC), a body established in 1973 by the

professional accountancy bodies in Australia, Canada, France, Germany, Japan, Mexico, Netherlands, United Kingdom and Ireland, and the United States. During that period, the IASC's rules were described as "International Accounting Standards" (IAS). Since April 2001, this rule-making function has been taken over by a newly-reconstituted IASB. The IASB describes its rules under the new label "International Financial Reporting Standards" (IFRS), though it continues to recognize the prior rules (IAS) issued by the old standard-setter (IASC). The IASB is better-funded, better-staffed and more independent than its predecessor, the IASC. Nevertheless, there has been substantial continuity across time in its viewpoint and in its accounting standards (Ball, 2006). In recognition of the quality of the core set of IAS, in 2000 the International Organization of Securities Commissions recommended that the world's securities regulators permit foreign issuers to use IAS for cross-border offerings. In 2005, almost all publicly listed companies in Europe and many other countries are required to prepare financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).

The objective of the IASC and IASB is to develop an internationally acceptable set of high quality financial reporting standards. To attain this objective, the IASC and IASB have issued principles-based standards, and taken steps to remove allowable accounting alternatives and to require accounting measurements that better reflect a firm's economic position and performance. Limiting alternatives can increase accounting quality because doing so limits management's opportunistic discretion in determining accounting amounts (Ashbaugh and Pincus, 2001). Accounting figures that better reflect a firm's underlying economics, either resulting from principles-based standards or required accounting measurements, can increase accounting quality because doing so provides investors with information to aid them in making investment decisions. These two sources of higher accounting quality are related in that, all else equal, limiting opportunistic discretion by managers increases the extent to which the accounting amounts reflect a firm's underlying economics. Accounting standards that limit opportunistic discretion result in accounting earnings that are more reflective of a firm's underlying economics and higher quality. Accounting quality can also increase

because of changes in the financial reporting system contemporaneous with firms' adoption of IAS, e.g., more rigorous enforcement. Thus, accounting figures resulting from application of IAS/IFRS are of higher quality than those resulting from application of domestic standards.

IAS/IFRS tend to use fair values than historical costs for accounting measurement. Using fair value for accounting measurement is to achieve relevance quality. Another accounting standard, US GAAP, tends to use conservative and historical cost principles. These principles are to ensure that the firm value will not be higher than its intrinsic value. However, conservatism principle is not mentioned as a qualitative characteristic in IASB conceptual framework, and most cases the historical cost principle is replaced by fair value principle. These changes can change the valuations properties of accounting information in financial statements. Using fair value principle can lead firm value to be closer to intrinsic value, so that financial statements provide more value-relevant accounting information for outside shareholders.

Financial statements are prepared by the managers of companies to investors and other users. The managers are the agents of the stockholders to use the resources entrusted to them and earn return. The managers have access to more information than the stockholders. The financial statements are presented to reduce the information asymmetry between stockholders and managers. Leuz and Verrecchia (2000) studies the reduction in information asymmetry by examining the impact of adoption of IFRS on the volatility of returns, trading volumes, and change in the cost of capital. Daske (2006) find that the cost of capital has actually increased for the IFRS adopters. This research finds that the information asymmetry has increased with the adoption of IFRS.

The ability of IAS/IFRS to achieve a high accounting is questioned by some researchers. Barth *et al.* (2008) stated that there may not be true that application of IAS/IFRS is associated with higher accounting quality, at least for two reasons. IAS may be of lower quality than domestic standards. For example, limiting managerial discretion relating to accounting alternatives could eliminate the firm's ability to report accounting measurements that are more reflective of its economic position and performance. In addition,

the inherent flexibility in principles-based standards could provide greater opportunity for firms to manage earnings, thereby decreasing accounting quality. This flexibility has long been a concern of securities markets regulators, especially in international contexts.

Although IAS are higher quality standards, the effects of features of the financial reporting system other than the standards themselves could eliminate any improvement in accounting quality arising from adopting IAS. Tax enforcement can result in limited compliance with the standards, thereby limiting their effectiveness. Ball, Robin, and Wu (2003) investigate timely loss recognition for firms in Hong Kong, Malaysia, Singapore, and Thailand. In these countries, accounting standards are largely derived from common law and, therefore, likely are similar to IAS. They find that timely loss recognition for firms in these countries is no better than it is for firms in code law countries. They attribute this finding to differing incentives of managers and auditors. Burgstahler, Hail, and Leuz (2006) discover that strong legal systems are associated with less earnings management. The study attributes this finding to different incentives created by market pressures and institutional factors to report earnings that reflect economic performance.

Ball (2006) argues that there are direct and indirect advantages of IFRS for investors. Widespread international adoption of IFRS offers equity investors a variety of potential advantages. There are five advantages as follow 1) IFRS promise more accurate, comprehensive and timely financial statement information, relative to the national standards they replace for public financial reporting in most of the countries adopting them, Continental Europe included. To the extent that financial statement information is not known from other sources, this should lead to more-informed valuation in the equity markets, and hence lower risk to investors; 2) Small investors are less likely than investment professionals to be able to anticipate financial statement information from other sources. Improving financial reporting quality allows them to compete better with professionals, and hence reduces the risk they are trading with a better-informed professional; 3) By eliminating many international differences in accounting standards, and standardizing reporting formats, IFRS eliminates many of the adjustments analysts historically have made in order to make compa-

nies' financials more comparable internationally. IFRS adoption therefore could reduce the cost to investors of processing financial information. The gain would be greatest for institutions that create large, standardized-format financial databases; 4) Reducing the cost of processing financial information most likely increases the efficiency with which the stock market incorporates it in prices. Most investors can be expected to gain from increased market efficiency; and 5) Reducing international differences in accounting standards assists to some degree in removing barriers to cross-border acquisitions and divestitures, which in theory will reward investors with increased takeover premiums.

In general, IFRS offer increased comparability and hence reduced information costs and also information risk to investors. IFRS offer several additional, indirect advantages to investors. Because higher information quality should reduce both the risk to all investors from owning shares and the risk to less-informed investors due to adverse selection, in theory it should lead to a reduction in firms' costs of equity capital. This would increase share prices, and would make new investments by firms more attractive, other things equal. Indirect advantages to investors arise from improving the usefulness of financial statement information in contracting between firms and a variety of parties, notably lenders and managers.

Increased transparency causes managers to act more in the interests of shareholders. In particular, timelier loss recognition in the financial statements increases the incentives of managers to attend to existing loss-making investments and strategies more quickly, and to undertake fewer new investments with negative NPVs. The increased transparency promised by IFRS also could cause a similar increase in the efficiency of contracting between firms and lenders. In particular, timelier loss recognition in the financial statements triggers debt covenants violations more quickly after firms experience economic losses that decrease the value of outstanding debt. Timelier loss recognition involves timelier revision of the book values of assets and liabilities, as well as earnings and stockholders' equity, causing timelier triggering of covenants based on financial statement variables. In other words, the increased transparency and loss recognition timeliness promised by IFRS can increase the efficiency of

contracting in debt markets, with potential gains to equity investors in terms of reduced cost of debt capital.

Ball (2006) states that there is an ambiguous area for investors about the effect of IFRS on their ability to forecast earnings. There are two schools of thought about this, as follow 1) One school of thought is that better accounting standards make reported earnings less noisy and more accurate, hence more “value relevant.” Other things equal (for example, ignoring enforcement and implementation issues for the moment) this would make earnings easier to forecast and would improve average analyst forecast accuracy; 2) The other school of thought reaches precisely the opposite conclusion. This reasoning is along the lines that managers in low-quality reporting regimes are able to “smooth” reported earnings to meet a variety of objectives, such as reducing the volatility of their own compensation, reducing the volatility of payouts to other stakeholders (notably, employee bonuses and dividends), reducing corporate taxes, and avoiding recognition of losses. In contrast, earnings in high-quality regimes are more informative, more volatile, and more difficult to predict. This argument is bolstered in the case of IFRS by their emphasis on fair value accounting, as outlined in the following section. Fair value accounting rules aim to incorporate more-timely information about economic gains and losses on securities, derivatives and other transactions into the financial statements, and to incorporate more-timely information about contemporary economic losses (“impairments”) on long term tangible and intangible assets. IFRS promise to make earnings more informative and therefore, paradoxically, more volatile and more difficult to forecast.

IAS/IFRS adoption seems to reduce information asymmetry between stockholders and managers. Prior literature finds a reduction of information asymmetry as evidenced by lower earnings management, lower costs of capital, and lower forecast errors. Barth et al. (2008) argue that accounting quality can be improved by elimination of alternative accounting methods that are less reflective of firms’ performance and are used by managers to manage earnings. They compare earnings management for firms that voluntarily switch to IAS with firms that use domestic accounting standards. They discover that after IAS adoption, com-

panies have higher variance of changes in net income, a higher ratio of variance of changes in net income to variance of changes in cash flows, higher association between accruals and cash flows, lower frequency of small positive net income, and higher frequency of large losses. They also investigate the value relevance of earnings by comparing the R^2 from two regressions 1) Price regressed on book value and earnings and 2) Earnings regressed on positive and negative returns.

They discover that R^2 increases after IAS adoption, providing evidence of greater value relevance for IAS earnings. Van Tendeloo and Vanstraelen (2005) study discretionary accruals of German companies adopting IAS. They find that IAS companies have more discretionary accruals and a lower correlation between accruals and cash flows. However, their usage of the Jones (1991) model in this setting may lead to measurement errors for discretionary accruals. The Jones model needs fixed assets for measurement of non-discretionary accruals. If fixed assets are revalued under IAS, non-discretionary accruals as a predicted value from revenue and fixed assets may contain errors. Intuitively, if out-of-sample revalued fixed assets are plugged in to get non-discretionary accruals, this will reduce the amount of discretionary accruals, but the effect on the absolute amount of discretionary accruals is unknown. If future depreciation expense is based on the revalued amount, asset revaluation will also change future total accruals through a higher depreciation expense. However, the change in accruals attributable to asset revaluation may be value relevant.

Leuz (2003) studies bid-ask spreads and stock turnover ratios for U.S. GAAP and IAS firms in Germany’s New Market, where U.S. GAAP and IAS are the only allowed financial reporting standards. He cannot find any statistical differences in bid-ask spreads and turnover ratios across the two standards. Ashbaugh and Pincus (2001) investigate whether analyst forecast errors decrease after a firm adopts IAS. They argue that IAS adoption reduces analysts’ cost of information acquisition and improves forecast accuracy, even though earnings smoothing under other accounting standards makes forecasts easier. They discover that forecast errors are positively related to the difference between a country’s domestic accounting standards and IAS. After IAS adoption, forecast errors decrease and the number of news reports about

firms sample increase.

Since Ball and Brown (1968), many accounting researchers have been studying the relationships between accounting numbers and stock prices. In this section, this study briefly review recent research conducted by using Asian, European, and U.S. data. Collins *et al.* (1997) investigate systematic changes in the value-relevance of earnings and book value during the period of 1953 to 1993 by using US firms. They find the combined value-relevance of earnings and equity book values has not declined over forty years, and it appeared to have increased slightly. They investigate the incremental explanatory power of earnings and equity book values of stock prices and discover that there are a decline earnings explanatory power and an increase of equity book values over the period of study.

Shamy and Kayed (2005) investigate the value relevance of earnings and book values derived under Kuwaiti accounting system that assures a complete compliance with international Accounting Standards. They use data from listed firms in Kuwaiti Stock Exchange over the period 1992 to 2001. By using a valuation model provided by Ohlson (1995) they find that 1) Earnings and equity book values jointly and individually are positively and significantly connected to stock prices; 2) Incremental information content of earnings is higher than equity book values; 3) Earnings for profit companies add more to the overall explanatory of the model than book values; 4) Earnings for loss companies do not add any value to the overall of explanatory power of the model, but book values add more to the overall explanatory power; 5) The best fit for the model was obtained for the industrial and food sectors followed by service and financial institutions; and 6) Earnings add more to the overall explanatory power of the model than equity book value for financial institutions, services, investments and real estate sectors, while book value add more the overall explanatory power only for industrial sectors.

Kousenidis *et al.* (2010) explore the value relevance of accounting information, Equity book values and earnings, in the pre and post-periods of International Financial Reporting Standards implementation. Their study uses a sample of Greek companies for the period 2003 to 2006. He uses Easton and Harris's (1991) and Feltham and Ohlson's (1995) valuation models. They find that the value relevance of equity book val-

ues decreased in the post-IFRS period. This finding may be attributed to the higher volatility of the equity book value in that period. However, earnings have an increasing explanatory power on stock prices in the post-IFRS period. This might be as a reaction to the decrease in the information content of equity book values, because earnings and equity book values behave as substitutes in the valuation model.

Alfaraih and Alanezi (2011) study the value relevance of accounting earnings and equity book values information produced by listed companies in Kuwait Stock exchange (KSE) over the period 1995 to 2006. They use price level and returns models. They discover that earnings and equity book values were, jointly and individually, positively and significantly related to stock prices and returns. They find that the value relevance of earnings and equity book values of KSE-listed firms is higher, in terms of adjusted R² and earnings coefficient, than the findings observed in some developed and emerging countries. This implies that KSE investors rely on earnings and equity book values information than other markets. The greater value relevance can be partially attributed to the fairly limited sources of credible and useful competing information available to market participants and the lack of alternative sources of information about the prospects.

Empirical research on the improvement of financial statement quality due to the adoption of IFRS can be categorized into two different groups: those that examined the effects of voluntary adoption of IFRS and those that examined the effects of mandatory adoption of IFRS. Tarca (2001) explores the extent to which firms make policy choices that align with US GAAP or International Accounting Standards (IASs), and the attributes of firms that align with either regime. Using companies from the UK, France, Germany, Japan and Australia, five policy areas (tangible assets, available-for-sale marketable securities, identifiable intangible assets, research and development expenditure and software development expenditure) are investigated. They discover that there are considerable between-country differences in the extent to which companies align with US GAAP or IASs options that are not acceptable under US GAAP.

Hung and Subramanyam (2007) investigate the influence of the voluntary adoption of IFRS by using German listed firms in the period 1998 – 2002. They

discover that the adoption of IFRS does not increase the value relevance of net income and equity book values. However, they find that book value has a significantly larger valuation coefficient and net income has a significantly smaller valuation coefficient under IFRS than under German General Accepted Accounting Principles (GAAP). These results are consistent with IFRS reducing income persistence.

Bartov *et al.* (2005) investigate the comparative value relevance among IAS, US and German accounting standards. In their sample they included, firstly, German firms that were listed on the Frankfurt Stock Exchange and followed the German GAAP and, secondly, German firms that listed on either the Frankfurt Stock Exchange or the Neuer Markt and had switched voluntarily to US GAAP or IAS during the period 1998-2000. Using returns models they found that the value relevance of IAS and US based earnings is higher than that of German GAAP-based earnings suggesting higher accounting quality under an IAS or US accounting regime.

Barth *et al.* (2008) test whether the application of IFRS is associated to higher accounting quality. They combine data from 21 countries that adopted the IFRS and reported that firms applying IFRS evidence less earnings management, more timely loss recognition and more value relevance of accounting figures. Daske *et al.* (2008) explores the economic consequences of the introduction of mandatory IFRS reporting in 26 countries across the world and more specifically the effects on market liquidity, cost of equity capital and Tobin's Q. They find that market liquidity and equity valuations increase around the time of the mandatory introduction of IFRS although the results for the cost of capital are mixed. They also discover that the capital market benefits exist only in countries with strict enforcement regimes and institutional environments that provide strong reporting incentives. Moreover, the effects are weaker when local GAAP are closer to IFRS, in countries with an IFRS convergence strategy, and in industries with higher voluntary adoption rates.

Christensen *et al.* (2008) explores the impact of incentives on accounting quality changes around IFRS adoption. They test earnings management and timely loss recognition, constructs often used to assess accounting standards quality. While existing literature documents accounting quality improvements follow-

ing IFRS adoption, they find that improvements are confined to firms with incentives to adopt. We discover that firms that resist IFRS have closer connections with banks and inside shareholders, which can explain these firms' lack of incentives to adopt IFRS. The overall results show that incentives dominate accounting standards in determining accounting quality. Schadewitz and Vieru (2007) studies the value relevance of the reconciliations imposed by IFRS in the Finnish Stock Market. Finland is usually perceived as a code law country with strong law enforcement. Using a sample of 86 firms and two price models they discover that only the earnings reconciliations are positively value relevant. Equity reconciliations have either a negative coefficient or are statistically insignificant based on the model used.

Paananen (2008) investigates whether the quality of financial reporting has increased in Sweden (a code law country) after the mandatory adoption of IFRS. The analysis of accounting quality includes measures of earnings smoothing, timeliness and association to share prices. Unexpectedly, the results of all these measures suggest a decrease to the accounting quality of the IFRS adoption.

Paananen and Lin (2009) investigates the characteristics of accounting amounts by using a sample of German companies reporting under IAS during 2000-2002 (IAS period), and IFRS during 2003-2004 (IFRS voluntary period), and 2005-2006 (IFRS mandatory period). They discover a decrease in accounting quality after the mandatory EU adoption in 2005. Their findings on earnings smoothing and timely loss recognition corroborated largely their findings related value relevance of accounting information. Their results show that accounting quality has not improved but worsened over time. Further analysis showed that this development is less likely to be driven by new adopters of IFRS but it was driven by the changes of standards. Contrary to the intention of the European adoption of IFRS, this made it harder for investors to base their decisions on the IFRS financial reporting.

Armstrong *et al.* (2010) studies European stock market reactions to 16 events associated with the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Europe. European IFRS adoption represents a major milestone towards financial reporting convergence yet spurred controversy reaching the highest

levels of government. They discover an incrementally positive reaction for firms with lower quality pre-adoption information, which was more pronounced in banks, and with higher pre-adoption information asymmetry, consistent with investors expecting net information quality benefits from IFRS adoption. They find an incrementally negative reaction for firms domiciled in code law countries, consistent with investors' concerns over enforcement of IFRS in those countries. They also discover that a positive reaction to IFRS adoption events for firms with high quality pre-adoption information, consistent with investors expecting net convergence benefits from IFRS adoption.

Khanaga (2011) investigates the value relevance of accounting information in two selected countries which can describe the influence of adapting to IFRS on value relevancy of accounting information in these countries. The results obtained from a combination of regression and portfolio approaches, show that accounting information is value relevant in Bahrain and the United Arab Emirates (UAE) stock market. A comparison of the results for the periods before and after adoption, based on both regression and portfolio approaches, shows an improvement in value relevance of accounting information after the reform in accounting standards in Bahrain stock market, while the results for UAE stock market, indicate a decline in value relevance of accounting information after the reform in accounting standards. It can be interpreted to mean that following to IFRS in UAE does not improve value relevancy of accounting information.

The objective of IFRS that adopted by IIA is to provide relevant accounting information to investor, so that it is expected that the value relevance of both earnings and equity book values increase. IIA adopted IASB conceptual framework as Indonesian GAAP conceptual framework in 1994. However, there is no or little adoption of IAS/IFRS during the period of 1995 to 2000. IIA began to do a significant adoption of IFRS in 2001 by revising at least seven standards. Then, in the end of year 2003, IIA enforced Indonesia Financial Accounting Standard No. 1 to No. 59 and Interpretations No. 1 to No. 4. Most of them have adopted IFRS/IAS. Based on this premise, the following hypothesis is formulated.

H1: The value relevance of earnings and equity book values is higher in the period of significant adop-

tion of IAS/IFRS than the period of little IAS/IFRS adoption.

Shamy and Kayed (2005) find earnings for profit companies increase the overall explanatory of the model than equity book values. For loss firms, earnings do not increase the overall explanatory power, but book values add more to the overall explanatory power. Based on these findings, the following hypotheses are formulated.

H2a: Equity book values and earnings have value relevance when both equity book values and earnings are positive.

H2b: Both equity book values and earnings do not have value relevance when both equity book values and earnings are negative.

This study follows previous empirical research in accounting that examines the value relevance of accounting information by testing the relationship between stock prices, earnings, and book values. This study uses Ohlson valuation model (1995) that has been used extensively in prior research. This model expresses the firm value as a function of its earnings and equity book values as follows:

$$P_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot E_{it} + \alpha_2 \cdot EBV_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Where:

P_{it} = Firm i's stock price at the end of year t

E_{it} = Earnings per share for firm i during period t

EBV_{it} = Equity book value per share for firm i at the end of period t

ε_{it} = Other value-relevant information of firm i for period t besides earnings and equity book value

Based of the equation above, the dependent variable is stock price and independent variables are earnings and equity book values.

This research uses Collins *et al.* (1997) methodology to compare the explanatory power of earnings and equity book values. They decomposed the combined explanatory power of earnings and book value as measured by adjusted R^2 of equation 1 into three components 1) The incremental explanatory power of earnings; 2) The incremental explanatory of equity book values; and 3) The explanatory common to both earnings and book values.

This research uses adjusted R^2 to measure the combined explanatory power of earnings and equity

book values and does not decompose it. This research uses adjusted R^2 because it gives a conservative measurement of explanatory power. Magnitude of adjusted R^2 is lower than R^2 because adjusted R^2 considers number of independent variables and size of sample in measuring explanatory power.

The sample that is chosen for this study includes firms listed in Indonesian Stock exchange in which stock prices, earnings, and book values are available for the study period 1994 to 2009. Data are divided into two periods, namely 1995 to 2000 period and 2001 to 2009 period because there is no or little adoption of IFRS by IIA during the first period. Data that are used to test the hypotheses are secondary data of companies' financial statements that listed in Indonesia Stock Exchange in year 1994 to 2009. The sources of data are Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and www.idx.co to get a part sample that consists of companies financial statements.

RESULTS AND DISCUSSION

Table 1 shows results of multiple regressions analysis to test hypothesis 1. The results indicate that adjusted R^2 (0.237) of sub sample of period 1994 to 2000 is higher than adjusted R^2 (0.217) of sub sample of period 2001

to 2009. These results support hypothesis 1 that value relevance of earnings and equity book value is higher in period of significant adoption of IAS/IFRS than the period of little IAS/IFRS adoption. However, the results must be interpreted carefully because EPS coefficient of period 2001 to 2009 is not significant. Coefficients of EPS change. EPS coefficient of period 1994 is significant (0.315, t-value= 4.965), but it becomes insignificant for period 2000 to 2009 (-0.331, t-value= -0.331). It means that value relevance of earnings decreases. However, value relevance of equity book value increases. Coefficient of EBVS is 0.198 (t-value= 10.967) for period 1994 to 2000, and it becomes 0.698 (t-value= 10.468) for period 2001 to 2009.

Table 2 indicates results of multiple regression analysis to test hypothesis 2a. The results show that regression coefficient of EPS is positive (1.173) and significant (t-value= 6.256), it means that earnings have value relevance. Coefficient of regression of EBVS is also positive (0.229) and significant (t-value= 5.666), this indicates that equity book values have also value relevance. These results support hypothesis 2a that equity book values and earnings have value relevance when both equity book values and earnings are positive.

Table 1
Results of Regressions of Price on Earnings and Equity Book Values for
Period 1994 to 2000 and Period 2001 to 2009

Independent Variables	Sub Samples	
	Period 1994 to 2000	Period 2001 to 2009
Constant	2103.039*	1850.163*
	(13.139)	(5.772)
Earnings per share	0.315*	-0.331
	(4.965)	(-0.113)
Equity book values per share	0.198*	0.698*
	(10.967)	(10.468)
Adjusted R^2	0.217	0.237
P-Value of Regression Model	0.000	0.000
Number of year-firm observations	1091	1195

*denotes significant at 1%

Table 2
Results of Regressions of Price on Earnings and Equity Book Values for Period 1994 to 2009-Sub Sample of Positive Earnings and Positive Equity Book Values

Independent Variables	Sub Sample of Positive EPS and Positive EBVS
Constant	2351.231*(8.547)
EPS	1.137*(6.256)
EBVS	0.229*(5.666)
Adjusted R ²	0.189
P-Value of Regression	0.000
Number of year-firm observations	1583

*denotes significant at 5%

Table 3 shows results of multiple regression analysis of hypothesis 2b testing. The results indicate that EPS regression coefficient is positive (0.0455) and insignificant (t-value= 0.624), this means that earnings do not have value relevance. Regression coefficient of EBVS is negative (-0.0924) and significant (t-value= -2.672), this shows that equity book values have value relevance but the coefficient is negative. This sign is odd and unpredicted. This negative sign means that when equity book values decrease, the prices will increase. It is not common sense. These results support hypothesis 2b that equity book values and earnings do not have value relevance when both equity book values and earnings are negative.

Empirical data analysis results support hypothesis 1 that value relevance of earnings and equity book values is higher in the period of significant adoption of IAS/IFRS than the period of little IAS/IFRS adoption. This finding proves that the adoption of IAS/IFRS by IIA increases the value relevance of accounting information. IIA made a significant adoption of IAS/IFRS since 2001 to provide relevant accounting information to investors. This research proves that the value relevance of earnings and equity book values increases after 2001. This finding is consistent with Khanaga (2011) that investigates the value relevance of accounting information in Bahrain after reforming its accounting standard by adopting IFRS. It shows an improvement in value relevance of accounting information af

Table 3
Results of Regressions of Price on Earnings and Equity Book Values for Period 1994 to 2009-Sub Sample of Negative Earnings and Negative Equity Book Values

Independent Variables	Sub Sample of Negative EPS and Negative EBVS
Constant	463.371*(5.260)
EPS	0.0455(0.624)
EBVS	-0.0924*(-2.672)
Adjusted R ²	0.042
P-Value of Regression	0.000
Number of year-firm observations	207

*denotes significant at 5%

ter the reforming accounting standards in Bahrain stock market. This finding also support a premise that fair value will increase the value relevance of accounting information because IAS/IFRS that are adopted by IIA tend to use more fair values than historical costs for accounting measurement. Accounting measurement by using fair value can lead value of firm to be closer to intrinsic value, so that accounting information is more value-relevant to investors.

Although the results support hypothesis 1, they must be interpreted carefully because regression coefficient of EPS for f period 2001 to 2009 is not significant. EPS coefficient of period 1994 to 2000 is significant (0.315, t-value= 4.965), but it becomes insignificant for period 2001 to 2009 (-0.331, t-value= -0.331). These mean that value relevance of earnings decreases. However, value relevance of equity book value increases. EBVS coefficient is 0.198 (t-value= 10.967) for period 1994 to 2000, and it becomes 0.698 (t-value= 10.468) for period 2001 to 2009. This finding shows that during IAS/IFRS adoption equity book values have higher value relevance than earnings.

Results of data analysis support hypothesis 2a that equity book values and earnings have value relevance when both equity book values and earnings are positive. This finding shows that when equity book values and earnings are positive, both are used by investor to make investment decisions. This finding is consistent with Shamy and Kayed (2005). They find

that earnings and book values have explanatory power when they are positive.

Empirical results also support hypothesis 2b that equity book values and earnings do not have value relevance when both equity book values and earnings are negative. The results of data analysis show that EPS regression coefficient is positive and insignificant, this indicate that earnings do not have value relevance. However, coefficient of EBVS is negative (-0.0924) and significant (t-value= -2.672), this finding indicates that equity book values have value relevance but the coefficient is negative. The sign is strange. The negative sign means that share price will increase when equity book values decrease. It is difficult to explain.

CONCLUSION

The goal of this research is to give preliminary evidence for information content of equity book values and earnings during transition era to IAS/IFRS in Indonesia. This research compares the value relevance of equity book values and earnings in the period of significant adoption of IAS/IFRS (1994 to 2000) and the period of little IAS/IFRS adoption (2001 to 2009). This research finds that value relevance of earnings and equity book values is higher in the period of significant adoption of IAS/IFRS than the period of little IAS/IFRS adoption. This research also finds that equity book values and earnings have value relevance when both equity book values and earnings are positive. However, both equity book values and earnings do not have value relevance when both equity book values and earnings are negative.

The limitation of this research is that the regression models cannot fulfill all of classical assumptions. Heteroscedasticity problem occurs in all equations. However, this problem cannot be overcome, although the variables have been deflated by using number of outstanding shares, this research uses earnings per share, equity book values per share, and share price. Because this research must use negative earnings and negative equity book values, heteroscedasticity cannot be reduced by using log or natural log. Log or natural log cannot be applied on negative values.

REFERENCES

- Alfaraih, M. and F. Alanezi. 2011. "The Usefulness of earnings and book value for equity valuation to Kuwait stock exchange participants". *The International Business & Economics Research Journal*. 10, 1: 73-89.
- Armstrong, C.S., M. E. Barth, A.D. Jagolinzer, and E.J. Riedl. 2010. "Market Reaction to the Adoption of IFRS in Europe". *The Accounting Review*, 85, 1:31-61.
- Ashbaugh, H., and M. Pincus. 2001. "Domestic Accounting Standards, International Accounting Standards, and the Predictability of Earnings". *Journal of Accounting Research*. 39: 417-434.
- Ball, R. 2006. "International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and Cons for Investors". *Accounting & Business Research*. 2006, 36(Special Issue): 5-27.
- Ball, R. and P. Brown. 1968. "An Empirical evaluation of accounting income numbers". *Journal of Accounting Research*. 6: 159-178.
- Ball, R., A. Robin, and J.S. Wu. 2003. "Incentives versus Standards: Properties of Accounting Income in Four East Asian Countries". *Journal of Accounting and Economics*. 36: 235-270.
- Barth, M.E, W.R. Landsman, and M.H. Lang. 2008. "International accounting standards and accounting quality". *Journal of Accounting Research*. 46, 3:467-728.
- Bartov, E., S. R. Goldberg, and M.-S. Kim. 2005. "Comparative Value Relevance Among German, U.S. and International Accounting Standards: A German Stock Market Perspective". *Journal of Accounting Auditing and Finance*. 20, 2: 95-119.
- Burgstahler, D., L. Hail, and C. Leuz. 2006. "The Importance of Reporting Incentives: Earnings Management in European Private and Public Firms".

- The Accounting Review*. 8, 1: 983-1016.
- Collins, D., E. Maydew, and I. Weiss. 1997. "Changes in the value relevance of earnings and book values of equity over the past forty years". *Journal of Accounting and Economics*. 24: 39-67.
- Christensen, H.B., E. Lee, and M. Walker. 2008. "Incentives or standards: What determines accounting quality changes around IFRS adoption?" *Working Paper*. Manchester Business School.
- Daske, H. 2006. "Economic Benefits of Adopting IFRS or US GAAP - Have the Expected Cost of Equity Capital Really Decreased?" *Journal of Business Finance & Accounting*. 33: 329-373.
- Daske, H., L. Hail, C. Leuz, and R. Verdi. 2008. "Mandatory IFRS Reporting around the World: Early Evidence on the Economic Consequences". *Journal of Accounting Research*. 46, 5: 1085-1142.
- Easton, P. and T. Harris. 1991. "Earnings as an Explanatory Variable for Returns". *Journal of Accounting Research*. 29:19-36.
- Feltham, G.A. and J.A. Ohlson. 1995. "Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities". *Contemporary Accounting Research*. 11, 2: 689-731.
- Hung, M. and K.R. Subramanyam. 2007. "Financial Statement Effects of Adopting International Accounting Standards: The Case of Germany". *Review of Accounting Studies*, 12, 4: 623-657.
- Jones, J. 1991. "Earnings management during import relief investigations". *Journal of Accounting Research*. 29, 2: 193-228.
- Khanaga, J.B. 2011. "International Financial Reporting Standards (IFRS) and Value Relevance of Accounting Information: Evidence from Bahrain and United Arab Emirates Stock Markets". *African Journal of Social Sciences*. 1, 1: 101-114.
- Kousenidis, D.V., A.C. Ladas, and C.I. Negakis. 2010. "Value Relevance of Accounting Information in the Pre- and Post-IFRS Accounting Periods". *European Research Studies*. Volume XIII, Issue (1): 143-152.
- Leuz, C. 2003. "IAS versus US GAAP: information-asymmetry based evidence from Germany's New Market". *Journal of Accounting Research*. 41, 3: 445-72.
- Leuz, C. and R. E. Verrecchia. 2000. "The Economic Consequences of Increased Disclosure". *Journal of Accounting Research*. 38 (Supplement): 91-124.
- Ohlson, J. 1995. "Earnings, book values, and dividends in equity valuation". *Contemporary Accounting Research*. 11: 661-687.
- Paananen, M. 2008. "The IFRS Adoption's Effect on Accounting Quality in Sweden". *Working Paper*. Business School, University of Hertfordshire.
- Paananen M. and H. Lin. 2009. "The development of accounting quality of IAS and IFRS over time: The case of Germany". *Journal of International Accounting Research*. 8, 1: 31-55.
- Schadewitz, H. and M. Vieru. 2007. "Impact of IFRS transition complexity on audit and audit fees: Evidence from small and medium sized listed in Finland". *Working Paper*. Turku School of Economics. University of Lapland.
- Shamy, M.A. E. and M.A. Kayed. 2005. "The value relevance of earnings and book values in equity valuation: An International perspective-The case of Kuwait". *International Journal of Commerce & Management*. 15, 1: 68-79.
- Tarca, A. 2001. "Achieving international harmonization through accounting policy choice". *Working Paper*. University of Western Australia.

Van Tendeloo, B. and A. Vanstraelen. 2005. "Earnings management under German GAAP versus IFRS". *European Accounting Review*. 14, 1: 155-80.

INDEKS SUBYEK JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN

A

abnormal accruals 79, 81, 83, 86
accounting discretion 105, 116
accrual discretionary 105
ASEAN 92, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

C

corporate governance 105, 106, 116, 117
credit risk 129, 137

D

debt 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 120, 142, 143
deposit insurance corporation 129

E

earnings 79, 81, 105, 139, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150
earnings quality 79, 85, 86
equity book value 139, 144, 145, 146, 147, 148,
149

F

fair rate insurance premium 129
flat rate insurance premium 129

I

IFRS 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151
income smoothing 105
International Trade 127
international trade 119, 120, 121, 126

M

moral hazard 129, 130

N

negative earnings surprise avoidance 105

P

policy 119, 120, 126, 144, 150

S

size 79, 81, 82, 83, 84, 105, 119, 147, 150
speed adjustment 119, 120, 126

T

tax ratio 87
tax reform 87
tax regime 87

V

value relevance 85, 139, 140, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150

Vol. 23, No. 2, Agustus 2012

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

INDEKS PENGARANG JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN

A

Abdul Hakim 119

B

Bambang Sudibyo 87

Bambang Suropto 105

Bambang Sutopo 79

E

Eduardus Tandelilin 129

Eko Widodo Lo 139

F

Firman Pribadi 129

J

Jaka Sriyana 119

M

Mamduh M.Hanafi 129

S

Suad Husnan 129

PEDOMAN PENULISAN JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN

Ketentuan Umum

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Penulis mengirim tiga eksemplar naskah dan satu *compact disk* (CD) yang berisikan naskah tersebut kepada redaksi. Satu eksemplar dilengkapi dengan nama dan alamat sedang dua lainnya tanpa nama dan alamat yang akan dikirim kepada mitra bestari. Naskah dapat dikirim juga melalui *e-mail*.
3. Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan di media lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh semua penulis bahwa naskah tersebut belum pernah dipublikasikan. Pernyataan tersebut dilampirkan pada naskah.
4. Naskah dan CD dikirim kepada *Editorial Secretary*
Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 • Fax. (0274) 486155
e-mail: rudy.badrudin@stieykpn.ac.id

Standar Penulisan

1. Naskah diketik menggunakan program *Microsoft Word* pada ukuran kertas A4 berat 80 gram, jarak 2 spasi, jenis huruf Times New Roman berukuran 12 *point*, margin kiri 4 cm, serta margin atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm.
2. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan tabel dikelompokkan bersama pada lembar terpisah di bagian akhir naskah.
3. Angka dan huruf pada gambar, tabel, atau histogram menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 *point*.
4. Naskah ditulis maksimum sebanyak 15 halaman termasuk gambar dan tabel.

Urutan Penulisan Naskah

1. Naskah hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil, Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
2. Naskah kajian pustaka terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Masalah dan Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
3. Judul ditulis singkat, spesifik, dan informatif yang menggambarkan isi naskah maksimal 15 kata. Untuk kajian pustaka, di belakang judul harap ditulis Suatu Kajian Pustaka. Judul ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 14 *point*, jarak satu spasi, dan terletak di tengah-tengah tanpa titik.
4. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis disertai alamat institusi penulis yang dilengkapi dengan nomor kode pos, nomor telepon, fax, dan *e-mail*.

5. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata menggunakan bahasa Inggris. Abstrak mengandung uraian secara singkat tentang tujuan, materi, metode, hasil utama, dan simpulan yang ditulis dalam satu spasi.
6. Kata Kunci (*Keywords*) ditulis miring, maksimal 5 (lima) kata, satu spasi setelah abstrak.
7. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan pustaka yang mendukung. Dalam mengutip pendapat orang lain dipakai sistem nama penulis dan tahun. Contoh: Badrudin (2006); Subagyo dkk. (2004).
8. Materi dan Metode ditulis lengkap.
9. Hasil menyajikan uraian hasil penelitian sendiri. Deskripsi hasil penelitian disajikan secara jelas.
10. Pembahasan memuat diskusi hasil penelitian sendiri yang dikaitkan dengan tujuan penelitian (pengujian hipotesis). Diskusi diakhiri dengan simpulan dan pemberian saran jika dipandang perlu.
11. Pembahasan (*review/kajian pustaka*) memuat bahasan ringkas mencakup masalah yang dikaji.
12. Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang membantu sehingga penelitian dapat dilangsungkan, misalnya pemberi gagasan dan penyandang dana.
13. Ilustrasi:
 - a. Judul tabel, grafik, histogram, sketsa, dan gambar (foto) diberi nomor urut. Judul singkat tetapi jelas beserta satuan-satuan yang dipakai. Judul ilustrasi ditulis dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 point, masuk satu tab (5 ketukan) dari pinggir kiri, awal kata menggunakan huruf kapital, dengan jarak 1 spasi
 - b. Keterangan tabel ditulis di sebelah kiri bawah menggunakan huruf Times New Roman berukuran 10 point jarak satu spasi.
 - c. Penulisan angka desimal dalam tabel untuk bahasa Indonesia dipisahkan dengan koma (,) dan untuk bahasa Inggris digunakan titik (.).
 - d. Gambar/Grafik dibuat dalam program Excel.
 - e. Nama Latin, Yunani, atau Daerah dicetak miring sedang istilah asing diberi tanda petik.
 - f. Satuan pengukuran menggunakan Sistem Internasional (SI).
14. Daftar Pustaka
 - a. Hanya memuat referensi yang diacu dalam naskah dan ditulis secara alfabetik berdasarkan huruf awal dari nama penulis pertama. Jika dalam bentuk buku, dicantumkan nama semua penulis, tahun, judul buku, edisi, penerbit, dan tempat. Jika dalam bentuk jurnal, dicantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor publikasi, dan halaman. Jika mengambil artikel dalam buku, cantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, editor, judul buku, penerbit, dan tempat.
 - b. Diharapkan dirujuk referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi pustaka primer (jurnal) minimal 80%.
 - c. Hendaknya diacu cara penulisan keputakaan seperti yang dipakai pada JAM/JEB berikut ini:

Jurnal

Yetton, Philip W., Kim D. Johnston, and Jane F. Craig. Summer 1994. "Computer-Aided Architects: A Case Study of IT and Strategic Change." *Sloan Management Review*: 57-67.

Buku

Paliwoda, Stan. 2004. *The Essence of International Marketing*. UK: Prentice-Hall, Ince.

Prosiding

Pujaningsih, R.I., Sutrisno, C.L., dan Sumarsih, S. 2006. Kajian kualitas produk kakao yang diamoniasi dengan aras urea yang berbeda. Di dalam: *Pengembangan Teknologi Inovatif untuk Mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional* dalam Rangka HUT ke-40 (Lustrum VIII) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto, 11 Pebruari 2006. Fakutas Peternakan UNSOED, Purwokerto. Halaman 54-60.

Artikel dalam Buku

Leitzmann, C., Ploeger, A.M., and Huth, K. 1979. The Influence of Lignin on Lipid Metabolism of The Rat. In: G.E. Inglett & S.I. Falkehag. Eds. *Dietary Fibers Chemistry and Nutrition*. Academic Press. INC., New York.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Assih, P. 2004. Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap Hubungan antara Faktor Faktor Motivasional dan Tingkat Manajemen Laba. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana S-3 UGM. Yogyakarta.

Internet

Hargreaves, J. 2005. Manure Gases Can Be Dangerous. Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland Government. <http://www.dpi.qld.gov.au/pigs/9760.html>. Diakses 15 September 2005.

Dokumen

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2006. Sleman Dalam Angka Tahun 2005.

Mekanisme Seleksi Naskah

1. Naskah harus mengikuti format/gaya penulisan yang telah ditetapkan.
2. Naskah yang tidak sesuai dengan format akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki.
3. Naskah yang sesuai dengan format diteruskan ke *Editorial Board Members* untuk ditelaah diterima atau ditolak.
4. Naskah yang diterima atau naskah yang formatnya sudah diperbaiki selanjutnya dicarikan penelaah (MITRA BESTARI) tentang kelayakan terbit.
5. Naskah yang sudah diperiksa (ditelaah oleh MITRA BESTARI) dikembalikan ke *Editorial Board Members* dengan empat kemungkinan (dapat diterima tanpa revisi, dapat diterima dengan revisi kecil (*minor revision*), dapat diterima dengan revisi *mayor* (perlu direview lagi setelah revisi), dan tidak diterima/ditolak).
6. Apabila ditolak, *Editorial Board Members* membuat keputusan diterima atau tidak seandainya terjadi ketidaksesuaian di antara MITRA BESTARI.
7. Keputusan penolakan *Editorial Board Members* dikirimkan kepada penulis.
8. Naskah yang mengalami perbaikan dikirim kembali ke penulis untuk perbaikan.
9. Naskah yang sudah diperbaiki oleh penulis diserahkan oleh *Editorial Board Members* ke *Managing Editors*.
10. Contoh cetak naskah sebelum terbit dikirimkan ke penulis untuk mendapatkan persetujuan.
11. Naskah siap dicetak dan cetak lepas (*off print*) dikirim ke penulis.